

BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

Di dalam Bab 4 ini akan dijelaskan tentang gambaran umum objek penelitian *locus* utama, Jakarta dan Surabaya, hasil penelitian, dan pembahasan. Pembahasan berupa analisis yang akan memunculkan kategorisasi level *defense heritage*. Kategorisasi level *defense heritage* itu akan dikaitkandengan sistem pertahanan negara RI untuk bisa mendapatkan model pengelolaan *defense heritage* sebagai sarana program bela negara.

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Kota Surabaya

Surabaya adalah kota terbesar kedua di Indonesia yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Surabaya terletak di timur laut Pulau Jawa, Surabaya merupakan pelabuhan laut dengan Pelabuhan Tanjung Perak sebagai pelabuhan utama. Pelabuhan Tanjung Perak berfungsi sebagai hub atau pusat untuk pengiriman antar pulau di wilayah Indonesia Timur. Selain itu, bersama dengan Lamongan di barat laut, Gresik di barat, Bangkalan di timur laut, Sidoarjo di selatan, Mojokerto dan Jombang di barat daya menjadi kesatuan yang dinamakan Gerbang Kertosusila, seperti Jabodetabek di Jakarta dan sekitarnya (Cribb&Kahin, 2012, p.507).

Dewasa ini, indeks pembangunan manusia kota Surabaya 68.14 dengan angka kemiskinan 4.51% pada tahun 2019. Kota Surabaya memiliki potensi pariwisata dan mata pencaharian penduduknya antara lain berkebun, memanfaatkan hasil hutan, peternakan, dan tanaman pangan (BPS Kota Surabaya, 2021).

Surabaya juga dikenal sebagai kota pahlawan, gelar itu diberikan terkait dengan semangat heroik dan memperingati pertempuran Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Surabaya merupakan pelabuhan gerbang utama, karena Surabaya letaknya di pesisir utara Pulau Jawa sehingga membuatnya berkembang di bidang perdagangan. Surabaya kemudian menjadi pelabuhan penting abad ke-15 di bawah pemerintahan Raden Rahmat atau Sunan Ngampel (Cribb&Kahin, 2012, p.506-507).

Patung Suro dan Boyo menjadi warisan perjuangan masyarakat kota Surabaya yang terkenal karakternya selalu berani melawan, mengambil resiko, dan berani mengatakan hal yang sebenarnya. Karakter tersebut mungkin agak berbeda dengan karakter orang Jawa lainnya yang cenderung tidak mau mengatakan hal yang

sebenarnya. Selain itu, Kota Surabaya menjadisatu-satunya kota di ASEAN yang mampu melumpuhkan seorang jenderal bintang satu angkatan perang Inggris, Brigjen Mallaby di dekat Jembatan Merah, pada 30 Oktober 1945. Jembatan Merah kemudian menjadi warisan cagar budaya pertahanan bangsa Indonesia yang terkenal.

Pada masa pasca-kemerdekaan, kota Surabaya sekali lagi membuktikan diri sebagai saksi sejarah pengkhianatan negara Sekutu yang mencoba mengganggu stabilitas bangsa Indonesia yang pada waktu itu baru dua bulan merdeka. Kemenangan dalam merobek warna biru pada bendera Belanda di puncak Hotel Yamoto dan menandakan bahwa Sang Saka Bendera Merah Putih tetap berkibar di Kota Surabaya. Peristiwa ini membuat 10 November 1945 resmi menjadi Hari Pahlawan dan kemudian menjadi cikal-bakal penyebutan kota Surabaya sebagai Kota Pahlawan.

Kota Surabaya tak luput dari perkembangan zaman, globalisasi, dan industrialisasi. Saat ini Bandara Juanda menjadi bandara tersibuk kedua di Indonesia. Kota Surabaya juga menjadi kota persinggahan perjalanan bisnis menuju Pulau Madura dan perjalanan darat pariwisata ke Pulau Bali.

Kaya akan peninggalan bersejarah masa kolonial, ikon-ikon perjuangan, bangunan khas perlawanan rakyat, budaya keroncong, serta masakan khas (*culinary heritage*), yang melaju mengikuti perkembangan zaman dan industrialisasi, membuat Kota Surabaya semakin digemari oleh para wisatawan, serta menjadi bahan penelitian ilmiah yang selalu memunculkan ide-ide segar baru.

4.1.2. Kota Jakarta

Dewasa ini, indeks pembangunan manusia kota Jakarta 73 dengan angka kemiskinan 3.47% pada tahun 2019. Kota Jakarta memiliki potensi pariwisata dan mata pencaharian penduduknya antara lain ekspor-impor, industri, komunikasi, konstruksi, produk domestik, usaha jasa, dan usaha kecil dan menengah lainnya (BPS Kota Jakarta, 2021).

Jakarta pada mulanya bernama Sunda Kelapa, namun pada 22 Juni 1527 Pangeran Fatahillah menghancurkan Sunda Kelapa dan sebagai gantinya mendirikan Kota Jayakarta di area tersebut. Tanggal inilah yang kemudian ditetapkan sebagai tanggal berdirinya Kota Jakarta. Tahun 1619, Pemerintahan Belanda (VOC) di bawah kepemimpinan Jan Pieterszoon Coen menghancurkan Jayakarta dan dengan serta merta membangun kota baru yang terletak di bagian barat Sungai Ciliwung, yang

dinamakan Batavia, nama yang diambil dari Batavieren, nenek moyang bangsa Belanda. Batavia direncanakan akan dibangun mirip dengan kota-kota di Belanda, yang dibangun dalam bentuk blok, masing-masing dipisahkan oleh kanal dan dilindungi oleh dinding sebagai benteng, dan parit. Batavia ini selesai dibangun pada 1650. Batavia tua adalah tempat tinggal bangsa Eropa, sementara bangsa Cina, Jawa dan penduduk asli lainnya disingkirkan ke tempat lainnya (Dinas Pariwisata&Ekonomi Kreatif DKI Jakarta, 2020).

Rumah-rumah Batavia mencerminkan campuran gaya arsitektur Belanda dan Portugis abad ke-17 dan ke-18 serta pengaruh Asia. Beberapa rumah jelas mirip dengan rumah di Belanda, tetapi diberi cat aneka warna yang mengingatkan orang pada kawasan Iberia atau Cina. Khusus orang Cina, yang sudah terbiasa membangun dengan batu bata dan adukan semen serta menggunakan pula plesteran, mereka juga memengaruhi panorama jalan di kota dengan rumah-rumah mereka yang bergaya khas membingkai tepi jalan. Hiasan di bagian atas dinding samping serta atap yang berpenopang serta beranda kecil di depan merupakan ciri khas rumah mereka (Dinas Pariwisata&Ekonomi Kreatif DKI Jakarta, 2020).

Informasi seputar bangunan umum dan milik Kompeni seperti kompleks Kastel, gudang-gudang VOC, balai kota, gereja, balai yatim piatu dan rumah sakit – semuanya dapat diperoleh dalam Buku-buku Resolusi Pemerintah Agung, termasuk gambar-gambarnya. Salah satu contoh adalah daftar bahan bangunan yang dipergunakan untuk membangun gereja Portugis yang terletak di luar tembok kota (kini dikenal sebagai 'Gereja Sion'). Rumah pribadi dan rumah perkebunan biasanya dibangun sesudah ditandatangani kontrak yang dibuat di kantor notaris.

Yang dicatat tidak hanya tampak depan serta rancang bangun rumah. Ribuan surat wasiat dari para pemilik rumah, baik besar atau kecil, merinci barang-barang apa saja yang dimiliki penghuni rumah, mulai dari pajangan di ruang tamu yang lazim dihias dengan aneka jenis senjata, hingga busana dan baju dalam almari di kamar tidur serta aneka panci piring di dapur. Dokumen-dokumen itu juga mengungkap aneka kain tekstil dari India, Cina, Belanda dan Jawa dan juga perhiasan, artefak, lukisan, peralatan tulis, buku dan yang pasti selalu ada ialah perlengkapan makan pinang-sirih. Perabotan juga dicatat dalam dokumen-dokumen itu, mulai dari tempat tidur rotan hingga kursi dan meja dari kayu eboni. Sejatinya, budaya material Asia-Eropa semuanya tercatat rapi dan merupakan topik yang sarat makna bagi mereka

yang mengkhususkan diri di bidang ini. Budaya material Batavia yang kaya dan sangat beragam itu merupakan bidang studi penting, mengingat banyak pedagang dan orang perorangan dari seluruh pelosok Kepulauan Indonesia datang dan melakukan bisnis dan membuka toko di Batavia. Banyak yang kemudian meniru mode mutahir dari India, Cina dan Eropa (ANRI, 2020).

4.2. Hasil Penelitian

4.2.1 Pengelolaan Cagar Budaya Bernilai Pertahanan (*Defense Heritage*) Dewasa Ini

Pengelolaan cagar budaya bernilai pertahanan (*defense heritage*) secara nasional belum diatur dan masih mengacu pada pengelolaan cagar budaya berdasarkan UU No.11 Tahun 2010 tentang cagar budaya. Sesuai dengan hal tersebut, pemerintah kota dan provinsi memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan cagar budaya; mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan cagar budaya; mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya cagar budaya; menyelenggarakan penelitian dan pengembangan cagar budaya; menyediakan informasi cagar budaya untuk masyarakat; menyelenggarakan promosi cagar budaya; memfasilitasi setiap orang dalam melaksanakan pemanfaatan dan promosi cagar budaya; menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat untuk benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang telah dinyatakan sebagai cagar budaya serta memberikan dukungan terhadap daerah yang mengalami bencana; melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelestarian warisan budaya; dan mengalokasikan dana bagi kepentingan pelestarian cagar budaya.

4.2.1.1 Pengelolaan Cagar Budaya Bernilai Pertahanan (*Defense Heritage*) Dewasa Ini di Kota Surabaya

Pengelolaan cagar budaya bernilai pertahanan (*defense heritage*) kota Surabaya belum diatur dan masih mengacu pada pengelolaan cagar budaya berdasarkan UU No.11 Tahun 2010 tentang cagar budaya dan berdasarkan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya. Pelestarian cagar budaya diawali dengan proses pendaftaran, sebelum ditetapkan menjadi cagar budaya.

Kota Surabaya merupakan salah satu kota yang memiliki banyak bangunan cagar budaya, kira-kira ada jumlahnya 220 buah (Kemdikbud, 2020). Meskipun di antaranya ada sudah hilang, sebagian besar lainnya masih tetap lestari hingga sekarang ini. Surabaya amat digemari oleh pecinta kuliner, wisata sejarah, dan wisata bangunan cagar budaya. Berikut ini akan disajikan Daftar dan katagori Bangunan Cagar Budaya Kota Surabaya, termasuk di dalamnya bangunan bersejarah yang telah beraling fungsi menjadi fasilitas publik, seperti kantor, sekolah, dan RS:

a. Kategori Gedung (Kantor) Pemerintah & swasta:

1) Gedung (Kantor) Pemerintah atau BUMN:

- Balai Kota Surabaya
- Gedung PT Pabrik Gula Rajawali Nusantara
- Gedung Grahadi
- Gedung Nasional Indonesia (GNI)
- Kantor Gubernur Jatim
- Gedung Suara Asia
- Gedung Pertamina
- Gedung Polwiltabes Surabaya
- Gedung Bank Internasional Indonesia
- Kantor Perseroaan Terbatas Perkebunan XXIII
- Gedung PTPN XI
- Gedung Internatio
- Gedung Telkom Garuda
- Gedung Bima Bosma Indra
- Gedung Kesyahbandaran Tanjung Perak Surabaya

2) Gedung Kantor atau Swasta:

- House of Sampoerna
- Gedung BNI 46 dan Aduransi
- Bank Hagakita
- Gedung Wismilak
- Kantor Notaris
- Menara berlogo Surabaya & Batavia
- PT Bentoel
- Koperasi Bank Pasar Niaga
- PT Bima Alfa

- Gedung Jawa Pos
- Kantor Suara Indonesia
- Gedung KADIN

b. Kategori Monumen:

- 1) Tugu Pahlawan
- 2) Monumen Kapal selam
- 3) Monumen Jalesveva Jayamahe
- 4) Arca Joko Dolog
- 5) Bambu runcing
- 6) Monumen Sudirman
- 7) Patung Suroboyo
- 8) Patung Karapan Sapi
- 9) Patung Airlangga
- 10) Monumen Pers Perjuangan Surabaya

c. Kategori Bangunan Publik :

1) Hotel:

- Hotel Olympic
- Hotel Majapahit
- Hotel Ibis
- Hotel Kemadjoan

2) Jembatan:

- Jembatan Petekan
- Jembatan Merah
- Crane Putar
- Gardu Listrik

3) Rumah Sakit

- RS. Dr. Soetomo
- Rumah Sakit Umum Simpang (C.S.Z)
- RS. Al Irsyad
- RS. Mardi Santoso
- RS. RKZ Paolo
- RS. Darmo
- RS. Williambooth
- Gedung Mess Angkatan Darat (Poliklinik Kesehatan)

4) Panti Asuhan

- Panti Asuhan Undaan
- Gedung Don Bosco
- Gedung Panti Asuhan di Pasar Kembang (Sudah dibongkar)

5) Tempat Olah Raga

- Lapangan Tambaksari
- lapangan Perkumpulan Olah Raga Embong Sawo (Pores) Jl. Embong sawo
- Lapangan Golf A.Yani
- Gelora Pancasila
- Kolam Renang Brantas
- Ged.Perkumpulan OR. Embong Sawo

6) Penjara

- Penjara Kalisosok
- Penjara Koblen

7) Gedung Kesenian

- Kraton Kanoman Suroboyo (Taman Budaya Jawa Timur)
- Balai Sahabat
- Balai Pemuda Surabaya
- Gedung Garuda

8) Stasiun

- Stasiun Wonokromo
- Stasiun Semut
- Stasiun Turi
- Stasiun Gubeng
- Stasiun Sidotopo
- Rumah Sinyal Stasiun Gubeng (hilang)
- Viaduct KA.Ngaglik
- Viaduct Gubeng
- Viaduct Tugu Pahlawan
- Viaduct Pengampon

9) Bangunan Umum

- Kebun Binatang Surabaya
- Kantor Korps Cacat Veteran RI

- Bioskop INDRA
- Pintu Air Jagir
- Museum 10 November
- Gedung Cerutu
- PN. GAS
- Gedung pojok Jl.Tunjungan
- Toko Ice Cream Zangradi
- Gedung SIOLA
- Kantor Pos Kebon Rojo
- Pasar Wonokromo (sdh dibongkar)
- Pasar Kayoon
- Bank Mandiri
- Gedung Pengadilan Negeri Surabaya
- JMP Embong wungu
- Aniem Embong wungu
- Soverdi Dr.Soetomo

d. Kategori Rumah Ibadah :

- 1) Masjid Ampel
- 2) Masjid Rahmat
- 3) Masjid Kemayoran
- 4) Gereja Katolik kelahiran Santa Perawan Maria
- 5) Gereja Katholik Jln. Polisi Istimewa
- 6) Gereja Bubutan
- 7) Gereja Kepanjen
- 8) Gereja Kristus Tuhan
- 9) Klenteng Hok An Kiong (Ma Co Po)
- 10)Klenteng Hok Tek Hian
- 11)Klenteng Boen Bio
- 12)Rumah Abu Keluarga Tjoa
- 13)Rumah Abu Keluarga The
- 14)Rumah Abu Keluarga Han

e. Kategori Gedung Sekolah / Pendidikan:

- 1) Ged. SDN Ketabang
- 2) SD. IMKA Jl.Cendana

- 3) SMPN 3 dan 4 Surabaya
- 4) Gedung HBS (Komplek SMU)
- 5) Sekolah SMA St Maria Jl. Raya Darmo
- 6) Ged SMA St. Louis I Jl. Polisi Istimewa
- 7) Eks Gedung sekolah Taman Siswa daerah Genteng Kali
- 8) Sekolah Al Irsyad
- 9) Gedung Fak.kedokteran UNAIR Jl. Prof. Moestopo / jl. Nias
- 10) Gedung ITS di Jln Cokroaminoto
- 11) Eks Gedung sekolah Taman Siswa daerah Genteng Kali

f. Kategori Perumahan dan rumah”pribadi” :

- 1) Gedung Setan
- 2) Rumah Wafat WR.Supratman
- 3) Rumah Tinggal Keluarga Oesman Nabhan
- 4) Rumah Tinggal
- 5) Rumah HOS.Cokroaminoto
- 6) Rumah kelahiran Bung Karno (kawasan makam peneleh)
- 7) Situs Cagar Budaya Perumahan Darmo
- 8) Rumah” pribadi kawasan Jl.Polisi Istimewa (100 rumah)
- 9) Rumah” pribadi kawasan Jl. Trunojoyo (36 rumah)
- 10)Rumah” pribadi kawasan Jl.Anwari (30 rumah)
- 11)Rumah” pribadi kawasan Jl.Diponegoro (108 rumah)
- 12)Rumah pribadi di Ujung Jl. Imam Bonjol – Bintoro
- 13)Rumah pribadi di sebelah bioskop Darmo Jl Pandegiling
- 14)Rumah pribadi Jl.Kartini
- 15)Rumah pribadi kawasan Tegalsari
- 16)Rumah antik dg model susun Jl.Nias

g. Kategori Toko atau Pertokoan:

- 1) Toko NAM (rata dg tanah sejak 2002)
- 2) Toko Sarinah (jl.Tunjungan bag.dalam – hilang)
- 3) Kawasan pertokoan Jln Urip Sumohardjo deretan Hotel Olympic.
- 4) Kawasan pertokoan Jln Tunjungan
- 5) Apotek Simpang
- 6) Apotek Darmo (perempatan raya Darmo dan Jln Pandegiling)
- 7) Toko barang antik Pinguin

- 8) Toko Louvre Tunjungan depan Siola
 - 9) Toko Pilihan Jl.Tunjungan
 - 10) Toko Lalwani berarsitektur art deco jl.Tunjungan
- h. Kategori Kampung – Kawasan:
- 1) Kampung Plampitan
 - 2) Kawasan Pasar Pabean
 - 3) Kawasan permukiman warga Tionghoa di Kembang Jepun
 - 4) Kawasan Kraton – Pasar Besar – Kramat Gantung
 - 5) Kawasan permukiman orang” Eropa di Jl.Rajawali dan Jl.Darmo
 - 6) Kawasan permukiman Arab sekitar Masjid Ampel
 - 7) Pemakaman Peneleh
 - 8) Kampung NU Bubutan
- i. Kategori Makam:
- 1) Makam Sunan Bungkul
 - 2) Makam Tembaan
 - 3) Makam WR. Supratman
 - 4) Pemakaman Kembang Kuning
 - 5) Boto Putih

Pada tanggal 3-5 September 2019, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) melalui Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, mengadakan Kampanye Pelestarian Cagar Budaya di Surabaya. Surabaya dipilih sebagai tuan rumah kampanye Pelestarian Cagar Budaya karena merupakan kota yang memiliki cukup banyak Cagar Budaya Nasional dan banyak objek yang diduga cagar budaya. Semenjak bulan Agustus 2019 kota Surabaya memiliki 181 objek cagar budaya yang sudah didaftarkan ke laman registrasi nasional cagarbudaya.kemdikbud.go.id dan 101 objek sudah terverifikasi. Sementara itu ada 76 objek penetapan dari SK Wali Kota Surabaya (Kemdikbud, 2019).

Berdasarkan data dari Disbudpar Kota Surabaya (2018), terdapat 255 cagar budaya dan 22 lingkungan/Kawasan cagar budaya yang ditetapkan langsung oleh Pemkot. Masing-masing kepemilikan asetnya beragam, ada yang dimiliki oleh Pemkot Surabaya, pribadi, dan swasta. Namun setiap kali ada urusan pemugaran atau penambahan/pengurangan bangunan, setiap pemilik wajib melapor kepada

Disbudpar Kota Surabaya. Informan menjelaskan bahwa sesuai dengan UU Cagar Budaya, maka bangunan-bangunan bersejarah di kota Surabaya memiliki klasifikasi tersendiri yang memiliki dampak dalam hal perawatannya (Disbudpar Kota Surabaya, 2018).

Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak semua registrasi bangunan bersejarah disetujui. Berdasarkan data pada laman Kemdikbud, jumlah bangunan cagar budaya yang ditetapkan oleh Pemkot Surabaya, sejak tahun 1996 hingga 2015 sebanyak 273 bangunan. Dari seluruh cagar budaya yang tersisa, ada 38 di antaranya dimiliki oleh yayasan, 27 lainnya dimiliki oleh BUMN, 67 bangunan milik swasta, 64 lainnya milik perorangan, dan 74 lainnya adalah milik pemerintah. Artinya adalah terdapat kurang lebih 18 cagar budaya yang belum ditetapkan sebagai cagar budaya per tahun 2020.

Berdasarkan cagar budaya yang telah disebutkan, kajian ini melakukan observasi dan menemukan bahwa terdapat objek-objek yang diduga *defense heritage* di kota Surabaya, antara lain Gedung Siola (Museum Surabaya), Hotel Yamato (Hotel Majapahit), Jalan Tunjungan, Monumen Tugu Pahlawan (Museum 10 November), Jembatan Merah, dan Benteng Cowek. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Dinas Budaya dan Pariwisata (2018) mengatakan bahwa tidak mengetahui bahwa objek-objek tersebut termasuk ke dalam konsep *defense heritage* dan hanya mengemukakan bahwa setiap 10 November punya rute yang dilalui untuk Wisata Kepahlawanan bagi turis dan anak-anak sekolah, antara lain Jembatan Merah, Hotel Oranje atau Yamato, Jalan Tunjungan, dan Tugu Pahlawan.

Berdasarkan observasi dan wawancara mendalam, setiap turis memiliki preferensi sendiri untuk menikmati bangunan cagar budaya atau objek *defense heritage*, misalnya dengan wisata pribadi, bersama keluarga, membentuk, atau bergabung dengan beberapa komunitas warisan budaya seperti Wisata Heritage dan 10 November Heritage. Beberapa komunitas sejarah telah mendaftarkan Benteng Cowek sebagai cagar budaya kota Surabaya yang masih dikaji hingga kini, sebab penetapan cagar budaya harus memiliki kaidah ilmiah dan pertanggungjawaban akademik seperti misalnya dari Tim Ahli Cagar Budaya kota Surabaya (Wisnu, 2018). Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) kota Surabaya memiliki fungsi untuk mendata, menganalisis, memberi makna, dan mengusulkan bangunan-bangunan bersejarah yang termasuk ke dalam cagar budaya.

Komunitas sejarah juga memiliki program mengunjungi Rumah bersejarah di jalan Peneleh VII Surabaya ini menjadi salah satu cagar budaya nasional dengan SK Menteri No 189/M/2017. Rumah pahlawan nasional H.O.S. Tjokroaminoto menjadi museum yang bisa dikunjungi secara gratis. Disitu terdapat peninggalan Tjokroaminoto yang masih ada dan terdapat pula *tour guide* profesional. Seperti penjelasan dari Disbudpar, ahli sejarah Unesa, dan komunitas sejarah, orang Surabaya senang mengetahui lebih banyak tentang sejarah Kota Surabaya sebagai turis dan swafoto di depan beberapa gedung sejarah terkenal. Selain itu, dengan adanya *barcode* informasi pada Museum Tugu Pahlawan, Pemkot Surabaya telah memperkenalkan sejarah dengan cara yang lebih menyenangkan bagi generasi milenial.

Misalnya pada Monumen Tugu Pahlawan (Museum 10 November), pemerintah kota, dibantu oleh ahli sejarah dan komunitas sejarah telah melakukan digitalisasi setiap lukisan, benda, dan patung, jadi jika pengunjung membawa ponsel mereka yang memiliki aplikasi museum, mereka dapat melakukan pemindaian, kemudian informasi tentang barang bisa dilihat langsung secara *offline*. Informasi ini juga menjadi referensi yang valid untuk para akademisi dan peneliti. Di Museum 10 November juga terdapat replica kondisi RS Simpang yang menggambarkan para korban pertempuran 10 November, ditandu dengan bersimbah darah. Sayangnya RS Simpang di Jalan Mawar No.10-12 sebagai bangunan bersejarah telah musnah dan beralih fungsi menjadi pusat perbelanjaan. Pada tahun 2017 (Wisnu, 2018), TACB kota Surabaya pernah mengusulkan revitalisasi bangunan-bangunan yang menjadi napak tilas Bung Tomo, namun hingga kajian ini melakukan observasi ke situs yang dimaksud, hal tersebut belum terwujud.

Disbudpar kota Surabaya mengatakan dana pelestarian cagar budaya di Surabaya sekitar Rp 900 juta per tahun (Disbudpar Kota Surabaya, 2016), dengan presentase alokasi dana untuk penjaga taman budaya kurang lebih 25% dari total yang ada, atau sekitar Rp225 juta per tahun dan setiap bangunan cagar budaya yang telah ditetapkan akan mendapatkan insentif pajak sebesar 50 persen yang bisa dimanfaatkan oleh pemilik aset untuk merawat bangunan bersejarah tersebut. Namun kajian ini mendapatkan hasil observasi lapangan bahwa beberapa benteng dan peninggalan sejarah seolah-olah ditinggalkan saja, kosong tandus, tanpa perhatian dari

Pemkot, sehingga anak-anak muda pun tidak mengenal bahwa di daerah tersebut pernah terjadi pertempuran yang bersejarah bagi Indonesia. Sebagai contoh adalah Benteng Kedung Cowek yang baru menjadi terkenal ketika ada komunitas sejarah yang menghidupkan narasi sejarah dibalik benteng melalui rekonstruksi sejarah.

Demikian hasil penelitian di kota Surabaya. Pengelolaan cagar budaya bernilai pertahanan (*defense heritage*) kota Surabaya belum diatur dan masih mengacu pada pengelolaan cagar budaya berdasarkan UU No.11 Tahun 2010 tentang cagar budaya dan berdasarkan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya.

4.2.1.2 Pengelolaan Cagar Budaya Bernilai Pertahanan (*Defense Heritage*) Dewasa ini di Kota Jakarta

Sama persis seperti kota Surabaya, pengelolaan cagar budaya bernilai pertahanan (*defense heritage*) kota Jakarta belum diatur dan masih mengacu pada pengelolaan cagar budaya berdasarkan UU No.11 Tahun 2010 tentang cagar budaya dan berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Nomor 326 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Pusat Konservasi Cagar Budaya.

Kajian di Jakarta mendapatkan data primer dari informan yang berasal dari Kedepatian Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kebudayaan (IPSK) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, Direktorat Bela Negara Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia; Pusat Sejarah Mabes TNI, UNESCO Jakarta, Dinas Pariwisata Provinsi DKI Jakarta; Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, dan Kepala Museum Fatahillah Jakarta. Berdasarkan wawancara mendalam dengan beberapa informan di Provinsi DKI Jakarta, kajian ini mendapatkan hasil penelitian sebagai berikut:

a. Cagar Budaya yang dilindungi negara yang ada di DKI Jakarta:

- 1) Bangunan kompleks Istana Presiden;
- 2) Museum Nasional;
- 3) Stasiun Jakarta Kota;
- 4) Masjid Istiqlal;
- 5) Gedung Sinematek Haji Usmar Ismail;
- 6) Galeri Nasional Indonesia;

- 7) Gedung Kebangkitan Nasional;
 - 8) Gedung Kesenian Jakarta.
- b. Aset Cagar Budaya yang dikelola Pemprov DKI Jakarta:
- Terkait Benda Cagar Budaya yang berada di Kawasan Kota Tua belum ada penetapan misalkan seperti koleksi museum. Saat ini yang telah menjadi aset Pemda DKI berupa Bangunan Cagar Budaya, seperti museum-museum di Kawasan Kota Tua (Museum Sejarah Jakarta, Museum Wayang, Museum Seni Rupa dan Keramik dan Museum Bahari). Pemprov DKI Jakarta mempunyai Tim Ahli Cagar Budaya dan Tim Sidang Pemugaran yang bertugas memberikan nasihat dan rekomendasi dalam pelestarian Cagar Budaya. Sekretariat tim tersebut berada di Pusat Konservasi Cagar Budaya, Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Tentunya dalam melestarikan Cagar Budaya di Kawasan Kota Tua, para tenaga ahli profesional tersebut ikut berperan dalam perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya di Kawasan Kota Tua (Dinas Budaya DKI Jakarta, 2020).
- c. Berdasarkan informan Dirjen Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, Kemdikbud secara nasional belum membedakan dan belum memisahkan konsep *defense heritage* dari *cultural heritage*. Oleh sebab itu, didapatkan data jenis dan Kriteria cagar budaya yang secara umum dapat memperkaya khazanah kategorisasi *defense heritage* antara lain sebagai berikut:
- 1) Benda Cagar Budaya:
 - (a) Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
 - (b) Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
 - (c) Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan;
 - (d) Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa;
 - (e) Berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia;
 - (f) Bersifat bergerak atau tidak bergerak;
 - (g) Merupakan kesatuan atau kelompok.
 - 2) Bangunan Cagar Budaya:
 - (a) Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
 - (b) Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;

- (c) Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan;
- (d) Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa;
- (e) Berunsur tunggal atau banyak;
- (f) Berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam.

3) Struktur Cagar Budaya:

- (a) Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- (b) Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- (c) Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan;
- (d) Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa;
- (e) Berunsur tunggal atau banyak.

4) Situs Cagar Budaya:

- (a) Mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya;
- (b) Menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu;

5) Kawasan Cagar Budaya:

- (a) Mengandung 2 (dua) situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan;
- (b) Berupa lanskap budaya hasil bentukan manusia berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
- (c) Memiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang pada masa lalu berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
- (d) Memperlihatkan pengaruh manusia masa lalu pada proses pemanfaatan ruang berskala luas;
- (e) Memperlihatkan bukti pembentukan lanskap budaya;
- (f) Memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia atau endapan fosil.

d. Fungsi cagar budaya antara lain:

- 1) Melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia;
- 2) Meningkatkan harkat dan martabat bangsa;
- 3) Memperkuat kepribadian bangsa;
- 4) Meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- 5) Mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat internasional.

Terdapat 136 bangunan cagar budaya berada di DKI Jakarta. Bangunan cagar budaya ini sudah memiliki payung hukum berupa Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 475 Tahun 1993 tentang Penetapan Bangunan-bangunan Bersejarah di DKI Jakarta sebagai Benda Cagar Budaya. Kepala Unit Pengelola (UP) Pusat Konservasi Cagar Budaya Disparbud DKI, bahwa terdapat terdapat 67 bangunan cagar budaya di Jakarta Pusat, 35 bangunan bersejarah di Jakarta Barat, dan 16 bangunan bersejarah di Jakarta Utara. Kemudian terdapat 7 bangunan bersejarah di Jakarta Selatan, 7 bangunan bersejarah di Jakarta Timur, dan 4 cagar budaya di Kepulauan Seribu.

Dinas Kebudayaan dan Permuseuman mencatat bangunan cagar budaya di DKI Jakarta yang terkenal dan paling dikunjungi wisatawan (sebelum Pandemi Covid 19) antara lain adalah Museum Sumpah Pemuda, Museum Kebangkitan Nasional, Museum Bank Indonesia, Tugu Monas, Museum Fatahillah dan kawasan Kota Tua Jakarta, bangunan di Jalan Pasar Baru, Masjid Istiqlal, dan Pulau Onrust (Kemdikbud, 2020).

Pada tahun 2019, Pemprov DKI melakukan pendataan ulang cagar budaya di DKI Jakarta, sehingga didapatkan DKI Jakarta memiliki 168 unit cagar budaya yang persebarannya paling banyak di Jakarta Pusat, yakni sebanyak 95 unit. Sementara itu, cagar budaya di Jakarta Selatan dan Kepulauan Seribu berjumlah paling sedikit, masing-masing sebanyak 6 (enam) unit dan 5 (lima) unit (Kata Data, 2020). Deskripsi tiap bangunan dapat diunduh pada laman <https://data.jakarta.go.id/>.

Penghitungan ulang tersebut menurut ahli cagar budaya sesuai dengan konsep otonomi daerah yang memberikan peluang kepada daerah untuk melakukan inovasi dan terobosan dalam menjawab tantangan yang dihadapinya, misalnya pengelolaan dan pelestarian cagar budaya. Untuk melakukan pelestarian terhadap cagar budaya maka perlu adanya perlindungan terhadap cagar budaya, sebab menurut UU No.11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, perlindungan cagar budaya terdiri dari proses kajian, penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran yang tidak bisa dipisahkan, serta perlu dipikirkan aspek anggaran dan pendanaan (Rosyadi, dkk., 2009, p.831-833). Sementara itu menurut pakar tata kota, Johan Silas (2018), sebaiknya Pemprov DKI setelah melakukan pendataan ulang, juga perlu melakukan audit bangunan untuk semua bangunan yang berusia lebih dari 50 tahun.

Menurut Rahardjo (2013, p.4), setiap kawasan cagar budaya memiliki karakteristik tersendiri yang membutuhkan pengelolaan yang berbeda pula.

Berdasarkan dari narasi di sosial media, pengelolaan cagar budaya di DKI terkadang penuh konflik, misalnya konflik rencana revitalisasi kawasan Monas. Persoalan kawasan Monas tercantum dalam Keputusan Gubernur nomor 475 tahun 1993 yang menjelaskan tentang Penetapan Bangunan-bangunan bersejarah di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Sebagai Cagar Budaya. Kajian ini melakukan verifikasi data dengan mewawancarai Dinas Pariwisata dan Investasi DKI Jakarta, bahwa yang termasuk ke dalam bagian cagar budaya Monas hanya terdapat pada bagian Tugu-nya, bukan kawasan Monas secara keseluruhan.

Konflik revitalisasi cagar budaya juga pernah terjadi di Kawasan Kota Tua. Kepala Museum Fatahillah mengatakan bahwa kawasan kota Tua dimiliki oleh 6 (enam) kepemilikan aset yang terkadang memiliki kepentingan yang berbeda-beda dan pemerintah pusat belum mengatur revitalisasi untuk bangunan cagar budaya. Berdasarkan wawancara mendalam dengan Dinas Pariwisata&Ekonomi Kreatif DKI Jakarta, Pemprov DKI dewasa ini belum ada wacana untuk membuat peraturan revitalisasi bangunan cagar budaya, tetapi lebih banyak berfokus kepada pengembangan pariwisata dari cagar budaya, misalnya rencana digitalisasi koleksi-koleksi museum yang ada dan membuat museum lebih interaktif bagi anak-anak sekolah.

Berdasarkan cagar budaya, maupun bangunan bersejarah yang ada di Jakarta, kajian ini menduga terdapat objek-objek *defense heritage*, yakni antara lain Benteng Jayakarta (Benteng Jakarta), kawasan kota Tua Jakarta terutama Museum Fatahillah, Museum Kebangkitan Nasional, Museum Sumpah Pemuda, Museum Joang 45, dan Museum Perumusan Naskah Proklamasi (Munasprok). Urutan dibuat urut berdasarkan periodisasi sejarah.

Berdasarkan tanggapan dari para informan yang diwawancarai kajian ini tentang adanya konsep *defense heritage*, semua informan menyambut baik bahwa Kementerian Pertahanan dapat punya peran lebih dalam hal pengelolaan benda-benda cagar budaya bernilai pertahanan, baik secara nasional, maupun di Pemprov DKI secara khusus, sebab pengelolaan cagar budaya merupakan upaya terpadu dalam rangka perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan yang pertama-tama harus membutuhkan kajian ilmiah yang mendalam.

Demikian hasil penelitian di Jakarta. Pengelolaan cagar budaya bernilai pertahanan (*defense heritage*) kota Jakarta belum diatur dan masih mengacu pada pengelolaan cagar budaya berdasarkan UU No.11 Tahun 2010 tentang cagar budaya

dan berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Nomor 326 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Pusat Konservasi Cagar Budaya.

4.2.2 Model Pengelolaan Cagar Budaya Bernilai Pertahanan (*Defense Heritage*) Sebagai Sarana Program Bela Negara

Pengelolaan cagar budaya bernilai pertahanan (*defense heritage*) sebagai sarana program bela negara belum ada. Indonesia hanya memiliki pengelolaan cagar budaya berdasarkan UU No.11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Program bela negara Kemhan yang sedang dijalankan belum memiliki materi bahan ajar tentang cagar budaya dan cagar budaya bernilai pertahanan (*defense heritage*).

4.2.2.1 Model Pengelolaan Cagar Budaya Bernilai Pertahanan (*Defense Heritage*) Sebagai Sarana Program Bela Negara di Kota Surabaya

Kota Surabaya belum memiliki model pengelolaan cagar budaya bernilai pertahanan (*defense heritage*) sebagai sarana program bela negara. Program bela negara di kota Surabaya mengacu kepada program bela negara Kementerian Pertahanan.

Implementasi program bela negara di kota Surabaya telah ada sejak tahun 2015. Dalam rangka memperingati Hari Santri 22 Oktober dan Hari Pahlawan 10 Oktober, Mabes TNI AL bersama Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil) melakukan pemberangkatan ribuan santri berlayar ke Surabaya. Pemberangkatan ini disebut Pelayaran Santri Bela Negara.

Pada tahun 2016, terdapat Kegiatan Pembentukan Kader Bela Negara di Provinsi Jawa Timur yang dibuka oleh Direktur Bela Negara Ditjen Pothan Kemhan, Laksma TNI M. Faisal. Pada tahun 2016 itu pula, Kemhan memiliki wacana untuk menjadikan Provinsi Jawa Timur sebagai provinsi percontohan program bela negara. Sejarawan publik kota Surabaya, Ady Setyawan, mengatakan program bela negara Kemhan belum memiliki materi bahan ajar tentang sejarah dan belum mengandung narasi cagar budaya (Setyawan, 2020), padahal kota Surabaya terkenal sebagai kota pahlawan yang memiliki bangunan dan situs bersejarah perjuangan bangsa.

Dosen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Negeri Surabaya, Wisnu Nugroho, mengatakan program bela negara yang diimplementasikan di Surabaya sebaiknya mengikuti karakteristik orang Surabaya yang suka mengenal sejarah kotanya, senang dengan cerita-cerita kepahlawanan, dan bangga berswafoto di

bangunan atau *landmark* bersejarah (2018), namun program bela negara yang berlangsung di Surabaya masih terlihat militeristik.

Sebagai contoh pada tahun 2019, ratusan milenial Banyuwangi menjalani Latihan Bela Negara yang diadakan oleh Pangkalan TNI AL (Lanal) Banyuwangi. Latihan Bela Negara ini secara spesial diadakan di KRI Surabaya 591 yang sedang sandar di Pelabuhan Tanjungwangi Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro. Peserta yang turut berpartisipasi sebanyak lebih dari 500 orang yang terdiri dari sektor LSM, organisasi kepemudaan, Pramuka Saka Bahari, santri pesantren, pelajar, nelayan, serta mitra kemaritiman mengikuti acara yang digelar dua hari. Latihan Bela Negara diadakan di dua tempat. Yakni di Markas Lanal Banyuwangi serta KRI Surabaya 591. Pembukaannya digelar di atas KRI Surabaya yang merupakan armada pengangkut amfibi (Detik, 2020).

Kajian ini mendapatkan data dari hasil wawancara dengan pengurus Monumen Tugu Pahlawan (2018) bahwa Pemerintah Kota Surabaya sudah menyiapkan sekolah kebangsaan untuk menumbuhkan nilai-nilai sejarah perlawanan kota Surabaya bagi para murid. Disbudpar dan komunitas sejarah juga mengatakan bahwa sekolah kebangsaan menjadi penting dalam menumbuhkan rasa cinta tanah air para murid kepada pahlawan yang telah berjuang hingga titik darah penghabisan, serta sejarah bangsa yang dapat dilihat dari bangunan bersejarah di sepanjang sudut kota Surabaya. Untuk menyiapkan hal tersebut, Tim Disbudpar mengatakan bahwa setiap Kamis rutin melakukan rapat koordinasi dan bertemu dengan ahli sejarah, serta lintas komunitas untuk mengevaluasi program-program seni budaya yang ada. Namun hingga kajian ini ditulis pada 2020, sekolah kebangsaan yang dimaksud belum ada, mungkin akibat Pandemi Covid-19.

Berdasarkan wawancara mendalam dengan Disbudpar pemerintah kota Surabaya, kota Surabaya telah melakukan program-program *defense heritage* tanpa mengetahui adanya ide *defense heritage* itu sendiri. Disbudpar pemerintah kota Surabaya baru mengenal adanya *defense heritage* dari kajian ini.

4.2.2.2 Model Pengelolaan Cagar Budaya Bernilai Pertahanan (*Defense Heritage*) Sebagai Sarana Program Bela Negara di Kota Jakarta

Sama persis dengan kota Surabaya, kota Jakarta belum memiliki model pengelolaan cagar budaya bernilai pertahanan (*defense heritage*) sebagai sarana

program bela negara. Program bela negara di kota Jakarta mengacu kepada program bela negara Kementerian Pertahanan.

Kota Jakarta menjadi kota inisiator adanya kader bela negara sejak tahun 2014. Upacara peringatan Hari Bela Negara di Tingkat Pusat diselenggarakan pada tanggal 19 Desember 2014 bertempat di Lapangan Silang Monas Jakarta. Dewasa ini Jakarta menjadi pusat Forum Bela Negara (FBN) DKI Jakarta dengan jumlah total 137.809 kader bela negara di kota Jakarta (dari 420.904 kader bela negara di Jawa Barat dan 1.588.777 kader bela negara di seluruh Indonesia) (Kemhan, 2020).

FBN DKI Jakarta memiliki visi untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong, dengan Misi Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan; Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan negara hukum; Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati-diri sebagai negara maritim; Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera; dan Mewujudkan bangsa yang berdaya saing (Kemhan, 2020).

Kementerian Pertahanan dewasa ini tengah menjajaki kerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud, 2020) agar para siswa dan mahasiswa bisa ikut Program Bela Negara, terutama para siswa dan mahasiswa di sekolah-sekolah dan universitas-universitas di Jakarta. Nantinya mahasiswa bisa mengikuti pendidikan militer yang nilainya bisa dimasukkan ke dalam SKS yang diambil (Kompas, 2020). Menurut Direktur Bela Negara Kemhan (2020), narasi tentang *defense heritage* nantinya bisa menjadi salah satu materi bahan ajar program bela negara, terutama dalam hal wawasan nusantara dan pelajaran sejarah.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Pengelolaan Cagar Budaya Bernilai Pertahanan (*Defense Heritage*)

Dewasa Ini

Pengelolaan cagar budaya bernilai pertahanan (*defense heritage*) secara nasional belum diatur dan masih mengacu pada pengelolaan cagar budaya berdasarkan UU No.11 Tahun 2010 tentang cagar budaya. Sesuai dengan hal tersebut, maka analisis pada Sub Bab ini akan mengubah cara pandang dan kebijakan pemerintah kota dan provinsi yang memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan

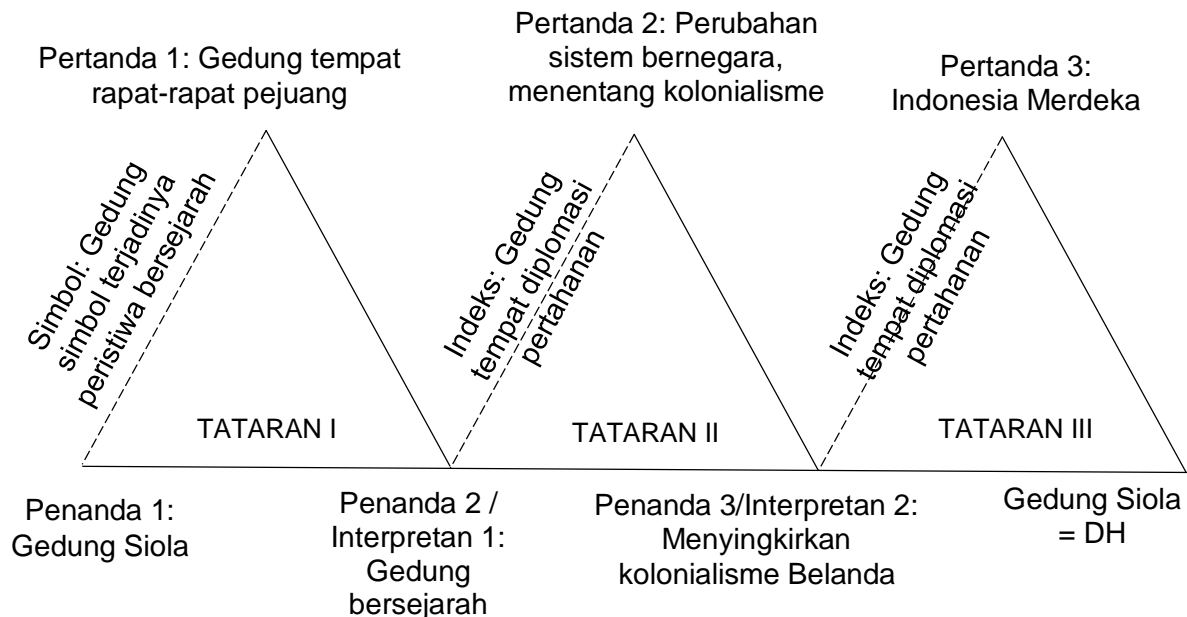
pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya; mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan cagar budaya; mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya cagar budaya; menyelenggarakan penelitian dan pengembangan cagar budaya; menyediakan informasi cagar budaya untuk masyarakat; menyelenggarakan promosi cagar budaya; memfasilitasi setiap orang dalam melaksanakan pemanfaatan dan promosi cagar budaya; menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat untuk benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang telah dinyatakan sebagai cagar budaya serta memberikan dukungan terhadap daerah yang mengalami bencana; melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelestarian warisan budaya; dan mengalokasikan dana bagi kepentingan pelestarian cagar budaya.

4.3.1.1 Pengelolaan Cagar Budaya Bernilai Pertahanan (*Defense Heritage*) Dewasa ini di Kota Surabaya

Pengelolaan cagar budaya bernilai pertahanan (*defense heritage*) di kota Surabaya dewasa ini belum ada. Pengelolaan cagar budaya bernilai pertahanan (*defense heritage*) kota Surabaya belum diatur dan masih mengacu pada pengelolaan cagar budaya berdasarkan UU No.11 Tahun 2010 tentang cagar budaya dan berdasarkan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya.

Berikut ini, kajian mengemukakan objek-objek *defense heritage* yang perlu dilestarikan, dipugar, atau dioptimalkan pemanfaatannya di kota Surabaya, apabila nanti sudah ada model pengelolaan *defense heritage*.

a. Gedung Siola (Museum Surabaya)



Gambar 4.1 Analisis Makna *Defense Heritage* Gedung Siola

Sumber: Olahan peneliti (2021)

Gedung Siola yang bagian depannya merupakan Museum Surabaya, adalah milik Pemerintah Kota Surabaya. Pemanfaatan gedung, perawatan koleksi, dan digitalisasi diatur di dalam Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya.

Pada Tataran I, Penanda 1 berupa Gedung bernama Gedung Siola. Bentuk bangunan Gedung Siola berupa gedung yang terlihat kuno, kokoh, dan besar (terdapat Museum Surabaya), sehingga muncul penalaran pertama adalah asumsi yang diterima dan disepakati bahwa Gedung Siola adalah gedung bersejarah. Untuk mendalami Gedung Siola ini maka dilakukan observasi penelitian, studi pustaka, dan wawancara mendalam dengan ahli sejarah dan masyarakat sekitar. Maka kajian ini mendapatkan data tentang Gedung Siola; dibangun oleh siapa (orang Inggris Robert Laidlaw tahun 1877), periode kapan (kolonialisme Belanda), dan berfungsi sebagai apa (toko serba ada, kemudian dibiarkan kosong sebelum diambil alih Jepang). Gedung Siola merupakan markas utama (*basecamp*) para pejuang Surabaya untuk melakukan rapat-rapat rahasia menentang kolonialisme Belanda. Hal ini adalah Pertanda 1.

Pendalaman Penanda 2 atau Interpretan 1 pada Tataran II adalah Gedung Siola sebagai gedung bersejarah ini merupakan tempat rapat-rapat pejuang diplomasi pertahanan sebab kondisi yang terjadi pada waktu itu adalah adanya perubahan

sistem bernegara yakni menentang kolonialisme Belanda sebagai Pertanda 2. Pendalaman Penanda 3 atau Interpretasi 2 pada tataran III adalah Gedung Siola sebagai gedung bersejarah untuk menyingkirkan kolonialisme Belanda ini memiliki Pertanda 3 bahwa Gedung Siola adalah memori-tempat orang Surabaya dalam memaknai Indonesia harus Merdeka.

Dari hasil wawancara mendalam dengan Disbudpar Kota Surabaya, Gedung Siola merupakan gedung rapat dan pertemuan para tokoh bangsa dan tokoh pejuang, para seniman, serta sempat menjadi tempat berdagang, sebelum akhirnya diambilalih Jepang, kemudian dikelola oleh Pemda. Dewasa ini Gedung Siola menjadi kantor Disbudpar dan bagian depannya menjadi Museum Surabaya.

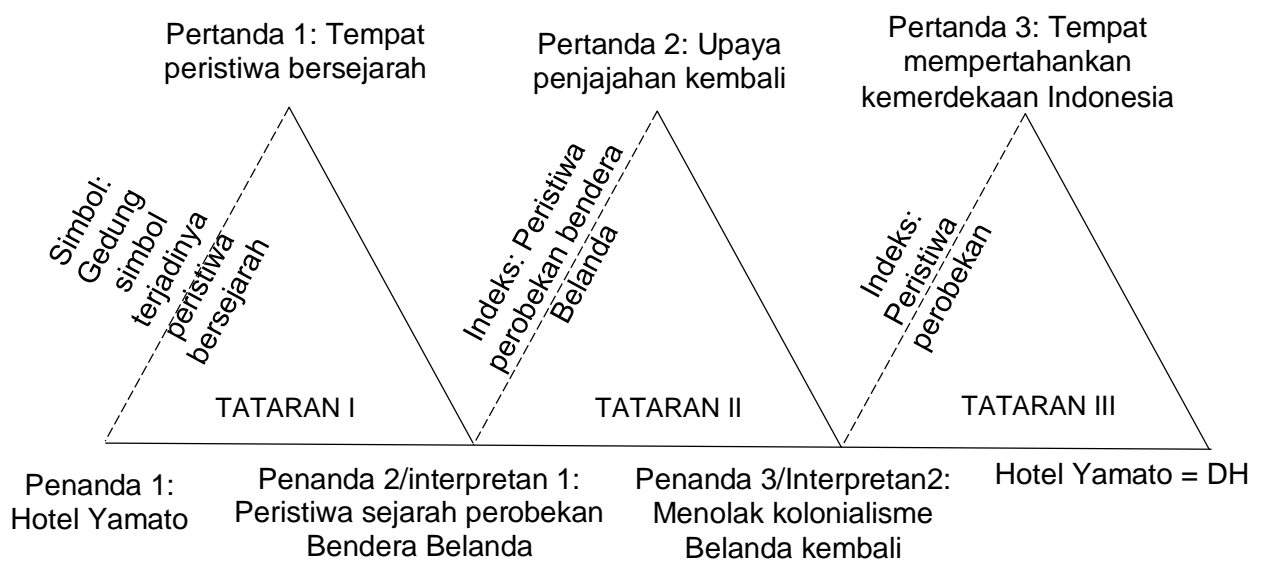
Sementara Museum Surabaya di lantai bawah sendiri mempunyai kurang lebih 1.000 koleksi yang berkaitan dengan ikon Kota Surabaya seperti Walikota dari masa ke masa, replika biola milik W.R Supratman, piano musisi Gombloh, dan beberapa tampilan kendaraan umum lawas Kota Surabaya seperti becak malam, bajaj, dan mobil anggana.

Berdasarkan hasil observasi penelitian, Pemkot Surabaya belum melakukan pemugaran secara utuh terhadap Gedung Siola. Sepanjang koridor lantai 1 terdapat beberapa lukisan modern tentang ikon Kota Surabaya serta beberapa *art installation* berupa ukiran, patung kecil, dan *handcraft* yang menghiasi ruangan. Pada kantor Disbudpar Kota Surabaya bangunan terlihat lebih baru. Sehingga meski dari luar bentuk bangunan sangat terasa dari jaman kuno, masuk ke dalam gedung terasa sebaliknya, sangat modern.

Selain kantor Disbudpar itu, cat di Gedung Siola terlihat sudah mengelupas, bangunan dari jarak 200 meter terlihat kokoh namun menyeramkan, dan narasi sejarah dibalik Gedung Siola itu sendiri jarang diajarkan kepada para siswa dan guru yang lebih mengenal tentang narasi sejarah di balik Jembatan Merah dan Tugu Pahlawan. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Dinas Budaya dan Pariwisata (Kasubbag TU Disbudpar) mengatakan bahwa, Gedung Siola termasuk ke dalam bangunan bersejarah kategori A, yakni bangunan yang boleh dilakukan pengecatan, namun tidak boleh ditambah bangunan. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Pemkot Surabaya, terutama dinas-dinas yang menempati Gedung Siola, sebab Gedung Siola bukanlah bangunan yang besar, padahal arsip Disbudpar dan Disdukcapil cukup banyak. Apabila dilakukan pengarsipan berorientasi digital maka dokumentasi tidak akan menghabiskan ruang.

Dari pendalaman pemaknaan adanya simbol perjuangan sejarah itu, maka kajian ini menentukan bahwa Gedung Siola (Museum Surabaya) adalah objek *defense heritage* bagi bangsa Indonesia, sebab secara tak kasat mata, nilai-nilai sejarah perjuangan bangsa, berupa diplomasi pertahanan yang terkandung di dalam Gedung Siola melengkapi narasi sejarah nasional, terutama sejarah para pejuang Surabaya dalam konteks merumuskan gagasan-gagasan terbaiknya untuk membela Indonesia lepas dari penjajahan.

b. Hotel Yamato (Hotel Majapahit)



Gambar 4.2 Analisis Makna *Defense Heritage* Hotel Yamato

Sumber: Olahan peneliti (2021)

Hotel Yamato (sekarang bernama Hotel Majapahit), dewasa ini adalah hotel yang dikelola oleh perusahaan korporasi swasta Accor Hotels. Hotel Majapahit merupakan hotel bersejarah dan paling populer menjadi sentral-nya memori-tempat perjuangan orang Surabaya, juga secara nasional, sebab disitu bangsa Indonesia berhasil merobek dan menurunkan bendera Kerajaan Belanda. Analisis makna *defense heritage*-nya adalah sebagai berikut.

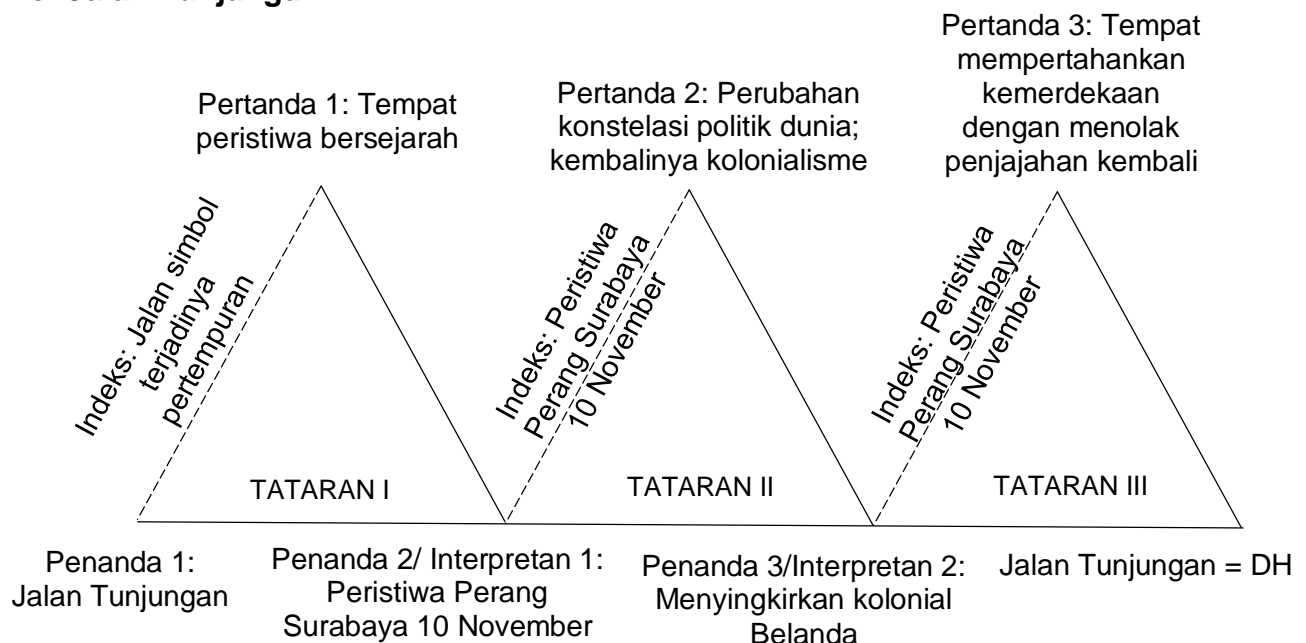
Pada Tataran I, Penanda 1 adalah bangunan Hotel Yamato berupa hotel dengan karakteristik gedung tua, sehingga muncul penalaran pertama adalah asumsi yang diterima dan disepakati bersama bahwa gedung tua itu bersejarah. Kemudian dilakukan observasi penelitian, studi pustaka, dan wawancara mendalam dengan ahli sejarah dan masyarakat sekitar tentang Hotel Yamato yang sudah populer ini

dibangun oleh siapa (Sarkies bersaudara), periode kapan (kolonialisme Belanda), dan berfungsi sebagai apa (hotel). Hotel Yamato sudah banyak disebutkan dalam buku-buku pelajaran sejarah terkait peristiwa perobekan bendera Belanda pada 19 September 1945 sebagai pendalaman Penanda 2 atau Interpretan 1 pada Tataran II.

Secara pendalaman Penanda 2 pada Tataran II, peristiwa perobekan Bendera adalah indeks dari pendalaman Pertanda 2, yakni adanya upaya penjajahan kembali oleh Belanda. Dalam pendalaman Penanda 3 atau Interpretan 2 di Tataran III, peristiwa itu juga simbol dari pendalaman Pertanda 3 yang berikutnya, yakni Hotel Yamato sebagai tempat perjuangan rakyat Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia, terutama *arek-arek Suroboyo*.

Dari pendalaman pemaknaan adanya simbol perjuangan sejarah itu, maka kajian ini menentukan bahwa Hotel Yamato adalah objek *defense heritage* bagi bangsa Indonesia, sebab secara tak kasat mata, nilai-nilai perjuangan Hotel Yamato menjadi keterwakilan semangat juang orang Surabaya dalam hal mempertahankan kemerdekaan (Wisnu, 2018 & Adi, 2020).

c. Jalan Tunjungan



Gambar 4.3 Analisis Makna *Defense Heritage* Jalan Tunjungan

Sumber: Olahan peneliti (2021)

Jalan Tunjungan dewasa ini merupakan kawasan kuliner dan pusat turis melakukan wisata bersejarah di kota Surabaya. Jalan Tunjungan juga amat populer di dalam lagu “rek ayo rek mlaku mlaku nang tunjungan”. Secara analisis *defense*

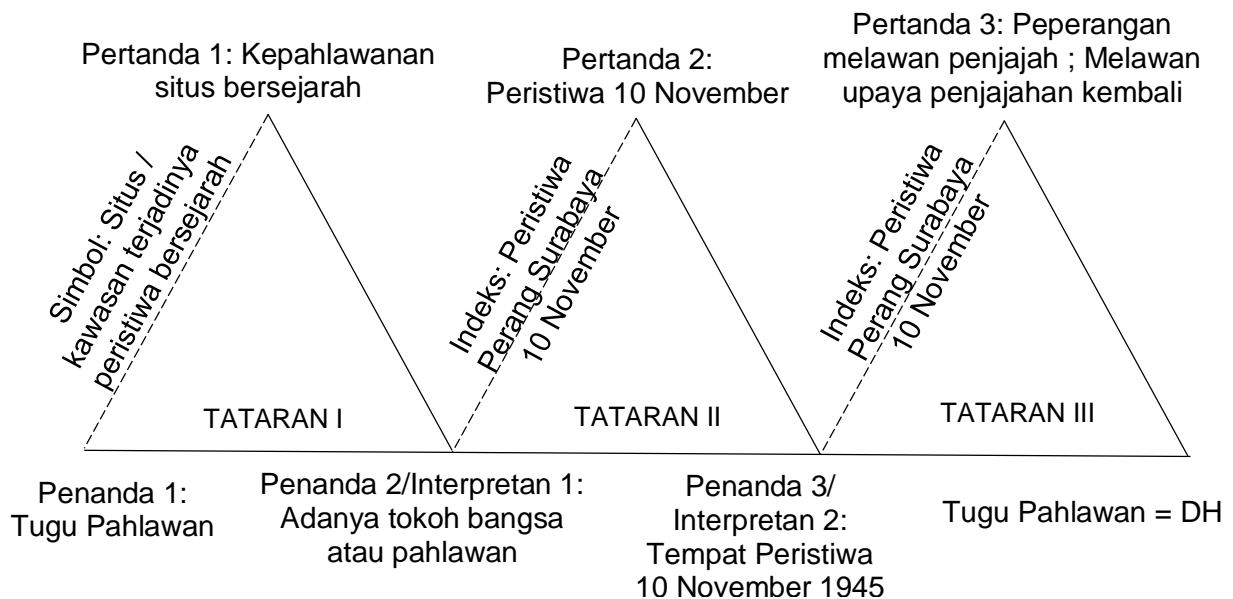
heritage adalah sebagai berikut. Jalan Tunjungan adalah situs *defense heritage* yang dapat lebih dimaksimalkan lagi oleh pemerintah kota.

Secara Penanda 1 pada Tataran I, kawasan Jalan Tunjungan adalah jalan utama kota Surabaya yang dilewati ketika terjadi wisata kepahlawanan atau Parade 10 November, sehingga muncul penalaran pertama adalah asumsi yang diterima dan disepakati bahwa Jalan Tunjungan adalah jalan yang historikal, terlebih Jalan Tunjungan sering disebutkan dalam buku-buku yang membahas Perang Surabaya. Makna Jalan Tunjungan sebagai kawasan bersejarah itu kemudian dilakukan kajian melalui studi pustaka, observasi penelitian, dan wawancara mendalam dengan ahli sejarah dan masyarakat sekitar untuk mendalami Jalan Tunjungan yang sudah populer tersebut telah ada sejak kapan (abad 20), periode kapan (kolonialisme Belanda), dan berfungsi sebagai apa (kawasan dagang dimana terdapat Gedung Siola/Museum Surabaya). Oleh sebab itu, Jalan Tunjungan adalah kawasan bersejarah yang paling populer di Surabaya karena Peristiwa Perang Surabaya sebagai Pertanda 1.

Dari pendalaman pemaknaan pada Tataran II, Penanda 2 atau Interpretan 1 adalah Jalan Tunjungan memiliki memori-tempat perjuangan orang Surabaya dalam peristiwa perang Surabaya 10 November yang mengacu pada Pertanda 2, yakni perubahan konstelasi politik dunia dan bahwa adanya upaya kolonialisme kembali. Pada Tataran III, Penanda 3 atau Interpretan 2 adalah Jalan Tunjungan sebagai jalan tempat terjadinya orang Surabaya melawan kolonialisme Belanda pada peristiwa Perang Surabaya 10 November yang memunculkan Pertanda 3 bahwa Jalan Tunjungan adalah tempat orang Surabaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan menolak penjajahan kembali.

Adanya perjuangan sejarah yang diakui nasional, maka kajian ini menentukan bahwa Jalan Tunjungan memiliki memori-tempat bagi orang Surabaya dan juga secara nasional dan merupakan objek *defense heritage* bagi bangsa Indonesia, sebab secara tak kasat mata, nilai-nilai perjuangan di Jalan Tunjungan menjadi pelengkap konsepsi Surabaya sebagai kota-nya para pahlawan bangsa untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

d. Monumen Tugu Pahlawan (Museum 10 November Surabaya)



Gambar 4.4 Analisis Makna *Defense Heritage* Monumen Tugu Pahlawan (Museum 10 November)

Sumber: Olahan peneliti (2021)

Monumen Tugu Pahlawan adalah situs terkenal di kota Surabaya dan menjadi salah satu simbol bagi turis telah mengunjungi kota Surabaya. Secara penanda, Monumen Tugu Pahlawan (Museum 10 November) berupa tugu atau monumen, sehingga muncul penalaran pertama adalah asumsi yang diterima dan disepakati bahwa Tugu Pahlawan adalah simbol yang historikal, terlebih terdapat patung pendiri bangsa Soekarno-Hatta. Makna Monumen Tugu Pahlawan sebagai bangunan penting bersejarah itu didapatkan melalui studi pustaka, observasi penelitian, dan wawancara mendalam dengan ahli sejarah dan masyarakat sekitar, untuk mendalami Monumen Tugu Pahlawan terkait peristiwa 10 November 1945 sebab di dekat Monumen Tugu Pahlawan terdapat Museum 10 November. Oleh sebab itu, Monumen Tugu Pahlawan (Museum 10 November) adalah memori-tempatnya orang Surabaya.

Pada Tataran I, Penanda 1 adalah Monumen Tugu Pahlawan (Museum 10 November) dengan simbol tugu peringatan atau ikon bahwa dengan adanya kata “pahlawan” memiliki Pertanda 1 bahwa Monumen Tugu adalah kepahlawanan situs bersejarah. Pada Tataran II, Penanda 2 atau Interpretan 1 adalah adanya para tokoh bangsa atau pahlawan yang gugur di tempat itu yang diwakili dengan asosiasi perantara penalaran adalah adanya Museum 10 November. Peresmian Museum 10

November oleh Presiden K.H. Abdurrahman Wahid pada 19 Februari 2000. Pertanda yang diacu adalah Peristiwa 10 November 1945.

Pada Tataran III, Penanda 3 atau Interpretan 2 adalah Monumen Tugu Pahlawan sebagai pengingat Peristiwa 10 November dengan asosiasi pengantara penalaran mengacu pada Pertanda 3 peristiwa 10 November adalah perang arek-arek Suroboyo melawan sekutu dan menolak upaya kolonialisme Belanda yang ingin menjajah Indonesia kembali.

Pada setiap tanggal 10 November, komunitas sejarah di Surabaya turut serta dalam program Pemkot seperti pawai dan rekonstruksi sejarah agar anak-anak sekolah dan kaum muda memiliki pemahaman yang lebih baik tentang apa yang terjadi selama pertempuran 10 November, kemudian untuk menghargai Jalan Tunjungan dimana terdapat Hotel Oranje dan Jembatan Merah yang menjadi saksi perjuangan Bangsa Indonesia melawan Belanda pada agresi militer Belanda. Ini membuat Jalan Tunjungan, Hotel Oranje, dan Jembatan Merah, serta keseluruhan jalan adalah objek *defense heritage* di Kota Surabaya sesuai dengan Bab 2 Teori *Defense Heritage*.

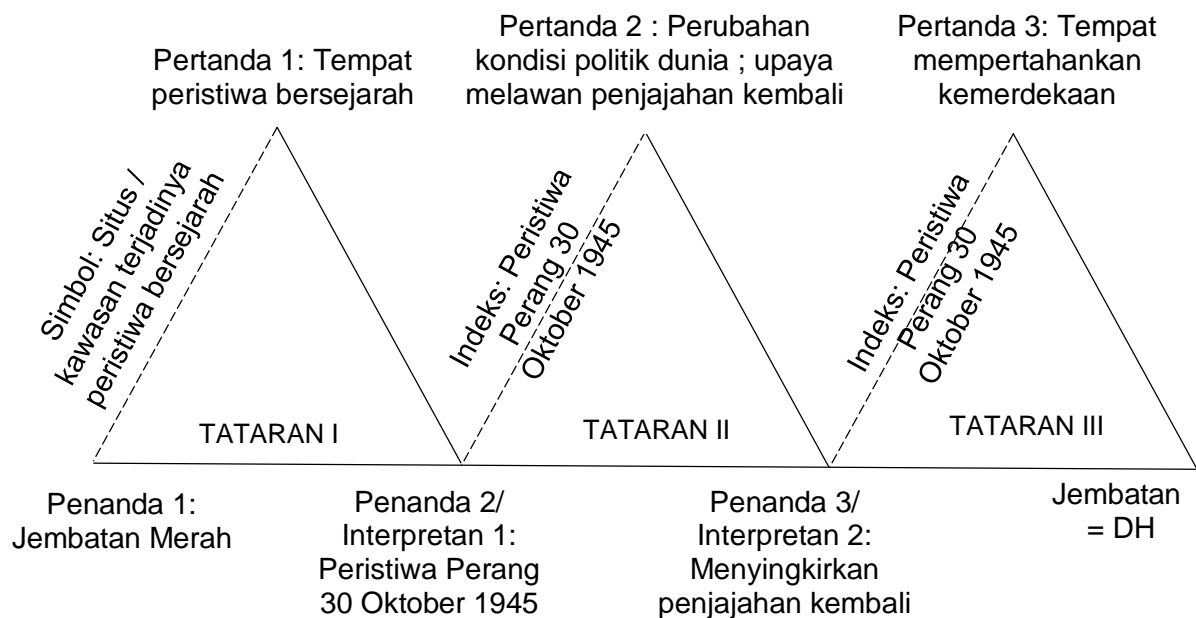
Menurut Silas (2018), tanggal 10 November amat penting bagi pertahanan bangsa, sebab Surabaya menjadi saksi banyak perjuangan bersejarah bagi bangsa Indonesia. Beliau juga mengungkapkan bahwa saat ini banyak orang-orang tua yang mengaku-ngaku berperan pada peristiwa 10 November hanya untuk mendapat *privilege* atau hadiah-hadiah dari Pemkot.

Seperti penjelasan dari Disbudpar, ahli sejarah Unesa, dan komunitas sejarah, orang Surabaya senang mengetahui lebih banyak tentang sejarah Kota Surabaya sebagai turis dan swafoto di depan beberapa gedung sejarah terkenal. Selain itu, dengan adanya *barcode* informasi pada Museum Tugu Pahlawan, Pemkot Surabaya telah memperkenalkan sejarah dengan cara yang lebih menyenangkan bagi generasi milenial. Misalnya di Museum Tugu Pahlawan, mereka telah melakukan digitalisasi setiap lukisan, benda, dan patung, jadi jika pengunjung membawa ponsel mereka yang memiliki aplikasi museum, mereka dapat melakukan pemindaian, kemudian informasi tentang barang bisa dilihat langsung secara *offline*. Informasi ini juga menjadi referensi yang valid untuk para akademisi dan peneliti.

Pengurus Monumen Tugu Pahlawan mengatakan bahwa sudah disiapkan sekolah kebangsaan untuk menumbuhkan nilai-nilai sejarah perlawanan kota Surabaya bagi para murid. Disbudpar dan komunitas sejarah juga mengatakan bahwa

sekolah kebangsaan menjadi penting dalam menumbuhkan rasa cinta tanah air para murid kepada pahlawan yang telah berjuang hingga titik darah penghabisan, serta sejarah bangsa yang dapat dilihat dari bangunan bersejarah di sepanjang sudut kota Surabaya. Tim Disbudpar mengatakan bahwa setiap Kamis rutin melakukan rapat koordinasi dan bertemu dengan ahli sejarah, serta lintas komunitas untuk mengevaluasi program-program seni budaya yang ada. Dalam kesempatan FGD di Universitas Negeri Surabaya (UNESA), peneliti mendapatkan informasi dari dosen sejarah Wisnu & Nugroho Aji (2018), bahwa “walaupun tidak mengenal konsep *defense heritage*, Pemkot Surabaya sudah melakukan program *defense heritage*”.

e. Jembatan Merah



Gambar 4.5 Analisis Makna *Defense Heritage* Jembatan Merah

Sumber: Olahan peneliti (2021)

Sebelum Pandemi Covid-19, Jembatan Merah menjadi salah satu pusat kuliner dan wisata budaya kota Surabaya, karena disitu terdapat sanggar, kegiatan tarian tradisional, dan pertunjukkan budaya lainnya.

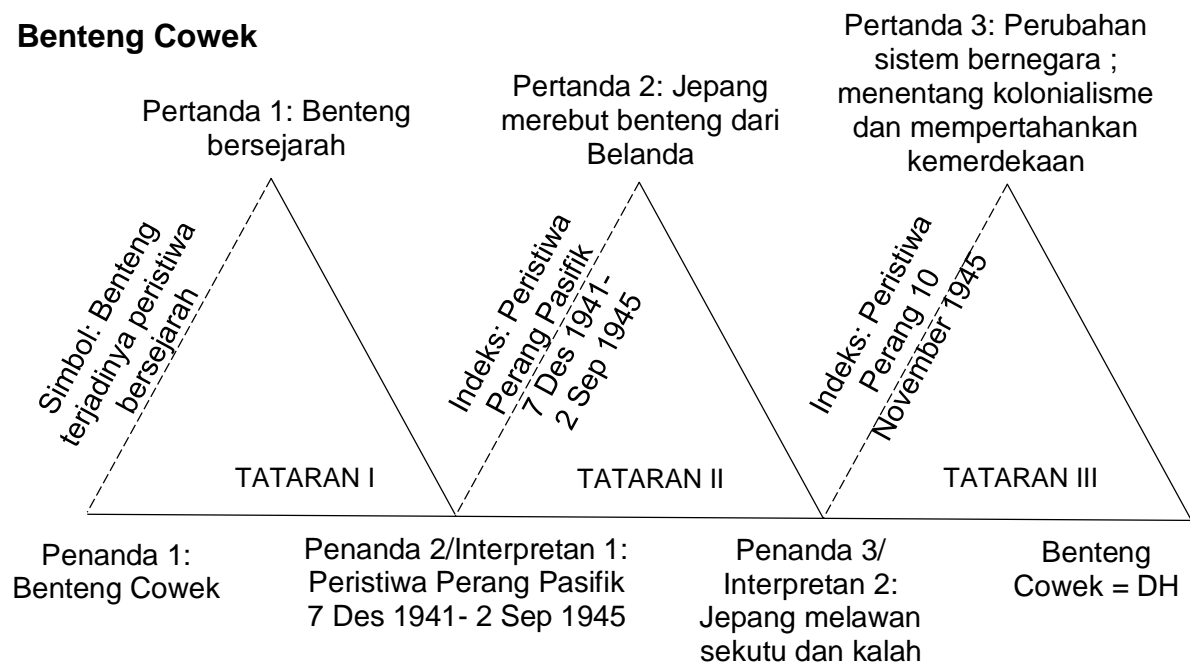
Pada Tataran I, Penanda 1 adalah Jembatan Merah berupa situs bersejarah populer di kota, sehingga muncul penalaran pertama Simbol adalah asumsi yang diterima dan disepakati bahwa di Jembatan Merah terdapat peristiwa yang historikal, terlebih Jembatan Merah sering disebutkan di dalam buku-buku pelajaran terkait peristiwa 30 Oktober 1945, terutama bagian terbunuhnya Brigjen Inggris Aubertin Walter Sothern Mallaby. Penanda memiliki asosiasi pengantara adalah jembatan

sebagai situs atau kawasan terjadinya peristiwa bersejarah, sehingga mengacu kepada Pertanda 1, yakni Jembatan Merah sebagai tempat terjadinya peristiwa bersejarah.

Kajian ini memiliki data tentang makna Jembatan Merah sebagai jembatan bersejarah dari studi pustaka, observasi penelitian, dan wawancara mendalam dengan ahli sejarah dan pendapat masyarakat sekitar, untuk mendalami peristiwa apa yang melatar-belakangi nilai historikal Jembatan Merah (peristiwa 30 Oktober 1945), periode kapan (pasca-kemerdekaan), dan berfungsi sebagai apa (jembatan sebagai saksi sejarah). Pada Tataran II menunjukkan Penanda 2 atau Interpretan 1 bahwa Jembatan Merah yang dimaksud memiliki peristiwa bersejarah yakni Perang 30 Oktober 1945, yang kemudian mengacu pada pendalaman Pertanda 2, adanya perubahan kondisi politik dunia dan adanya upaya penjajahan kembali di Asia, termasuk Indonesia.

Pada Tataran III, Penanda 3 atau Interpretan 2 adalah Jembatan Merah sebagai jembatan kawasan terjadinya perang 30 Oktober 1945 untuk menyingkirkan penjajahan kembali, yang memiliki acuan Pertanda 3 adanya perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Oleh sebab itu, Jembatan Merah adalah situs bersejarah di kota Surabaya. Dari pendalaman pemaknaan perjuangan sejarah itu, maka kajian ini menentukan bahwa Jembatan Merah adalah objek *defense heritage* bagi bangsa Indonesia, sebab mengandung memori-tempat bagi orang Surabaya yang berjuang bagi bangsa Indonesia.

f. Benteng Cowek



Gambar 4.6 Analisis Makna *Defense Heritage* Benteng Cowek

Sumber: Olahan peneliti (2021)

Tujuan awal dibangunnya Benteng Kedung Cowek ini adalah untuk pertahanan Belanda melawan Jepang saat Perang Pasifik. Belanda menyiapkan meriam-meriam besar dibalik beton benteng yang telah dibangun dengan sangat kokoh dan tebal. Namun meriam-meriam tersebut tak sempat ditembakkan saat Belanda diserang Jepang. Kemudian, pada masa pendudukan Jepang, benteng peninggalan Belanda ini digunakan sebagai basis pertahanan laut dengan menambah persenjataan. Kejadian yang sama terulang, Jepang tak sempat menggunakan persenjataannya di benteng ini. Setelah Jepang menyerah pada Sekutu, Benteng Kedung Cowek digunakan oleh Tentara Keamanan Rakyat (TKR-sekarang Tentara Nasional Indonesia-TNI) dari Pasukan Sriwijaya saat Pertempuran 10 November 1945 melawan tentara Sekutu yang dipimpin Inggris (Wisnu, 2018).

Pada Tataran I, Penanda 1 adalah Benteng Kedung Cowek yang memiliki simbol nalar pertama berupa Benteng, sehingga muncul penalaran pertama adalah asumsi yang diterima dan disepakati bahwa di Benteng Cowek adalah mengacu kepada Pertanda 1 Benteng Cowek sebagai benteng pertahanan yang bersejarah. Kajian ini memiliki data makna Benteng Cowek sebagai benteng bersejarah itu dari studi pustaka dan wawancara mendalam dengan ahli sejarah untuk mendalami peristiwa apa yang melatar-belakangi nilai historikal Benteng Cowek (Perang Pasifik dan

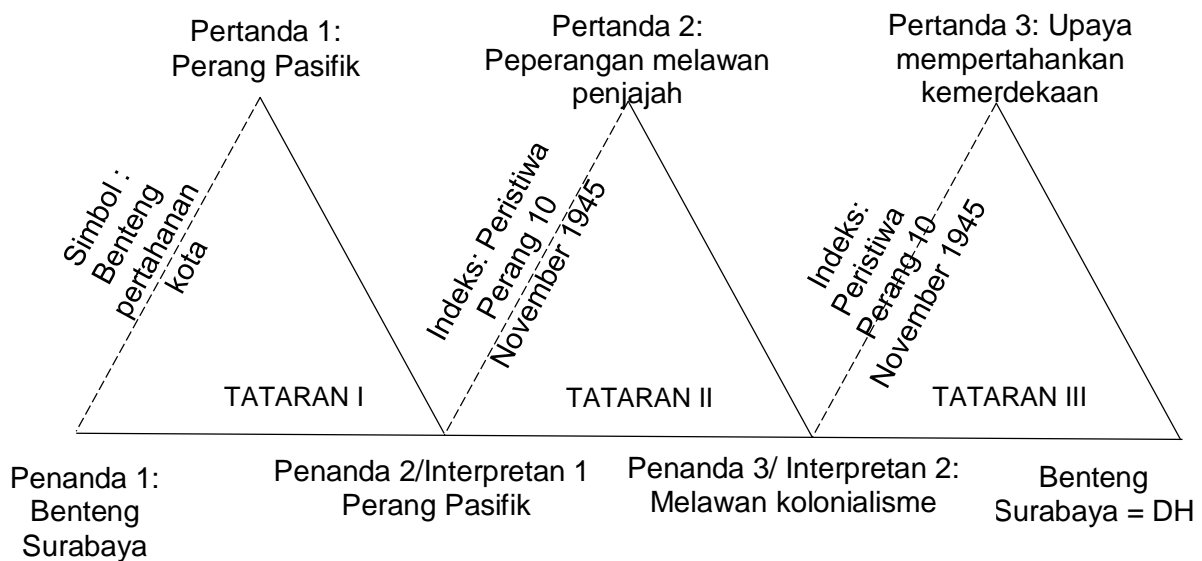
perang mempertahankan kemerdekaan), periode kapan (Perang Asia Timur Raya dan pasca-kemerdekaan), dan berfungsi sebagai apa (pertahanan).

Pada Tataran II, Penanda 2 atau Interpretan 1 adalah Benteng Cowek tempat terjadinya Perang Pasifik yang mengacu pada Pertanda 2 Jepang berhasil merebut Benteng Cowek dari Belanda, lalu bertahan di benteng untuk melawan sekutu. Dalam Perang Pasifik tersebut, Jepang kalah. Pada Tataran III, Penanda 3 atau Interpretan 2 adalah Benteng Cowek tempat terjadinya Perang Pasifik tempat dimana Jepang mengalami kekalahan. Sekutu yang menang ingin menjajah Indonesia kembali dengan cara meminta bangsa Indonesia menyerahkan senjata (Benteng Cowek adalah gudang peluru pasukan Tentara Keamanan Rakyat / TKR), namun Indonesia menolak dan terjadilah peristiwa Perang 10 November 1945. Peristiwa 10 November adalah asosiasi pengantar penalaran yang mengacu pada Pertanda 3 adanya perubahan sistem bernegara dalam hal menentang kolonialisme kembali dan mempertahankan kemerdekaan.

Oleh sebab itu, Benteng Cowek adalah benteng bersejarah di kota Surabaya. Benteng Cowek adalah memori-tempat-nya pihak sekutu terutama bangsa Belanda, Jepang, Inggris, sekaligus bangsa Indonesia. Dari pendalaman pemaknaan adanya simbol perjuangan sejarah itu, maka kajian ini menentukan bahwa Benteng Cowek adalah objek *defense heritage* bagi bangsa Indonesia, sebab beralih fungsi menjadi basis pertahanan Tentara Keamanan Rakyat melawan sekutu pada peristiwa 10 November 1945.

Namun seperti beberapa benteng dan peninggalan sejarah lainnya, Benteng Kedung Cowek seolah-olah ditinggalkan saja, kosong tandus, tanpa perhatian dari Pemkot Surabaya, sehingga anak-anak muda pun tidak mengenal bahwa di daerah tersebut pernah terjadi pertempuran yang bersejarah bagi Indonesia. Benteng Kedung Cowek baru diangkat dalam pemberitaan nasional setelah komunitas sejarah melibatkan anak-anak muda melakukan rekonstruksi sejarah. Komunitas sejarah ini berjalan secara swasembada dan madani tanpa subsidi atau bantuan apapun dari Pemkot Surabaya. Apabila tidak dimanfaatkan dengan baik dan tepat, Benteng Cowek berpotensi untuk hilang punah dari narasi sejarah nasional, maupun dari peradaban, padahal Benteng Cowek menjadi salah satu bagian perjalanan sejarah tentara Indonesia yang lahir dan berjuangnya berasal dari dan bersama rakyat.

g. Benteng Surabaya yang terhubung ke 10 benteng di Selat Madura



Gambar 4.7 Analisis Makna *Defense Heritage* Benteng Surabaya

Sumber: Olahan peneliti (2021)

Sisa-sisa benteng yang ada di kota Surabaya dan memanjang ke Selat Madura membuktikan bahwa kota Surabaya merupakan wilayah pertahanan yang strategis bagi penjajah, terutama Belanda, sehingga dilindungi dengan benteng kota.

Pada Tataran I, Penanda 1 adalah Benteng Surabaya yang memiliki simbol nalar pertama berupa Benteng pertahanan kota, yang mengacu pada Pertanda 1 fungsi Benteng Surabaya yang dipergunakan pertama kali menjadi benteng pertahanan pada saat Perang Pasifik. Kajian ini memiliki data tersebut dari studi pustaka dan wawancara mendalam dengan ahli sejarah untuk mendalami peristiwa apa saja yang melatar-belakangi nilai-nilai pertahanan (wilayah pertahanan Hindia Belanda), periode kapan (kolonialisme Belanda), dan berfungsi sebagai apa (pertahanan).

Pada Tataran II, Penanda 2 atau Interpretan 1 adalah Benteng Surabaya sebagai benteng pertahanan kota yang dipergunakan pada Perang Pasifik, telah beralih fungsi menjadi benteng pertahanan TKR pada peristiwa 10 November. Peristiwa 10 November 1945 adalah asosiasi pengantar untuk mengacu pada Pertanda 2 peperangan melawan penjajahan kembali oleh Sekutu.

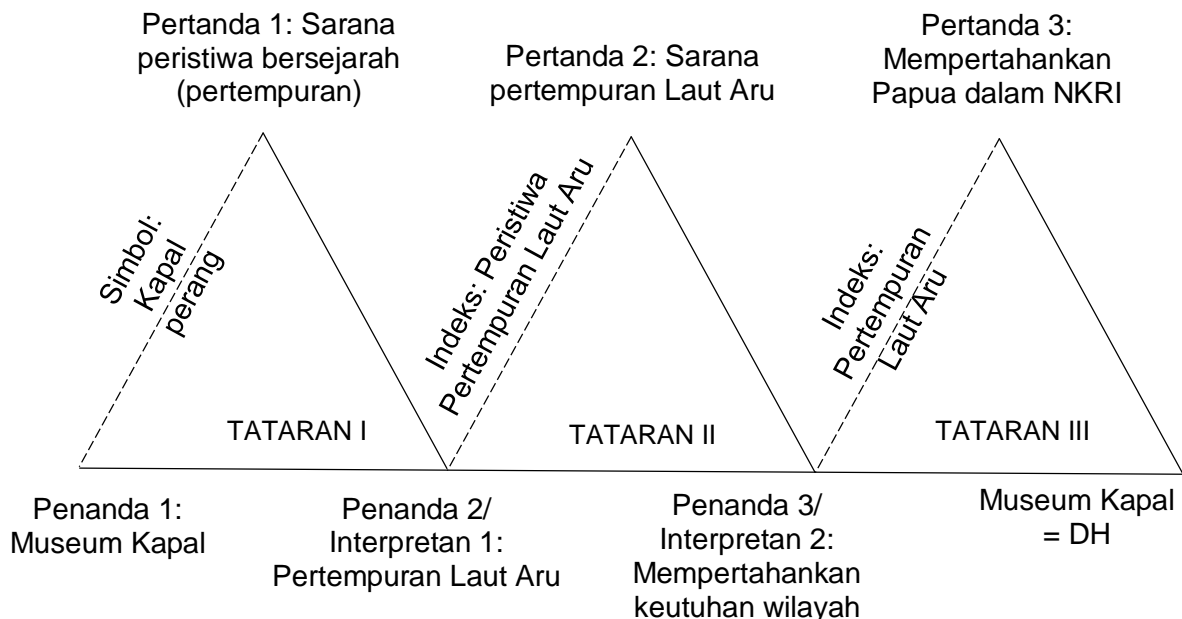
Pada Tataran III, Penanda 3 atau Interpretan 2 adalah Benteng Surabaya sebagai benteng pertahanan kota yang dipergunakan pada Pasifik, kemudian beralih fungsi untuk melawan kolonialisme pada peristiwa 10 November. Peristiwa 10 November 1945 adalah asosiasi pengantar untuk mengacu pada Pertanda 3 bangsa

Indonesia mempertahankan kedaulatan wilayahnya dan mempertahankan kemerdekaannya.

Oleh sebab itu, Benteng Surabaya adalah memori-tempat pertahanan bangsa Indonesia di kota Surabaya. Dari pendalaman pemaknaan adanya simbol berupa sisa-sisa struktur bangunan pertahanan, maka kajian ini menentukan bahwa Benteng Surabaya adalah objek *defense heritage* bagi bangsa Belanda sebagai wilayah pertahanan Hindia Belanda di Asia Tenggara dan juga bagi Indonesia, sebab beralih fungsi menjadi basis pertahanan TKR melawan sekutu.

Sisa-sisa benteng yang ada tersebut secara ilmiah dapat dibuktikan menyambung dengan 10 benteng di sepanjang Selat Madura. Beberapa diantaranya masih diperhatikan oleh Pemkot dan masih dikunjungi oleh turis, serta dalam beberapa kesempatan diperkenalkan oleh komunitas sejarah melalui kegiatan-kegiatan rekonstruksi sejarah bersama para pemuda.

h. Museum Kapal Selam 410 Pasopati



Gambar 4.8 Analisis Makna *Defense Heritage* Museum Kapal Selam 410

Pasopati milik TNI AL Surabaya

Sumber: Olahan peneliti (2021)

Museum Kapal Selam 410 Pasopati adalah salah satu *defense heritage* terbaik di Surabaya, sebab terdapat penjaga museum yang memahami sejarah kapal

tersebut, harga tiket yang cukup mahal Rp 15.000, dan di dalam kapalnya terlihat dirawat dan dibersihkan setiap hari.

Pada Tataran I, Penanda 1 adalah Museum Kapal Selam 410 Pasopati dengan simbol asosiasi pengantar penalaran adanya kapal perang disitu yang mengacu pada Pertanda 1 kapal perang adalah sarana dari peristiwa bersejarah, yakni Pertempuran Laut Aru. Kajian ini memiliki data tersebut dari studi pustaka, observasi penelitian, dan wawancara mendalam dengan penjaga museum. Ruangan di dalam kapal yang ditampilkan misalnya kamar kapten kapal dan peluru torpedo, adalah sisa-sisa bukti pertahanan dan perjuangan pada kapal itu, untuk mendalami peristiwa apa saja yang melatar-belakangi nilai-nilai pertahanan (wilayah pertahanan Indonesia, terutama terkait kawasan maritim) dan periode kapan (Kapal selam ini pernah dilibatkan dalam Pertempuran Laut Aru 15 Januari 1962 untuk membebaskan Irian Barat dari pendudukan Belanda). Pertempuran Laut Aru adalah salah satu dari serangkaian Operasi Trikora. Oleh sebab itu, Kapal Selam 410 Pasopati adalah objek *defense heritage* bagi bangsa Indonesia, terutama dalam hal pertahanan negara di laut.

Pada Tataran II, Penanda 2 atau Interpretan 1 adalah Kapal yang dipergunakan TNI AL dalam Pertempuran Laut Aru, dengan asosiasi nalar pengantar peristiwa pertempuran Laut Aru, yang mengacu pada Pertanda 2 Kapal adalah sarana pertempuran Laut Aru. Pada Tataran III, Penanda 3 atau Interpretan 2 adalah Kapal sebagai sarana mempertahankan wilayah NKRI, dengan asosiasi nalar pengantar peristiwa Pertempuran Laut Aru, yang mengacu pada Pertanda 3 adanya pengorbanan dari operasi militer yang dilakukan untuk mempertahankan Irian Barat tetap menjadi bagian kedaulatan NKRI.

Demikian 8 (delapan) objek *defense heritage* yang telah dianalisis yang menimbulkan sebuah konsep memori-tempat kota Surabaya bahwa kota Surabaya adalah kota yang tidak akan pernah bisa dilupakan di dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan penjajah. Sebelum dan sesudah kemerdekaan, *arek-arek Suroboyo* tetap konsisten dan setia dalam menghimpun kekuatan untuk mempertahankan harkat dan martabat Bangsa Indonesia. Bukanlah sebuah kebetulan apabila para ahli sejarah kemudian menyebut bahwa Surabaya adalah kota pahlawan.

Informan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya menjelaskan bahwa sesuai dengan UU Cagar Budaya, maka bangunan-bangunan bersejarah di kota Surabaya memiliki klasifikasi tersendiri yang memiliki dampak dalam hal

perawatannya (Disbudpar Kota Surabaya, 2018). Seiring dengan globalisasi dan perkembangan zaman, Surabaya dihadapkan pada industrialisasi dan modernisasi kemajuan kotanya, baik dari segi infrastruktur maupun non-infrastruktur seperti misalnya ajang acara atau kegiatan internasional yang diberlangsungkan di Kota Surabaya, misalnya International Trade Expo.

Namun Disbudpar Kota Surabaya mengatakan bahwa arsip bangunan belum tersimpan secara digital, serta apresiasi terhadap nilai-nilai sejarah dilakukan dalam bentuk aktivitas bagi anak-anak dan pemuda. Kasubbag TU Disbudpar mengatakan bahwa, Pemkot sudah melakukan aktivitas Wisata Kepahlawanan dan Parade Juang yang dimulai sejak Oktober lalu dan melibatkan kurang lebih 1.500 anak-anak sekolah. Rute yang dilalui untuk Wisata Kepahlawanan antara lain Jembatan Merah, Hotel Oranje atau Yamato, Jalan Tunjungan, dan Tugu Pahlawan. Seperti teori memori-tempat, kota Surabaya kental akan sejarah perjuangan dan tiap sudut kota memiliki nilai-nilai sejarah yang perlu diceritakan kepada generasi muda.

Di kota Surabaya, objek *defense heritage*-nya melekat merupakan bagian identitas kota Surabaya yang masih dalam proses menjadi kota modern, sehingga dengan mengetahui sejarah, Pemkot dan rakyat Surabaya memiliki semangat untuk mengenal dan mempertahankan warisan bersejarah. Orang Surabaya juga senang bepergian bersama keluarga, teman, dan komunitas untuk mengenal sejarah dan bangga akan rekonstruksi sejarah 10 November.

Gedung Siola dan Museum Tugu Pahlawan mempertahankan bentuk bangunan, namun masih memiliki beberapa debu, atau sebagai bangunan tua yang kurang sehat bagi Kesehatan pengunjung, terutama bagi pengunjung yang memiliki gangguan pernapasan/sinus. Di dalam jurnal "*Environmental Health In Defense Heritage Restoration*" (Proceeding UNAND, 2018), bahwa konsep kesehatan lingkungan tidak hanya berfungsi untuk kesehatan dalam urusan rumah sakit, namun gedung bangunan bersejarah seperti objek *defense heritage* juga diperlukan untuk memiliki tingkat dan prosedur kesehatan lingkungan, termasuk prosedur-prosedur dalam restorasi. Selain itu, manajemen warisan pertahanan mencakup juga tentang bagaimana melakukan restorasi peninggalan sejarah dengan memperhatikan kesehatan lingkungan yang sesuai dengan standar *World Health Organization* (WHO) (Francoise, et al, 2018, p.1).

Pertahanan semesta pernah terjadi di kota Surabaya, terutama pada 10 November, sehingga ide-ide perjuangan dan perlawanan melawan penjajah terlihat

dalam para pahlawan yang gugur, serta bangunan-bangunan bersejarah menjadi saksi akan peristiwa tersebut. Adanya eksistensi peristiwa bersejarah di kota Surabaya ini sesuai dengan Memori-Tempat Pierre Nora pada Bab 2 Teori dan adanya komunitas sejarah yang tetap hadir konsisten memberikan wawasan pertahanan bagi anak-anak sekolah dan kaum muda, walaupun bersifat swasembada dan madani, bahwa terdapat nilai sejarah di dalam unsur struktur bangunan yang tidak lekang zaman karena diceritakan secara turun-temurun. 10 November adalah *chosen memory* yang dipilih untuk dilestarikan oleh orang Surabaya.

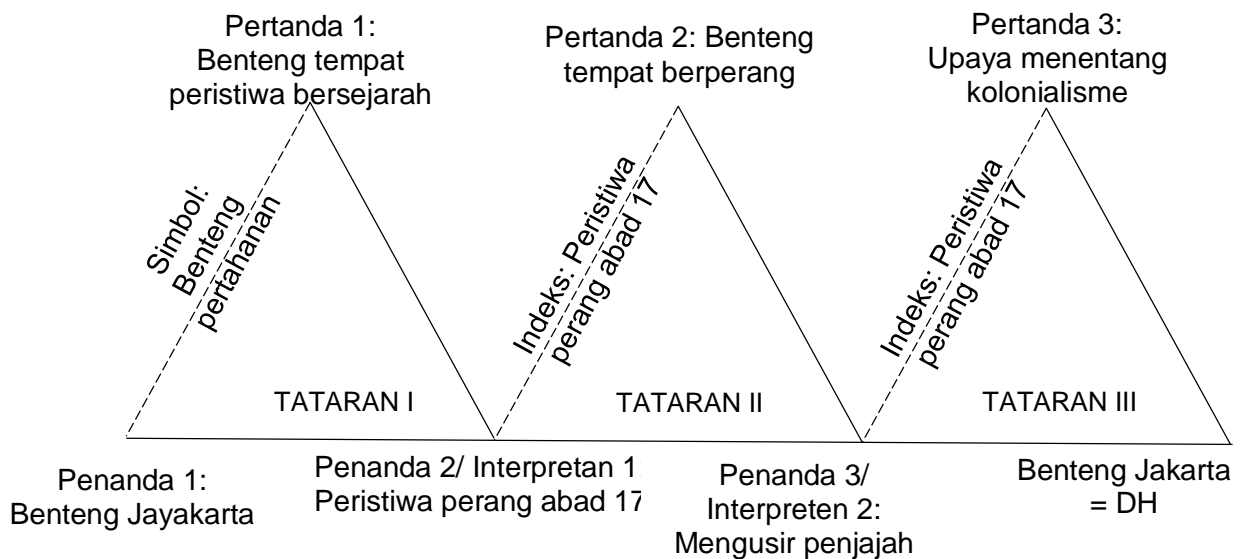
Sebagai simpulan dari hasil penelitian di Surabaya, Pemkot Surabaya belum memasukkan pembelajaran cagar budaya sebagai bagian dari program bela negara ke dalam modul bela negara. Wujud program bela negara lebih kepada pembentukan kader bela negara, sekolah kebangsaan, dan melakukan pelatihan baris-berbaris, Latihan upacara (Disbudpar Kota Surabaya, 2018).

4.3.1.2 Pengelolaan Cagar Budaya Bernilai Pertahanan (*Defense Heritage*) Dewasa ini di Kota Jakarta

Sama persis seperti kota Surabaya, pengelolaan cagar budaya bernilai pertahanan (*defense heritage*) kota Jakarta belum diatur dan masih mengacu pada pengelolaan cagar budaya berdasarkan UU No.11 Tahun 2010 tentang cagar budaya dan berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Nomor 326 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Pusat Konservasi Cagar Budaya.

Berikut ini, kajian mengemukakan objek-objek *defense heritage* yang perlu dilestarikan, dipugar, atau dioptimalkan pemanfaatannya di kota Jakarta, apabila nanti sudah ada model pengelolaan *defense heritage*.

a. Benteng Jayakarta (Benteng Jakarta)



Gambar 4.9 Analisis Makna *Defense Heritage* Benteng Jayakarta

Sumber: Olahan peneliti, 2021

Benteng Jakarta (dulu disebut Benteng Jayakarta) terletak pada sisi kiri Museum Bahari yang dapat dilihat dari lantai 2 Museum Bahari. Benteng Jakarta menjadi milik Pemprov DKI Jakarta yang belum diteliti dan dimanfaatkan. Benteng Jayakarta di kompleks Museum Bahari dalam bentuknya terlihat sebagai benteng adalah penanda.

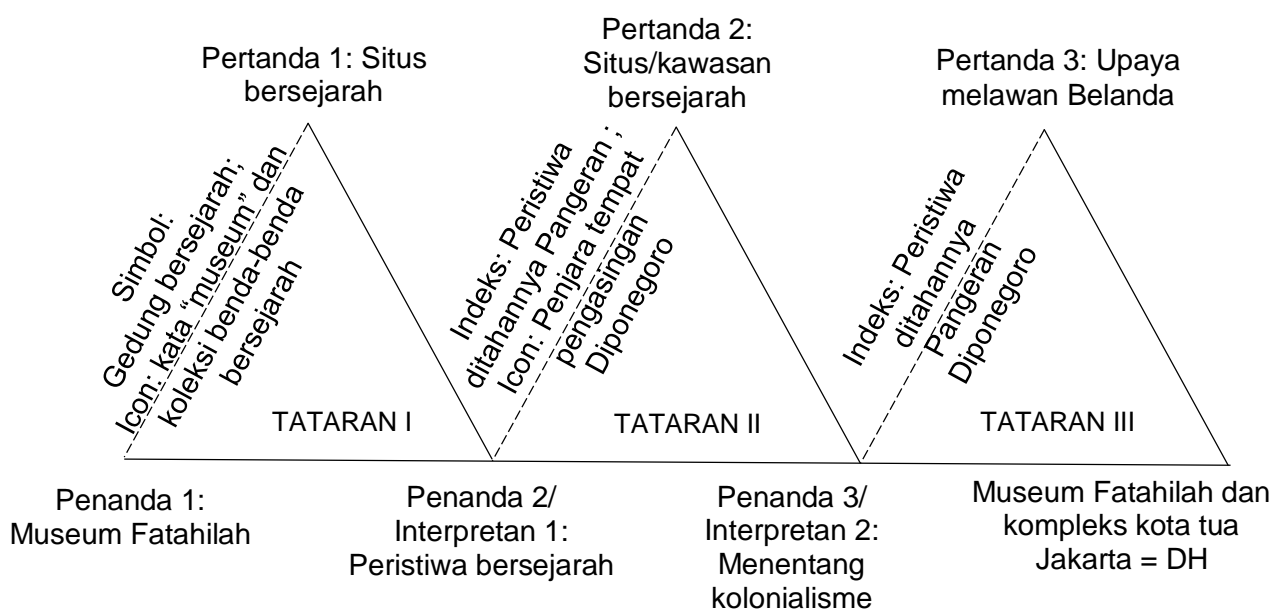
Pada Tataran I, Penanda 1 adalah Benteng Jayakarta (Benteng Jakarta) yang memiliki asosiasi penalaran benteng pertahanan, mengacu pada Pertanda 1 Benteng Jayakarta sebagai benteng tempat peristiwa bersejarah. Secara penanda, bentuk bangunannya (simbol) berupa benteng, sehingga muncul penalaran pertama adalah asumsi yang diterima dan disepakati bahwa benteng adalah bangunan pertahanan. Kajian ini melakukan studi pustaka, observasi penelitian, dan wawancara mendalam dengan Kepala Museum untuk mendalami benteng ini dibangun oleh siapa (VOC), periode kapan (kolonialisme Belanda), dan berfungsi sebagai apa (tempat perlindungan Jan Pieter Zoen Coen dan pasukan Belanda ketika Inggris melawan Banten abad 17).

Pada Tataran II, Penanda 2 atau Interpretan 1 adalah Benteng Jayakarta tempat terjadinya peristiwa perang Inggris vs Banten abad 17, yang mengacu pada Pertanda 2 benteng tidak hanya sebagai benteng pertahanan, tapi benteng tempat berperang. Pada Tataran III, Penanda 3 atau Interpretan 2 adalah Benteng Jayakarta tempat perang abad 17 untuk mengusir penjajah, dengan asosiasi penalaran bahwa peristiwa

perang itu mengacu pada Pertanda 3 bahwa Benteng Jayakarta adalah tempat upaya orang Banten berperang dalam hal menentang kolonialisme.

Dari pendalaman pemaknaan adanya simbol perjuangan sejarah itu, maka kajian ini menentukan bahwa Benteng Jayakarta adalah objek *defense heritage* bagi bangsa Belanda, namun juga bagi bangsa Indonesia, sebab secara tak kasat mata, sejarah Benteng Jayakarta melengkapi narasi sejarah kolonialisme Belanda di Indonesia dan juga sebagai pelengkap narasi sejarah nasional, terutama sejarah orang Banten karena masyarakat Banteng berperang di benteng itu.

b. Museum Fatahillah dan Kompleks Kota Tua Jakarta



Gambar 4.10 Analisis Makna *Defense Heritage* Museum Fatahillah dan Kompleks Kota Tua Jakarta

Sumber: Olahan peneliti, 2021

Museum Fatahillah (Museum Sejarah Jakarta) adalah bangunan yang tak terpisahkan dengan kompleks Kota Tua Jakarta. Museum Fatahillah memiliki koleksi antara lain berupa meriam, replika tugu (sejak zaman Tarumanegara), prasasti, keramik, dan mural. Berdasarkan informan Kepala Museum Fatahillah, di gedung Museum Fatahillah inilah Pangeran Diponegoro pernah ditahan sebelum dibawa ke Manado. Data itu dilakukan validasi dengan mempelajari literatur tentang Pangeran Diponegoro karya Peter Carey (Carey, 2020).

Pada Tataran I, Penanda 1 adalah Museum Fatahillah di kawasan Kota Tua Jakarta yang memiliki asosiasi penalaran pengantar bahwa museum adalah situs atau

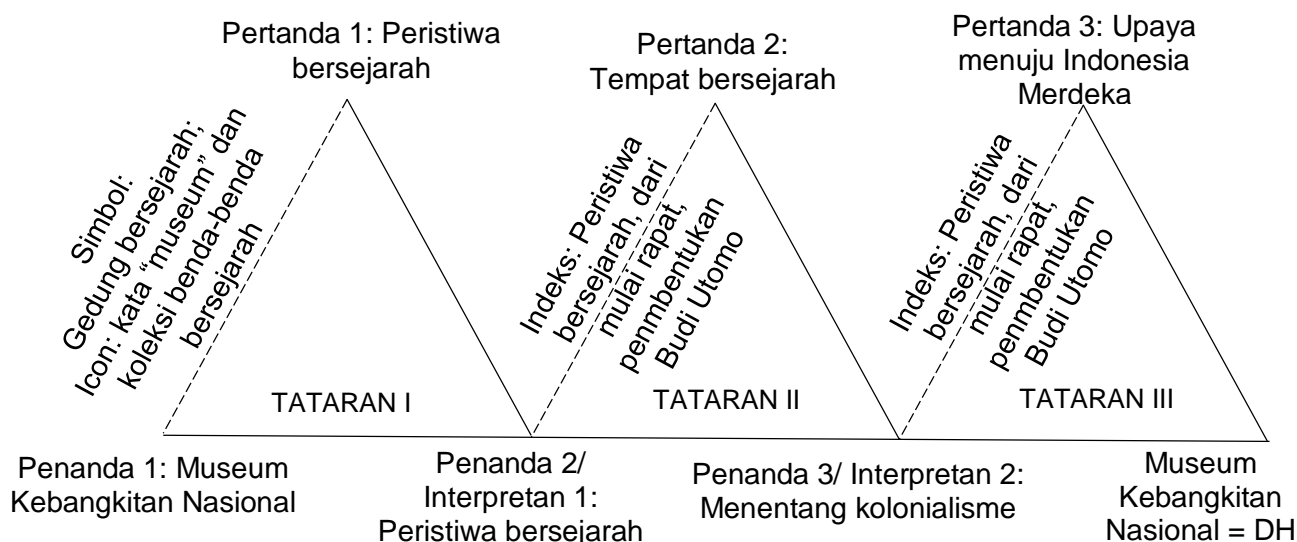
kawasan bersejarah atau tempat terjadinya peristiwa bersejarah, yang mengacu pada Pertanda 1 Museum Fatahillah sebagai situs bersejarah. Secara Penanda 1, Museum Fatahillah berupa gedung museum (simbol) dan juga dari segi nama terdapat kata “museum” dan terdapat koleksi benda-benda bersejarah (icon), sehingga muncul penalaran pertama adalah asumsi yang diterima dan disepakati secara umum bahwa Museum Fatahillah di kompleks Kota Tua adalah situs bersejarah yang memiliki koleksi peninggalan bersejarah.

Kajian ini melakukan studi pustaka, observasi penelitian, dan wawancara mendalam dengan kepala museum untuk mendalami Museum Fatahillah ini dibangun oleh siapa (pemerintah Belanda), periode kapan (kolonialisme Belanda), dan berfungsi sebagai apa (awalnya adalah sebagai Balai kota pertama di Jakarta). Sejarah Museum Fatahillah dan kompleks Kota Tua Jakarta secara memori-tempat terdapat sejarah perjuangan kota Jakarta, dari mulai bernama Jayakarta, Batavia, hingga Jakarta yang diceritakan dengan lengkap pada buku “Kota Tua Punya Cerita” (Karim, dkk., 2012).

Pada Tataran II, Penanda 2 atau Interpretan 1 adalah Museum Fatahillah tempat terjadinya peristiwa bersejarah, yakni adanya narasi peristiwa ditangkapnya Pangeran Diponegoro (indeks) dan penjara tempat pengasingan (icon) Pangeran Diponegoro sebelum dibawa ke Manado. Kedua penalaran ini mengacu pada Pertanda 2 Museum Fatahillah sebagai situs atau kawasan bersejarah. Pada Tataran III, Penanda 3 atau Interpretan 2 adalah Museum Fatahillah tempat terjadinya peristiwa bersejarah dengan adanya penahanan Pangeran Diponegoro yang menentang kolonialisme mengacu pada Pertanda 3 bahwa Nusantara menentang kehadiran Belanda.

Dari pendalaman pemaknaan adanya simbol perjuangan sejarah itu, maka kajian ini menentukan bahwa Museum Fatahillah dan kompleks Kota Tua Jakarta adalah objek *defense heritage* bagi bangsa Indonesia, sebab memori-tempat Kota Tua Jakarta bagi orang Jakarta dapat melengkapi narasi sejarah kolonialisme Belanda di Indonesia dan juga sebagai pelengkap narasi sejarah nasional, terutama sejarah identitas orang Jakarta.

c. Museum Kebangkitan Nasional



Gambar 4.11 Analisis Makna *Defense Heritage* Museum Kebangkitan Nasional

Sumber: Olahan peneliti, 2021

Museum Kebangkitan Nasional berada pada sebuah kompleks bangunan peninggalan kolonial Belanda yang pernah dipergunakan sebagai tempat pendidikan kedokteran "STOVIA" (*School Tot Oplending Van Inlandsche Artsen*) yaitu sekolah kedokteran bumi putera. Awal berdirinya pendidikan kedokteran di Indonesia ini, ada kaitannya dengan pemberantasan berbagai penyakit menular (tipus, kolera, disentri dan lain-lain) yang tersebar di daerah Banyumas dan Purwokerto pada 1847. Wabah penyakit tersebut tidak dapat diberantas oleh tenaga medis pemerintahan Hindia Belanda yang jumlahnya terbatas, begitu juga dengan cara pengobatan yang telah ada pada waktu itu (tradisional), sehingga ada usul dari Kepala Jawatan Kesehatan waktu itu Dr. W. Bosch untuk mendidik beberapa anak Bumiputra menjadi pembantu dokter Belanda (Kemdikbud RI, 2018). Beberapa peristiwa bersejarah terjadi di Gedung Kebangkitan Nasional, terutama pada tanggal 20 Mei 1908 para pelajar STOVIA mendeklarasikan berdirinya organisasi modern pertama Boedi Oetomo.

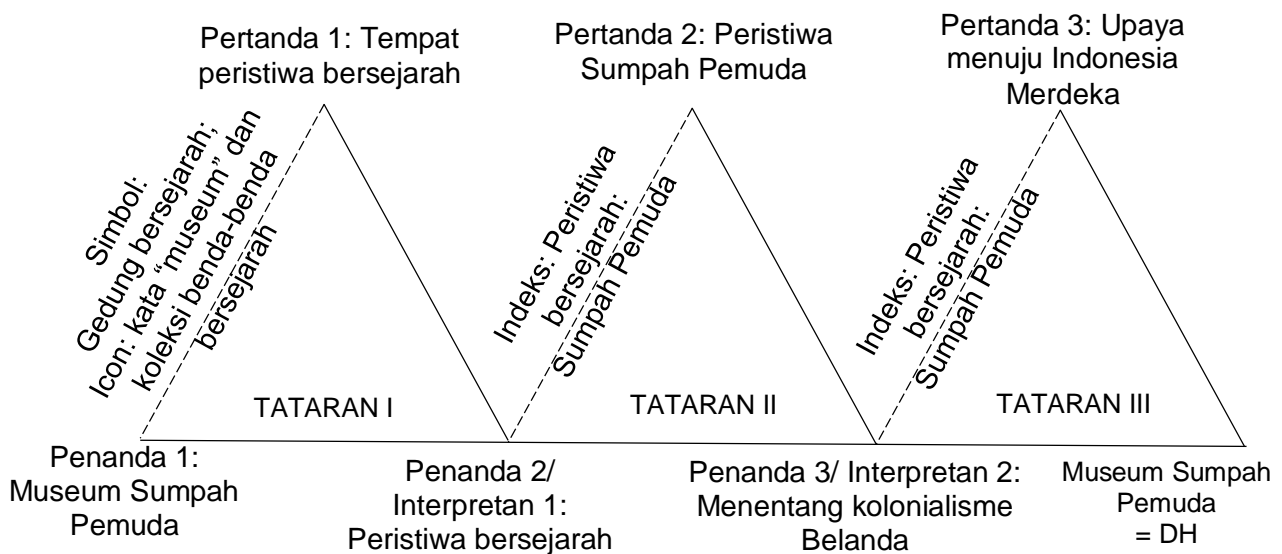
Pada Tataran I, Penanda 1 adalah Museum Kebangkitan Nasional yang mengacu pada Pertanda 1 Museum Kebangkitan Nasional tempat terjadinya peristiwa bersejarah. Prosesnya adalah muncul penalaran pertama adalah asumsi yang diterima dan disepakati secara umum bahwa Museum Kebangkitan Nasional adalah museum sebagai gedung bersejarah (simbol) dan bernama "museum" yang diasumsikan memiliki koleksi benda-benda peninggalan bersejarah (icon). Kajian ini

melakukan studi pustaka, observasi penelitian, dan wawancara mendalam dengan staf museum untuk mendalami museum dibangun oleh siapa (pemerintahan Belanda), periode kapan (kolonialisme Belanda), dan berfungsi sebagai apa (awalnya sekolah kedokteran lalu menjadi tempat deklarasi Boedi Oetomo).

Pada Tataran II, Penanda 2 atau Interpretan 1 adalah Museum Kebangkitan Nasional tempat adanya peristiwa bersejarah, dengan asosiasi perantara penalaran adanya rapat-rapat para tokoh pejuang bangsa dan deklarasi pembentukan organisasi Boedi Oetama, yang mengacu pada Pertanda 2 bahwa Museum Kebangkitan Nasional adalah tempat terjadinya peristiwa bersejarah. Pada Tataran III, Penanda 3 atau Interpretan 2 adalah Museum Kebangkitan Nasional tempat adanya peristiwa bersejarah dalam hal menentang kolonialisme Belanda. Peristiwa bersejarah yang terjadi kemudian mengacu pada Pertanda 3 bahwa Museum Kebangkitan Nasional adalah tempat atau saksi sejarah adanya perjuangan untuk membuat Indonesia merdeka.

Secara pendalaman penanda, Museum Kebangkitan Nasional adalah memori-tempat bangsa Indonesia sebagai situs bersejarah yang punya fungsi menghidupkan peristiwa bersejarah yang terjadi (tempat para tokoh pejuang berkumpul dan melakukan diskusi-diskusi kenegaraan), maka secara pedalaman pertanda, Museum Kebangkitan Nasional adalah bagian dari sejarah diplomasi pertahanan negara Indonesia. Oleh sebab itu kajian ini menentukan bahwa wilayah tempat Museum Kebangkitan Nasional berada, gedung Museum Kebangkitan Nasional, beserta koleksi di dalamnya secara keseluruhan dan kesatupaduan adalah objek *defense heritage* di kota Jakarta.

d. Museum Sumpah Pemuda



Gambar 4.12 Analisis *Defense Heritage* Museum Sumpah Pemuda

Sumber: Olahan peneliti, 2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2015 Tentang OTK Museum Sumpah Pemuda bahwa Museum Sumpah Pemuda dipimpin oleh seorang Kepala yang merupakan jabatan struktural Eselon IV/A. Museum Sumpah Pemuda memiliki koleksi antara lain biola W.R Supratman, replika panitia Kongres 27-28 Oktober 1928, replika Sangsaka Merah Putih, dan Monumen Persatuan Pemuda (Kepala Museum, 2018).

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.PM.46/OT.001/MKP 2012 tertanggal 7 September 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Museum Sumpah Pemuda mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, perawatan, pengawetan, penelitian, penyajian, penerbitan hasil penelitian dan memberikan bimbingan edukatif kultural mengenai nilai sejarah, budaya dan ilmiah tentang sejarah Sumpah Pemuda.

Museum Sumpah Pemuda telah memiliki Rencana strategis Museum Sumpah Pemuda, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kebudayaan beserta Jajaran dibawahnya. Dengan demikian, program dan rencana kegiatan yang disusun sejalan dengan Visi dan Misi Direktorat Jenderal Kebudayaan beserta Jajaran dibawahnya dalam mendukung Visi dan Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Dirjen Pelestarian Cagar Budaya&Permuseuman, 2020).

Secara sumber daya manusia, Museum Sumpah Pemuda masih memerlukan 3 (tiga) orang tenaga yang memiliki latar belakang bergelar Sarjana Ilmu Sejarah yang dapat membantu dalam hal kajian koleksi. Dewasa ini Museum Sumpah Pemuda hanya memiliki 1 (satu) orang pascasarjana bergelar permuseuman. Kemudian sertifikat kepemilikan tanah dan gedung Museum Sumpah Pemuda masih atas nama orang yang sama, yaitu Sie Kong Liang (Renstra Museum Sumpah Pemuda 2015-2019).

Museum Sumpah Pemuda memiliki peralihan fungsi yang paling banyak di antara objek *defense heritage* lainnya di kota Jakarta, berawal dari rumah tinggal pada awal abad 20, kantor organisasi pergerakan pemuda, Indonesische Clubhuis atau Clubgebouw tahun 1927, Gedung Sumpah Pemuda tahun 1928, disewakan sebagai rumah tinggal 1934-1937, toko bunga 1937-1948, hotel Hersia 1948-1951, dan setelah kemerdekaan disewakan kepada negara sebagai kantor inspektorat bea dan cukai tahun 1951-1970, dan kemudian menjadi Museum Sumpah Pemuda. Pada tanggal 3 April 1973, Gedung Kramat 106 dipugar Pemda DKI Jakarta. Pemugaran selesai 20 Mei 1973. Gedung Kramat 106 kemudian dijadikan museum dengan nama Gedung Sumpah Pemuda (Kepala Museum, 2020).

Pada Tataran I, Penanda 1 adalah Museum Sumpah Pemuda yang mengacu pada Pertanda 1 Museum Sumpah Pemuda sebagai tempat terjadinya peristiwa bersejarah. Proses pemaknaanya muncul penalaran pertama adalah asumsi yang diterima dan disepakati secara umum bahwa Museum Sumpah Pemuda sebagai gedung bersejarah (simbol) dan memiliki kata "museum" dengan asumsi memiliki koleksi peninggalan benda-benda bersejarah (icon). Kajian ini melakukan studi pustaka, observasi penelitian, dan wawancara mendalam dengan staf museum untuk mendalami museum ini dibangun oleh siapa (rumah tinggal Sie Kong Liang sejak abad 20), periode kapan (kolonialisme Belanda), dan berfungsi sebagai apa (awalnya rumah tinggal, sekolah kedokteran STOVIA, RS, lalu basisnya pergerakan tokoh-tokoh pemuda yang tinggal, berdiskusi, dan merumuskan bangsa dan negara Indonesia). Tokoh-tokoh pemuda tersebut antara lain Muhammad Yamin dan Amir Sjarifoedin.

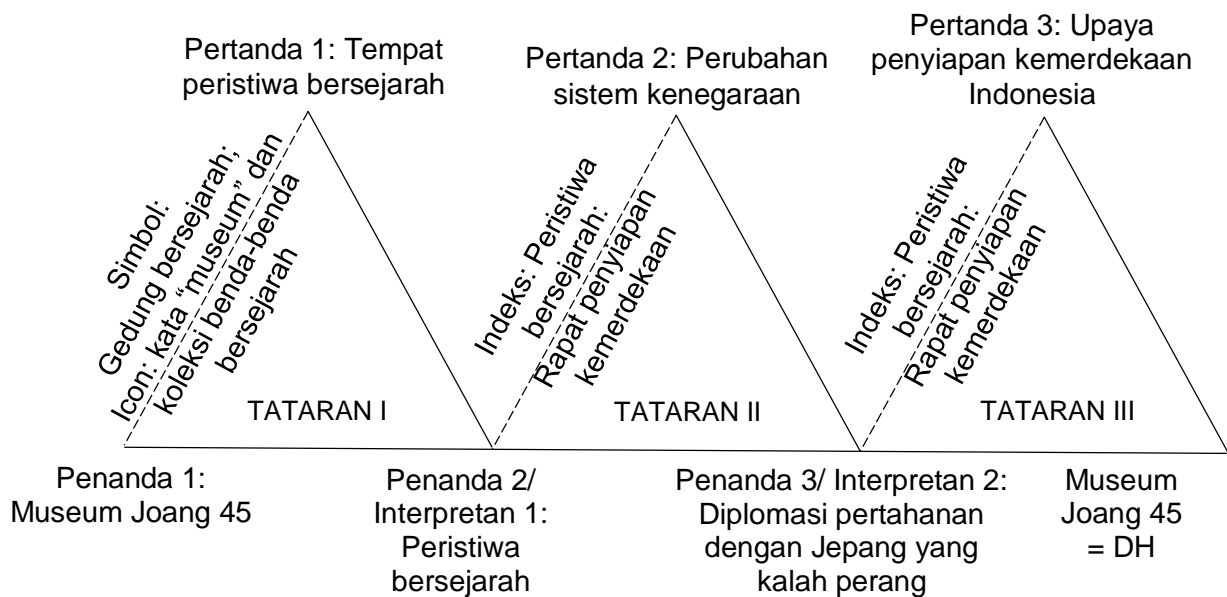
Pada Tataran II, Penanda 2 atau Interpretan 1 adalah Museum Sumpah Pemuda yang punya peristiwa bersejarah, dengan asosiasi penalaran adanya rapat-rapat perjuangan para tokoh bangsa dan tempat dilakukannya kongres pemuda yang merumuskan Sumpah Pemuda. Hal ini kemudian mengacu pada Pertanda 2 Museum

Sumpah Pemuda sebagai tempat bersejarah. Pada Tataran III, Penanda 3 atau Interpretan 2 adalah Museum Sumpah Pemuda tempat dirumuskannya Sumpah Pemuda sebagai sebuah Gerakan menentang kolonialisme Belanda, dengan asosiasi penalaran peristiwa bersejarah yang terjadi, mengacu pada Pertanda 3 adanya upaya menuju kemerdekaan Indonesia atau adanya narasi Indonesia Merdeka.

Secara pendalaman penanda, Museum Sumpah Pemuda adalah memori-tempat bangsa Indonesia sebagai situs bersejarah yang punya fungsi menghidupkan peristiwa bersejarah yang terjadi (tempat para tokoh pejuang berkumpul dan melakukan diskusi-diskusi kenegaraan), maka secara pedalaman pertanda, Museum Joang 45 adalah bagian dari sejarah diplomasi pertahanan negara Indonesia. Oleh sebab itu kajian ini menentukan bahwa wilayah tempat Museum Sumpah Pemuda berada, gedung Museum Sumpah Pemuda, beserta koleksi di dalamnya secara keseluruhan dan kesatupaduan adalah objek *defense heritage* di kota Jakarta.

Lahirnya Sumpah Pemuda merupakan tahap pencapaian luar biasa bermakna mengingat sangat tidak mudahnya “mempersatukan” bangsa yang berasal dari berbagai etnik, yang pada dasarnya merupakan ‘bangsa’ (nation) sendiri. Namun faktor pendorongnya dapat ditemukan di dalam pengalaman penjajahan yang dirasakan bersama di hampir seluruh bumi Nusantara (Zuhdi, 2014, p.43). Apabila bangunan Museum Sumpah Pemuda tersebut hilang, hancur, atau rusak, maka koleksi-koleksi di dalamnya akan ikut terdampak. Serta apabila dilakukan pembangunan gedung baru, maka memori-tempat di dalam Sumpah Pemuda tetaplah ada di dalam benak orang Indonesia, dan hal itu tidak akan pernah tergantikan oleh gedung paling megah sekalipun.

e. Museum Joang 45



Gambar 4.13 Analisis Makna *Defense Heritage* Museum Joang 45

Sumber: Olahan peneliti, 2021

Museum Joang 45 adalah museum yang terletak di Jalan Menteng Raya No.31. Museum ini menjadi memori-tempat bangsa Indonesia terutama hari-hari menjelang kemerdekaan, sebab letaknya yang strategis untuk berkumpul dan berdiskusi kenegaraan. Awalnya gedung Museum Joang 45 adalah hotel swasta 1920-1938 milik tuan L.C. Schomper orang Belanda. Ketika zaman pendudukan Jepang, hotel dialihfungsikan menjadi Departemen Propaganda Jepang atau dikenal dengan nama Gedung Menteng 31.

Gedung ini menjadi markas program pendidikan politik yang diadakan bagi sejumlah tokoh pemuda yang berperan di era kemerdekaan, antara lain Sukarni, Chaerul Saleh, A.M Hanafi dan Adam Malik. Mereka lebih dikenal sebagai 'Pemoeda Menteng 31', yang menjadi aktor dibalik penculikan Soekarno, Hatta dan Fatmawati ke Rengasdengklok sehari sebelum kemerdekaan. Tokoh-tokoh pemuda tersebut dibina oleh Soekarno, Hatta, Moh. Yamin, Sunaryo dan Achmad Subarjo (Kepala Museum, 2020).

Di Museum Joang 45 dipamerkan sejumlah lukisan tentang peristiwa seputar proklamasi kemerdekaan RI. Terdapat pula beberapa diorama, antara lain yang menggambarkan suasana Gedung Menteng 31 pada masa kemerdekaan dan orasi Soekarno dalam Rapat Besar di Lapangan IKADA (sekarang pojok timur kawasan Monas) pada 19 September 1945. Ada pula arsip dokumentasi berupa foto-foto dan

patung dada dari para tokoh pergerakan kemerdekaan. Koleksi lainnya yang terdapat di museum ini adalah tiga kendaraan kepresidenan yang digunakan Presiden dan Wakil Presiden pertama RI. Selain dokumentasi sejarah, Museum Joang 45 dilengkapi berbagai fasilitas, antara lain ruang pameran tetap dan temporer disertai pojok multimedia, bioskop Joang 45 yang menayangkan berbagai film bertema perjuangan dan dokumenter, perpustakaan referensi sejarah, *children room* yang berisi aneka *games*, foto studio, *souvenir shop* dan plaza *outdoor* untuk aktivitas teater anak (Kepala Museum, 2020).

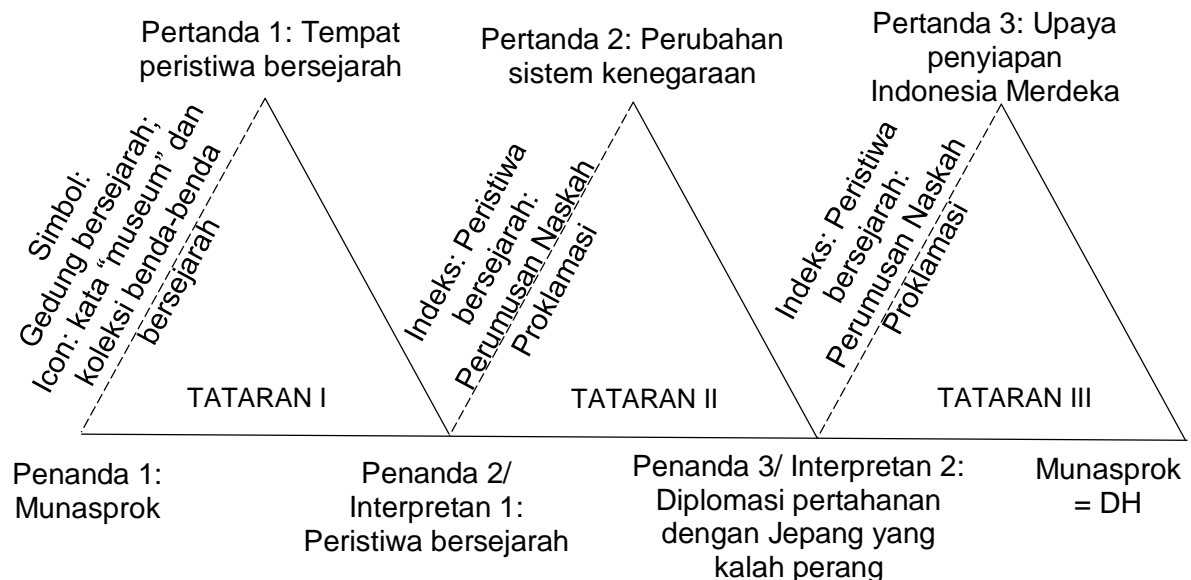
Pada Tataran I, Penanda 1 adalah Museum Joang 45 dengan asosiasi penalaran perantara Museum Joang 45 sebagai gedung bersejarah (simbol) dan kata “museum” dengan asumsi adanya koleksi peninggalan benda-benda bersejarah (icon), untuk mengacu kepada Pertanda 1 bahwa Museum Joang 45 adalah gedung bersejarah. Secara penanda, Museum Joang 45 berupa museum (simbol), sehingga muncul penalaran pertama adalah asumsi yang diterima dan disepakati secara umum bahwa Museum Joang 45 adalah museum yang memiliki koleksi peninggalan bersejarah. Kajian ini melakukan studi pustaka, observasi penelitian, dan wawancara mendalam dengan staf museum untuk mendalami museum dibangun oleh siapa (pengusaha Belanda), periode kapan (kolonialisme Belanda), dan berfungsi sebagai apa (awalnya adalah sebagai hotel kemudian kantor pertahanan Jepang, lalu kemudian *basecamp* para pejuang dan tokoh pergerakan menjelang hari-hari kemerdekaan).

Pada Tataran II, Penanda 2 atau Interpretan 1 adalah Museum Joang 45 tempat peristiwa bersejarah dengan asosiasi penalaran perantara adanya rapat-rapat tokoh pejuang bangsa merumuskan kemerdekaan Indonesia, yang mengacu pada Pertanda 2 adanya perubahan sistem kenegaraan. Pada Tataran III, Penanda 3 atau Interpretan 2 adalah Museum Joang 45 tempat adanya diplomasi pertahanan dengan Jepang yang kalah perang, dengan asosiasi adanya rapat-rapat tokoh pejuang bangsa merumuskan kemerdekaan Indonesia, yang mengacu pada Pertanda 3 yakni adanya upaya penyiapan Indonesia Merdeka.

Secara pendalaman penanda, Museum Joang 45 adalah memori-tempat bangsa Indonesia sebagai situs bersejarah yang punya fungsi menghidupkan peristiwa bersejarah yang terjadi (rapat-rapat tokoh pejuang mempersiapkan kemerdekaan), maka secara pedalaman pertanda, Museum Joang 45 adalah bagian dari sejarah diplomasi pertahanan negara Indonesia.

Oleh sebab itu kajian ini menentukan bahwa wilayah tempat Museum Joang 45 berada, gedung Museum Joang 45, beserta koleksi di dalamnya secara keseluruhan dan kesatupaduan adalah salah satu objek *defense heritage* di kota Jakarta.

f. Museum Perumusan Naskah Proklamasi



Gambar 4.14 Analisis Makna *Defense Heritage* Museum Perumusan Naskah Proklamasi (Munasprok)

Sumber: Olahan peneliti, 2021

Pada Tataran I, Penanda 1 adalah Museum Perumusan Naskah Proklamasi (Munasprok) berupa museum, sehingga muncul penalaran pertama adalah asumsi yang diterima dan disepakati secara umum bahwa Munasprok adalah gedung bersejarah (simbol) dan kata "museum" sehingga memiliki koleksi peninggalan benda-benda bersejarah (icon), yang mengacu pada Pertanda 1 Munasprok adalah tempat terjadinya peristiwa bersejarah. Kajian ini melakukan studi pustaka, observasi penelitian, dan wawancara mendalam dengan staf museum untuk mendalami museum ini dibangun oleh siapa (Belanda), periode kapan (tahun 1920 periode kolonialisme Belanda), dan berfungsi sebagai apa (awalnya kantor asuransi, lalu beralih fungsi menjadi kediaman Laksda Maeda yang kemudian membiarkan rumahnya menjadi tempat perumusan naskah Proklamasi).

Pada Tataran II, Penanda 2 atau Interpretan 1 adalah Munasprok punya nilai peristiwa bersejarah dengan asosiasi penalaran perantara rapat-rapat para tokoh bangsa untuk merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan, yang mengacu pada Pertanda 2 Munasprok sebagai wujud adanya perubahan sistem kenegaraan. Pada

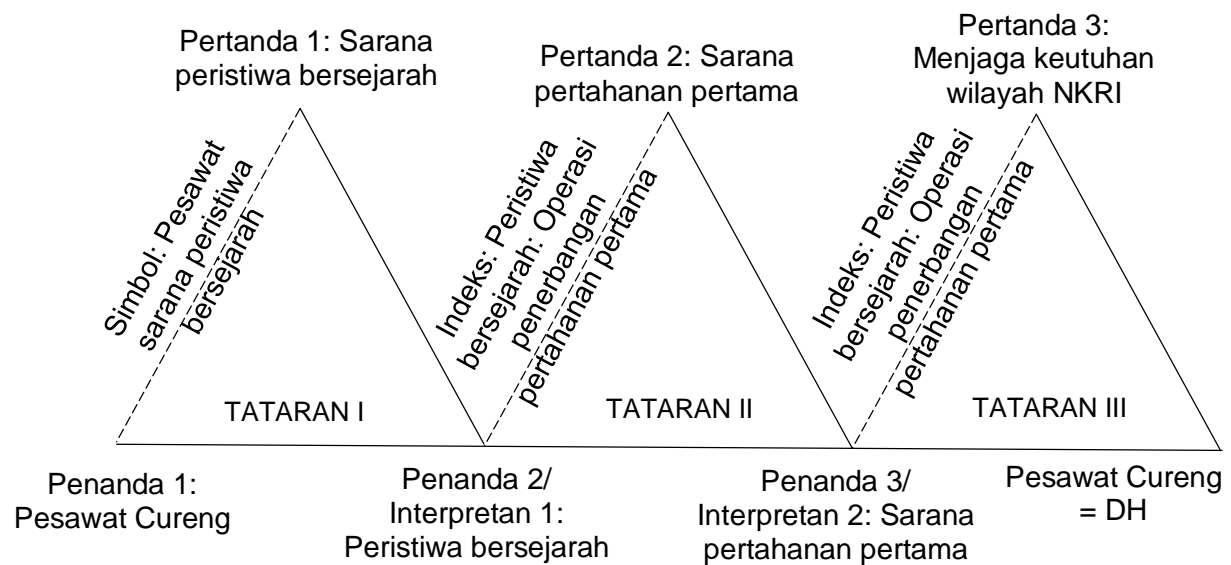
Tataran III, Penanda 3 atau Interpretan 2 Munasprok adalah sebagai tempat terjadinya diplomasi pertahanan dengan Jepang yang sudah kalah perang, dengan asosiasi penalaran perantara adanya rapat-rapat para tokoh bangsa untuk merumuskan naskah proklamasi, yang mengacu pada Pertanda 3 yakni upaya penyiapan menuju Indonesia Merdeka.

Secara pendalaman penanda, Munasprok adalah memori-tempat bangsa Indonesia sebagai situs bersejarah yang punya fungsi menghidupkan peristiwa bersejarah yang terjadi (perumusan naskah Proklamasi), maka secara pedalaman pertanda, Munasprok adalah bagian dari sejarah diplomasi pertahanan negara Indonesia. Oleh sebab itu kajian ini menentukan bahwa wilayah tempat Museum Perumusan Naskah Proklamasi berada, gedung Munasprok berada, beserta koleksi di dalamnya secara keseluruhan dan kesatupaduan adalah salah satu objek *defense heritage* di kota Jakarta.

Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 merupakan tonggak penopang “ingatan kolektif” (collective memory) yang berfungsi mengikat semangat persatuan bangsa dan menyatukan seluruh wilayah dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas hingga Rote sebagai wilayah NKRI. Perjalanan panjang bangsa di kepulauan untuk membebaskan diri dari penjajahan telah berlangsung sejak abad-abad sebelumnya (Zuhdi, 2014, p.45).

Secara analisis *defense heritage* yang berkaitan dengan memori-tempat, maka Museum Satria Mandala tidak bisa secara langsung menjadi objek *defense heritage*, walaupun di dalam museum itu terdapat objek-objek *defense heritage* misalnya koleksi peralatan perang di Indonesia, kecuali ada penelitian ilmiah yang bisa membuktikan bahwa pada wilayah dan gedung Museum Satria Mandala terdapat perjuangan bangsa yang terjadi, bukan hanya sekedar rumah tempat tokoh bangsa (Ibu Negara Ratna Dewi Soekarno). Sebagai contohnya objek *defense heritage* di Museum Satria Mandala adalah pesawat Cureng yang pernah diterbangkan Marsekal Udara Agustinus Adisucipto pada Agresi Militer Belanda I. Analisisnya adalah sebagai berikut.

g. Pesawat Cureng koleksi Museum Satria Mandala



Gambar 4.15 Analisis Makna *Defense Heritage* Pesawat Cureng koleksi Museum Satria Mandala

Sumber: Olahan peneliti, 2021

Museum Satria Mandala terletak di Jalan Jenderal Gatot Subroto no.14, Jakarta Selatan. Gedung museum ini sebelumnya dikenal sebagai Wisma Yaso yaitu tempat kediaman Ratna Sari Dewi Soekarno dan tempat Bung Karno disemayamkan sebelum dimakamkan di Blitar, Jawa Timur. Di dalam museum terdapat 74 diorama yang menggambarkan peranan TNI dalam membela dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Satu diantaranya adalah diorama yang menggambarkan tentang Pertempuran Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Masih dalam kompleks Museum Satriamandala terdapat Gedung Waspada Purbawisesa menyajikan diorama yang menggambarkan perjuangan TNI bersama-sama rakyat menumpas gerombolan separatis DI/TII di Jawa Barat, Jawa Tengah, Aceh, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi pada tahun 60-an (KabidDok Pusjarah TNI, 2020).

Di Museum Satria Mandala juga tersimpan berbagai benda sejarah yang berkaitan dengan perjuangan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dari tahun 1945 sampai sekarang, seperti aneka senjata berat maupun ringan, atribut ketentaraan, panji-panji dan lambang-lambang di lingkungan TNI, kendaraan perang seperti tank dan panser, berbagai jenis pesawat terbang peninggalan masa lalu. Satu diantaranya adalah pesawat Cureng yang pernah diterbangkan oleh Agustinus Adisutjipto serta tandu yang dipergunakan Panglima Besar Jenderal Sudirman saat bergerilya

melawan penjajah (KabidDok Pusjarah TNI, 2020). Penerbangan pantau daerah selatan oleh Agustinus Adisucipto pada 16 Januari 1946 adalah operasi penerbangan pertama dalam rangka misi pertahanan di Indonesia merdeka.

Pada Tataran I, Penanda 1 adalah pesawat cureng yang ditampilkan di Museum Satria Mandala, dengan asosiasi penalaran pesawat sebagai sarana peristiwa bersejarah, yang mengacu pada Pertanda 1 adanya peristiwa bersejarah di balik pesawat cureng itu. Pada Tataran II, Penanda 2 atau Interpretan 1 adalah pesawat cureng sebagai sarana peristiwa bersejarah memiliki asosiasi penalaran adanya peristiwa bersejarah 16 Januari 1946 ketika Agustinus Adisucipto melakukan penerbangan pantau daerah selatan pasca kemerdekaan Indonesia. Peristiwa ini adalah operasi penerbangan pertama dalam rangka misi pertahanan di Indonesia merdeka, yang mengacu pada Pertanda 2 bahwa pesawat cureng sebagai sarana pertahanan pertama.

Pada Tataran III, Penanda 3 atau Interpretan 2 adalah pesawat cureng sebagai sarana pertahanan pertama, yang memiliki asosiasi penalaran peristiwa operasi penerbangan pertama pasca Indonesia merdeka tanggal 16 Januari 1946, yang mengacu pada Pertanda 3 bahwa pesawat cureng itu dipakai untuk menjaga keutuhan wilayah NKRI. Pesawat cureng adalah objek *defense heritage* bangsa Indonesia.

Upaya pemberian makna pada pesawat cureng ini dapat diterapkan pada defense pada Monumen Tugu Sitarda Akabri 1970 di Jalan Bantarsari, Blok Gunung Goong, Kelurahan Cibunigeulis, Kecamatan Bungursari, Perum Mega Mutiara Tasik Regensi, kota Tasikmalaya, yang dibangun oleh peguyuban alumni Akabri Pertama tahun 1970. Pembangunan monumen ini bermaksud meningkatkan kesadaran kemanunggalan TNI dengan rakyat yang menjadikan kuatnya dimensi pertahanan dan keamanan negara Indonesia (Subagyo, 2020, p.56-58).

Upaya pemberian makna pada objek-objek *defense heritage* perlu dilakukan sebagai analisis awal pendataan keberadaan *defense heritage*, sebelum diusulkan model pengelolaan *defense heritage* sebagai sarana program bela negara. Setelah mengetahui adanya objek-objek *defense heritage* di 2 (dua) locus utama, selanjutnya akan dibahas tentang bagaimana kategorisasi level *defense heritage*, kemudian penempatan *defense heritage* ke dalam sistem pertahanan negara, dan menunjukkan model pengelolaan *defense heritage* sebagai sarana program bela negara.

4.3.2 Model Pengelolaan Cagar Budaya Bernilai Pertahanan (*Defense Heritage*) Sebagai Sarana Program Bela Negara

Defense heritage merupakan pengembangan dari teori *cultural heritage* UNESCO. Secara kebendaan, *defense heritage* adalah benda-benda, struktur bangunan, atau benteng pertahanan yang dipandang dari perspektif pertahanan atau sejarah yang penting bagi bangsa itu (Francoise, 2018 dan Munandar, 2019).

Suatu tempat yang memiliki memori perjuangan bangsa atau sejarah pertahanan nasional juga termasuk ke dalam *defense heritage* bagi negara yang bersangkutan, walaupun bukan merupakan *Cultural Heritage* dan bukan merupakan *World Heritage* UNESCO. Syarat-syaratnya yang ideal antara lain diwariskan secara turun-temurun, dipreservasi secara berkala, dan diakui secara hukum oleh negara yang bersangkutan.

Indonesia belum melakukan pembedaan antara cagar budaya dengan cagar budaya bernilai pertahanan (*defense heritage*), sehingga Indonesia belum memiliki model pengelolaan cagar budaya bernilai pertahanan (*defense heritage*) sebagai sarana program bela negara.

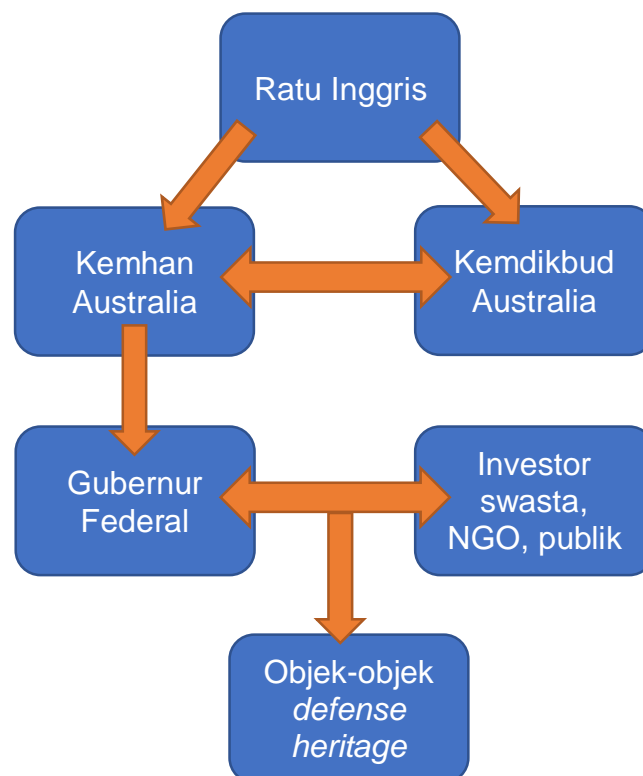
Negara-negara maju yang memiliki konsep *war heritage* atau *military heritage* seperti Inggris, Australia, Amerika, dan Singapura telah memiliki skema pengelolaan *defense heritage*. Hal ini kemudian telah mengubah sistem pertahanan negara negara-negara tersebut menjadi lebih kultural, historis, dan holistik dalam memahami sejarah dunia perspektif sejarah pertahanan nasional masing-masing.

Sebagai contohnya, negara Australia telah mendefinisikan *Defense Heritage* bagi bangsa Australia, telah membentuk *Defense Heritage Council*, dan telah memiliki *Defense Heritage Tool Kit*, terutama untuk *tangible defense heritage* bagi bangsa Australia (2010). Definisi *defense heritage* yang telah dirumuskan oleh Kementerian Pertahanan Australia, yakni (Defense Gov Au, 2010):

“Defence seeks to manage heritage values on its estate consistent with the principles and requirements of Commonwealth heritage legislation. This includes the identification and management of risks to heritage during the planning, development and operation of Defence facilities (including bases and training areas). Defence is responsible for an important legacy that has been built up through its history: a legacy of land, places, buildings, memories and stories. Together these makeup a rich and valued heritage. Australia’s development and that of the Defence Forces are intrinsically linked and Defence is the steward of the nation’s largest land and property portfolio. Defence property includes places with natural and biodiversity values, places important to Indigenous people, places significant for their

Defence history and places that are important to Australia's history and cultural life. Many places have multiple values."

Dari data terbaru, salah satu dari tiga kapal penjelajah ringan yang digunakan oleh *Royal Australian Navy* (RAN) selama awal Perang Dunia II, yakni HMAS Perth, telah ditemukan dan pemerintah Australia berkomitmen menetapkan Perth sebagai kawasan konservasi maritim, serta membuka *short course heritage* sebagai kesempatan bagi pelajar untuk mempelajari *underwater heritage* (sydney.edu.au, 2021). Pengelolaan objek-objek *defense heritage* di Australia adalah sebagai berikut:



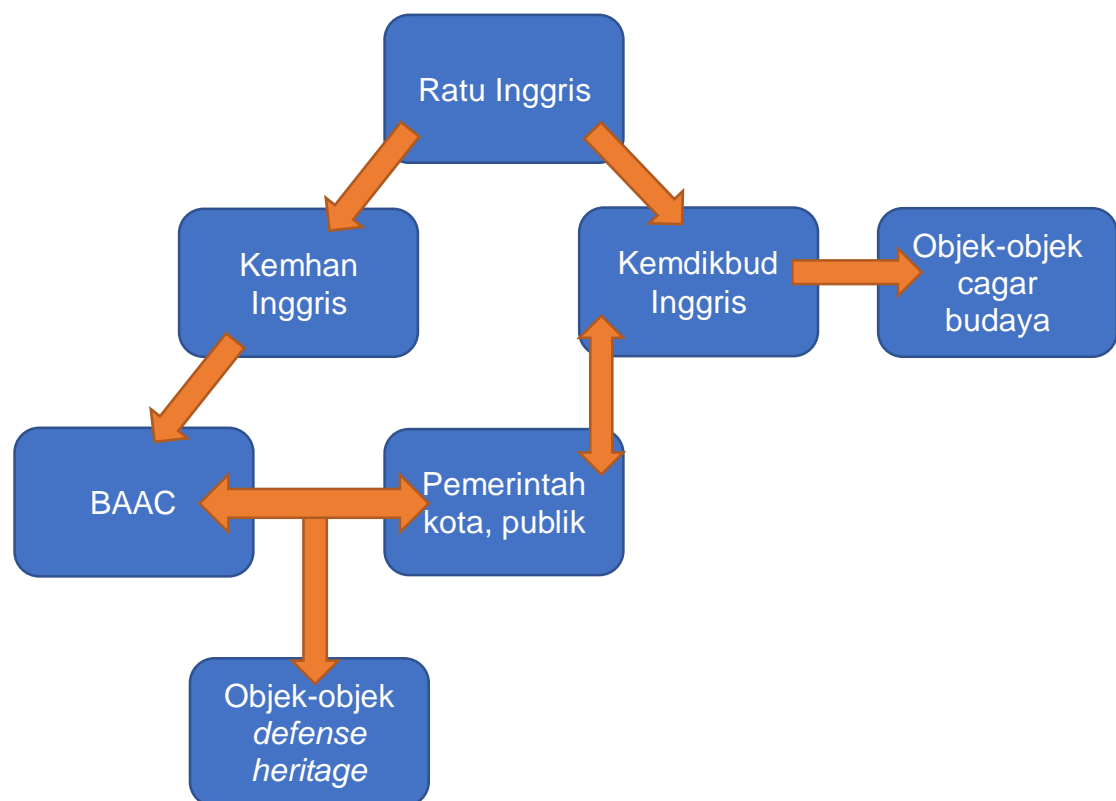
Gambar 4.16 Model Pengelolaan *Defense Heritage* di Australia

Sumber: Olahan peneliti, 2021

Pengelolaan objek-objek *defense heritage* di Australia dilakukan secara bersama-sama terutama oleh sektor Kementrian Pertahanan Australia, bekerjasama dengan Kementrian Pendidikan Australia, Gubernur Federal di setiap kota/wilayah administratif federal, Investor swasta, Lembaga non-pemerintahan, dan publik. Ratu Inggris sebagai pengawas, Kemhan Australia menentukan definisi *defense heritage* bagi bangsa Australia, melakukan penelitian-penelitian *defense heritage*, menyusun *Defense Heritage Tool Kit*, me bentuk *Defense Heritage Council*, dan menyusun program kerja secara nasional, termasuk di dalamnya menentukan detail hubungan kerja antara Kemhan dengan sektor-sektor lain.

Sementara itu partisipasi publik dalam hal ini adalah kesempatan bagi publik, terutama warga negara Australia, untuk memberikan Donasi mandiri dan juga bagi mahasiswa bisa menjadi voluntir untuk acara-acara webinar dan melakukan preservasi objek-objek cagar budaya yang membutuhkan perhatian serius, sehingga membutuhkan tenaga sumber daya manusia yang cukup banyak.

Dalam hal penelitian objek-objek *defense heritage*, Kementerian Pertahanan Kerajaan Inggris telah menciptakan unit kerja khusus dalam mengkaji *defense heritage* bernama *British Aviation Archeologist Council* (BAAC) yang fokus bertugas mencari kapal-kapal bekas perang (Holyoak, 2002, p.663 dan aviationarcheology.org.uk, 2010). Berikut model pengelolaan objek-objek *defense heritage* di Inggris.



Gambar 4.17 Model Pengelolaan *Defense Heritage* di Inggris

Sumber: Olahan peneliti, 2021

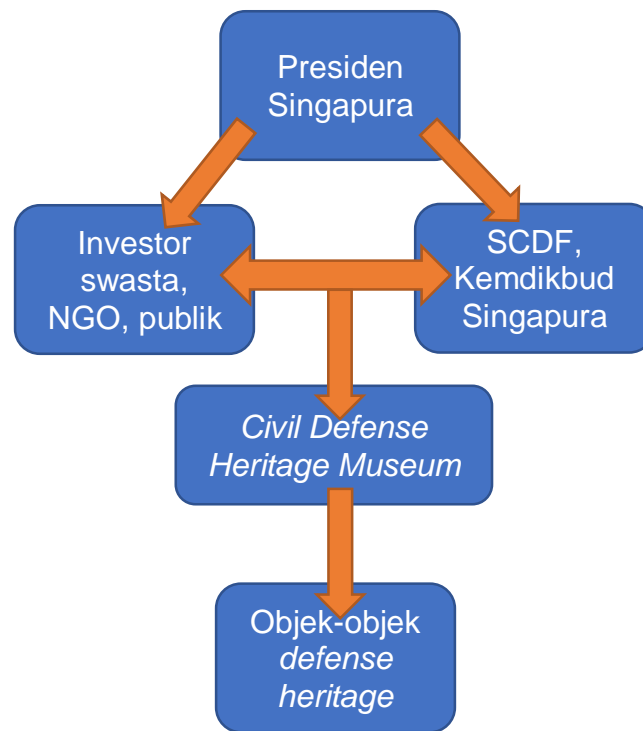
Terlihat dalam bagan bahwa Inggris melakukan pembedaan pengelolaan cagar budaya dengan cagar budaya bernilai pertahanan (*defense heritage*). Pengelolaan objek-objek *defense heritage* di Inggris dilakukan secara khusus oleh BAAC Kementerian Pertahanan Inggris sebagai sektor pimpinan, bekerjasama dengan pemerintahan kota dan publik. Ratu Inggris sebagai pengawas, BAAC Kemhan Inggris menentukan definisi *defense heritage* bagi bangsa Inggris, melakukan penelitian-penelitian *defense heritage*, menyusun *Defense Heritage Tool Kit*, membentuk *Defense*

Heritage Council, dan menyusun program kerja secara nasional, termasuk di dalamnya menentukan detail hubungan kerja antara BAAC Kemhan dengan pemerintah kota dan publik.

Partisipasi publik dalam hal ini adalah kesempatan bagi publik, terutama warga negara Inggris, untuk memberikan Donasi mandiri dan juga bagi mahasiswa bisa menjadi voluntir untuk acara-acara webinar dan melakukan preservasi objek-objek cagar budaya yang membutuhkan perhatian serius, sehingga membutuhkan tenaga sumber daya manusia yang cukup banyak.

Kajian ini memiliki data observasi lapangan bahwa objek-objek *defense heritage* di Inggris, yang berupa benda-benda sisa perang biasanya dikoleksi ke dalam Museum dan memiliki agenda khusus untuk dipamerkan sesuai tujuan penelitian kurator museum, misalnya di Imperial War Museum London terdapat agenda pameran secara urut untuk memamerkan benda-benda dan pesawat-pesawat bekas Perang Dunia I, Perang Dunia II, dan Perang Pasifik. Hal yang menarik dari model pengelolaan *defense heritage* di Inggris adalah ketika ada pameran maka tiket gratis untuk publik, termasuk turis asing luar negeri.

Di Singapura, pemaknaan *defense heritage* secara nasional dalam bentuk adanya keberadaan Museum Defense Heritage bernama *Civil Defense Heritage Gallery Museum* yang memuat koleksi lengkap sejarah pertahanan sipil bangsa Singapura. Berikut bagan model pengelolaan *defense heritage* di Singapura.



Gambar 4.18 Model Pengelolaan *Defense Heritage* di Singapura

Sumber: Olahan peneliti, 2021

Bentuk negara Singapura adalah Republik parlementer dengan Presiden sebagai kepala negara dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Kajian ini belum memiliki data yang menunjukkan terdapat peran Kemhan Singapura secara langsung dalam hal perancangan, pendanaan, dan manajemen *Civil Defense Heritage Museum* Singapura. Namun terdapat definisi yang menjelaskan bahwa museum tersebut dimiliki oleh SCDF (Dinas Pemadam Kebakaran Singapura) dan dibangun oleh investor swasta dan Donasi mandiri publik, serta terdapat kunjungan anak-anak sekolah secara rutin, sehingga diasumsikan juga terdapat peran Kementerian Pendidikan Singapura. Gedung museumnya sendiri adalah bekas gedung kantor dinas pemadam kebakaran Singapura.

Negara Prancis adalah salah satu negara yang turut membidani lahirnya ide *defense heritage* dalam UNESCO dan mengatakan bahwa “penting untuk mulai melibatkan Kementerian Pertahanan Prancis dalam hal memelihara situs-situs bersejarah bekas berbagai peperangan yang pernah terjadi di tanah Negara Prancis”. Kementerian Pertahanan Negara Prancis juga akan segera memasukkan *Defense Heritage* menjadi salah satu kajian kebijakan pertahanan negara Prancis (*Maire de Paris / Walikota Paris, 2017*). Sama seperti Indonesia, Prancis belum memiliki model pengelolaan *defense heritage* secara khusus.

Kajian ini memiliki data bahwa Indonesia di dalam RPJMP dalam UU No.17 Tahun 2007 tentang RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional) 2005-2025 hanya menyebutkan cagar budaya secara umum, bukan *defense heritage* secara khusus. RPJPN 2005-2025 berisi visi, misi, arah, tahapan, dan prioritas pembangunan dalam berbagai bidang yang berdimensi jangka panjang, serta penjabaran dan pelaksanaan RPJPN 2005- 2025 ke dalam empat periode. Empat periode yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), terdiri atas tahap pertama tahun 2005-2009, tahap kedua 2010-2014, tahap ketiga 2015-2019, dan tahap keempat 2020-2024. Upaya yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran RPJMN 2004-2009 diarahkan melalui kebijakan: menyelesaikan peraturan perundang-undangan di bidang kebudayaan; menyaring masuknya kebudayaan yang berdampak negatif terhadap fisik, psikologis, moral generasi muda khususnya dan masyarakat pada umumnya, dan terhadap martabat bangsa; menyelaraskan pembangunan ekonomi dan sosial serta pengembangan teknologi dengan nilai-nilai budaya dan warisan budaya yang ada, baik fisik maupun non-fisik (*cultural based development*); dan mengembangkan pola kemitraan pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam melestarikan benda cagar budaya, dan warisan budaya serta warisan alam (Lemhannas RI, 2020).

Dalam RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Bappenas juga hanya disebutkan salah kegiatan pokoknya adalah pelestarian kekayaan budaya dan yang meliputi sejarah, kepurbakalaan, dan benda cagar budaya, tanpa menyebutkan ada cagar budaya bernilai pertahanan (*defense heritage*). Padahal di dalam UUD 1945 Pasal 32 menempatkan bahwa "Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia, bahwa kebudayaan bangsa ialah kebudayaan yang timbul sebagai usaha budidaya rakyat Indonesia seluruhnya. Kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia, terhitung sebagai kebudayaan bangsa. Usaha kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab, budaya dan persatuan, dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia (DPR, 2020).

Kajian ini memiliki data bahwa pemaknaan *defense heritage* dapat mendukung arah kemajuan adab, budaya dan persatuan orang Indonesia di kota maupun di daerah-daerah berdasarkan memori kolektif kesamaan sejarah yang diwariskan dan

diwujudkan dalam bentuk situs, bangunan, kawasan, atau bangunan bersejarah. Untuk bisa mendapatkan pengakuan *defense heritage* ke dalam sistem negara, maka akan dijelaskan terlebih dahulu penempatan *defense heritage* di dalam Sistem Pertahanan Negara Republik Indonesia (Sishaneg RI).

Menurut Nugroho Notosusanto (1968, p.39-40), asas-asas, sifat-sifat, dan pelaksanaan pertahanan dan keamanan nasional dewasa ini adalah hasil daripada perkembangan sejarah pertahanan dan keamanan sejak dulu. Sejarah pertahanan dan keamanan nasional pada hakekatnya adalah bagian dari sejarah nasional. Kajian ini mengemukakan bahwa benda-benda mati seperti bangunan, gedung tua, situs, kawasan bersejarah, benteng pertahanan, pesawat bekas perang, dan bahkan jembatan secara akal dan logika adalah penanda dari sejarah pertahanan nasional dan mampu menjadi sarana program bela negara untuk melengkapi konsep keamanan nasional dalam hal melengkapi pemahaman identitas dan jati diri kebangsaan. Namun berdasarkan hasil penelitian, bangunan atau benteng bersejarah tersebut bagian dari masa lalu yang mengingatkan bahwa bangsa Indonesia pernah dijajah. Dalam hal mengubah masa lalu tidak akan pernah mungkin, namun kajian ini menyakinkan bahwa bangsa Indonesia bisa mengubah persepsi atau mengubah pandangan akan masa lalu yang sudah terjadi.

Berdasarkan 3 (tiga) revolusi yang ditawarkan Harari (2018), yakni Revolusi Kognitif, Revolusi Pertanian, dan Revolusi Sains, revolusi yang paling berkenaan dengan kajian ini adalah resolusi kognitif yaitu mengubah pandangan akan bangunan bersejarah atau cagar budaya, terutama bagaimana membangun sebuah gambaran konstruksi mental yang dapat menyatukan paham berbangsa dan bernegara, melengkapi konsep keamanan nasional, mempertegas program bela negara, dan mengubah perilaku masyarakat atau habitus. Dalam hal ini pertama-tama ahli pertahanan harus mampu mempertahankan argumen bahwa cagar budaya pertahanan perlu memiliki perlakuan yang berbeda dengan cagar budaya pada umumnya. Itulah kehendak bebas keilmuan untuk menentukan dan menganalisis, serta menciptakan kondisi dan perangkat sistem yang tadinya tidak ada menjadi ada (*being*).

Tourraine (2017) mengatakan di dalam setiap kehendak bebas (*logical reasoning*) terdapat rasa tanggung jawab (*moral reasoning*). Di dalam pandangan Barat, akal dan logika adalah tumpuan utama manusia dalam bertindak dan berperilaku, sebab memori, kapasitas, skill, dan intuisi manusia berasal dari cerebral

utama yang menggerakkan organ, sehingga manusia bisa bernapas, berkembangbiak, mempertahankan diri, berpolitik, bermain, tidur, dan aktivitas-aktivitas lainnya. Kesadaran manusia sebagai spesies unggul yang mampu bertahan hingga kini telah digagas jauh sebelum teori evolusi ditemukan. Manusia kemudian mampu mengembangkan kemampuannya dalam kehidupan, berkomunitas, membentuk koalisi, serta menyerang koalisi lainnya. Disinilah manusia merasa sebagai insan intelektual yang mampu mengendalikan dunia. Bahkan Louis XIV mengatakan “L'état c'est moi”.

Kompleksnya permasalahan manusia membuat manusia kemudian memikirkan solusi dengan lebih mendalam dan berdampak meluas untuk mengatasi permasalahan yang kerap kali timbul, seperti misalnya perang, kemiskinan, kelaparan, ketidakadilan, dan lain sebagainya. Timbullah peran negara yang mensyaratkan adanya tanah, pengikut, dan kesepakatan atau sistem sosial. Dalam kaitannya dengan bela negara, *moral reasoning* bela negara adalah wujud rasa cinta kepada ibu pertiwi dengan melakukan kerja atau studi sebaik-baiknya dan mengabdikan sesuai bidang keahlian dan profesi. Sementara secara logika, ada penerimaan atau konsensus umum bahwa kesadaran berbangsa dan bernegara itu muncul dengan memahami dan menghormati setiap bangunan-bangunan, simbol-simbol, atau lambang-lambang negara yang ada di sekitar manusia Indonesia berada.

Tanpa konsep *defense heritage*, pemaknaan akan bangunan bersejarah hanya akan menggali pemaknaan berdasarkan unsur-unsur budaya dan sebatas penguasaan pemahaman arkeologi yang berkenaan dengan sejarah ketika bangunan itu dibangun, tanpa ada pemaknaan lebih dalam lagi tentang apa kaitannya bangunan itu terhadap pemaknaan berkebangsaan, bernegara, dan berkemanusiaan. Hasil pemaknaan semiotis dan memori-tempat yang telah dilakukan pada objek-objek *defense heritage* di Jakarta dan Surabaya kemudian memberi ruang analisis baru bahwa *defense heritage* tidak hanya menekankan hanya pada objek atau bangunannya, tetapi keberadaan narasi di balik bangunan itu dan mungkin saja di luar bangunan itu, yang mampu melengkapi sejarah nasional Indonesia secara utuh, global, padu, dan runut. *Defense heritage* adalah syarat Indonesia memiliki sistem pertahanan yang modern dan pengadopsian *defense heritage* akan membentuk habitus baru menuju masyarakat Indonesia modern yang sadar akan keberadaan, penelitian, pemaknaan, pengelolaan, dan pemanfaatan *defense heritage*.

Dalam bukunya, *“Nama Indonesia: Penemuan Komunis?”*, Mohammad Hatta berusaha meluruskan sejarah bahwa kata “Indonesia” pertama kali dipakai oleh J.R. Logan, seorang Inggris pada tahun 1850, jauh sebelum seorang Jerman, Bastian, menuliskannya pada tahun 1884. Pengalaman Indonesia dalam konflik dalam sejarah masa kerajaan nusantara dan masa kolonial menjadi salah satu pemikiran Bung Hatta muda untuk merumuskan masa depan Indonesia ke dalam dua konsep, “Merdeka” dan “Demokrasi”. Sir Winston Churchill pernah mengatakan bahwa “Demokrasi merupakan sistem politik yang paling terbaik diantara sistem-sistem politik lain yang tidak baik” (Morgenthau, 2010). Di dalam demokrasi, unsur kebebasan merupakan unsur utama. Bahkan kehendak bebas yang datang dari *people power* di Prancis pun mampu memenggal kepala seorang Raja. Prancis sudah belajar banyak dari pertentangan panjang hubungan antara negara dan agama di abad kegelapan.

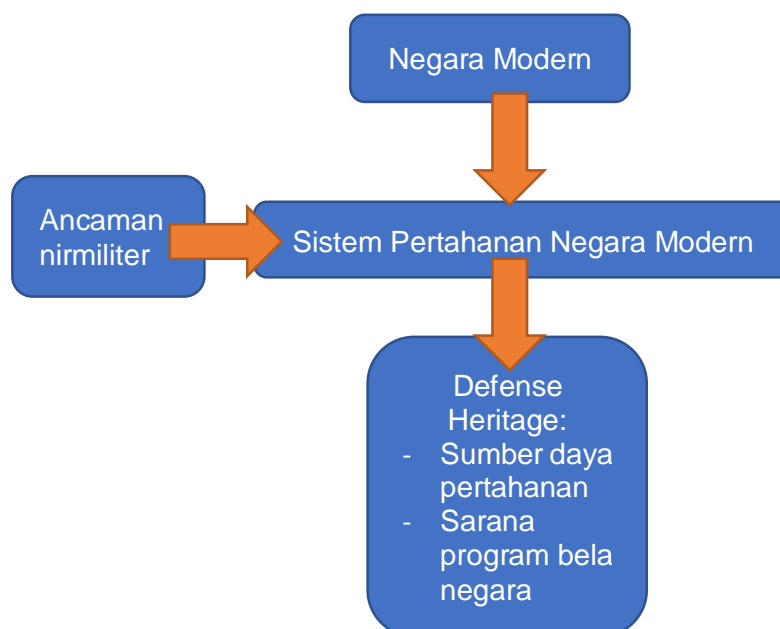
Kajian ini meyakini bahwa Indonesia sudah merdeka dan demokrasi, tapi belum menjadi negara modern. Umur demokrasi Indonesia memang masih seumur jagung tidak seperti Prancis yang sudah berpengalaman demokrasi 100 tahun, tetapi dalam perspektif rasa kemanusiaan, Indonesia paham benar akan kehormatan dan martabat manusia. Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, di dalam sejarah, Indonesia yang saat itu masih bernama “Nusantara” pun telah menyadari bahwa penjajahan di muka bumi harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dengan kata lain, Indonesia menggugat bahwa unsur agama kaum kolonialisme pada masa itu telah disalahartikan demi ambisi politik saja, yang dirumuskan ke dalam seruan *“gold, glory, gospel”*, yang merupakan sebuah ide yang melecehkan kehormatan dan martabat manusia Indonesia.

Dalam proses pembentukan Indonesia negara modern, terdapat sistem pertahanan negara yang modern. Sistem pertahanan negara yang modern adalah sistem pertahanan negara yang mampu memetakan dengan jelas ancaman-ancaman nirmiliter dan peran-peran sipil ke dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya pertahanan, sehingga pembagian tugas di dalam sistem pertahanan negara yang modern akan terbentuk CIMIC (*civil-military relations and communication*). Di dalam sistem pertahanan negara yang modern itu, objek *defense heritage* dipandang sebagai sumber daya pertahanan yang dimiliki oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Kurang terawatnya cagar budaya pertahanan, adanya cagar budaya pertahanan yang hampir punah, susahya akses/fasilitas, minimnya pemahaman

masyarakat akan cagar budaya pertahanan, dan tidak adanya pemikiran untuk menyelamatkan objek *defense heritage* di daerah-daerah rawan gempa adalah ancaman nirmiliter yang dapat diatasi dan dicegah sedini mungkin apabila *defense heritage* menjadi bagian dari Doktrin Pertahanan Negara RI, dikelola oleh Kemhan RI, dan menjadi sarana program bela negara, terutama dalam hal nasionalisme.

Nasionalisme adalah sebuah produk dari kehidupan sejarah dan karena itu dia bersifat fluktuatif dan tidak pernah statis. Hal ini mengandung makna bahwa, sejarah masa lalu suatu bangsa selalu mengalami perkembangan secara fluktuatif, karena itu harus dipelajari, agar generasi muda mengerti dan memahami tentang sejarah bangsanya, terutama sejarah perjuangan, karena dari sini nasionalisme lahir sebagai produk dari kehidupan sejarah suatu bangsa (Kohn, 1984, p.11). Dalam kajian ini, wujud adanya nasionalisme kebangsaan masyarakat Indonesia tidak lagi dalam hal berperang angkat senjata dan perang frontal fisik, tetapi bagaimana bangsa Indonesia bisa mengidentifikasi, menceritakan kembali, dan memaknai sejarah perjuangan bangsa yang ada di balik setiap bangunan bersejarah atau objek *defense heritage*. Oleh sebab itu, pengelolaan dan pembelajaran *defense heritage* adalah sarana program bela negara yang modern yang dapat dirumuskan dalam bagan gambar berikut ini.



Gambar 4.19 Penempatan *Defense Heritage* Dalam Sishanneg RI

Sumber: Olahan peneliti, 2021

Negara yang modern adalah negara yang memiliki struktur pranata, sistem, dan kebiasaan-kebiasaan aturan berdasarkan akal logika dan rasionalitas, serta mengutamakan penelitian ilmiah. Dari negara yang modern itu, terdapat sistem

pertahanan negara modern yang selalu siap sedia menghadapi ancaman-ancaman nirmiliter sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis. Di dalam sistem pertahanan negara yang modern itu, *defense heritage* dipandang sebagai sumber daya pertahanan bangsa dan sarana program bela negara yang lebih kekinian, adaptif, dan berdasarkan kebutuhan-kebutuhan dari kondisi yang ada.

Dalam penyelenggaraan program bela negara dewasa ini telah terdapat berbagai pendapat pro-kontra terhadap program bela negara yang digulirkan oleh Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia telah meluncurkan program bela negara pada 19 Oktober 2015. Dengan harapan, nantinya akan dibentuk 4.500 kader pembina bela negara di 45 kabupaten/kota di Indonesia. Penyiapan sarana, prasarana, dan fasilitas kader bela negara terhenti karena Pandemi Covid 19. Nantinya dalam 10 tahun, terdapat 100 juta rakyat yang telah mengikuti program bela negara ini. Dalam pelaksanaan program ini Kemenhan RI menggandeng berbagai institusi maupun perguruan tinggi untuk pemberian pelatihan bela negara. Konsep pelatihan fokus pada upaya pengembangan wawasan kebangsaan, nasionalisme, dan lainnya. Namun, timbul resistensi pada program ini karena pemerintah tidak membuka dialog dengan masyarakat sipil, sehingga pemerintah perlu memberikan penjelasan kepada publik terkait arah kewajiban dari program bela negara. Program bela negara yang didesain oleh Kementerian Pertahanan dikritisi sekaligus diapresiasi. Sikap kritis terutama menyangkut persoalan mendasar seperti payung hukum, anggaran serta situasi bangsa yang tengah dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil. Kemhan menargetkan 100 juta rakyat Indonesia memiliki sertifikat bela negara selama periode 10 tahun ke depan, dan diikuti oleh setiap warga negara mulai usia 18 tahun hingga 50 tahun selama satu bulan di satuan-satuan TNI seperti Rindam (DirBelNeg, 2020).

Permasalahan yang mempengaruhi penyelenggaraan program bela negara diantaranya adalah adanya pro kontra dari elemen masyarakat terhadap program bela negara yang dicanangkan oleh Kemenhan RI. Diantaranya pandangan masyarakat soal materi pelatihan yang diterapkan berupa materi kemiliteran, sehingga masyarakat berpendapat bahwa bela negara sebagai upaya mobilisasi negara untuk melibatkan rakyat dalam perang; belum adanya komunikasi dan sosialisasi secara baik kepada seluruh komponen bangsa tentang pemahaman bela negara; adanya pendapat yang menyatakan bahwa program 10 juta kader dalam 10 tahun merupakan

program yang terlalu ambisius dikaitkan dengan sarana dan prasarana pelatihan (Kajian BelNeg Seskoad, 2018).

Dalam sistem pertahanan negara modern yang telah dijelaskan sebelumnya, maka program bela negara yang modern adalah program bela negara yang menekankan kepada pemahaman yang utuh tentang kehidupan berbangsa, bernegara, dan kebinekhaan, melalui pembelajaran dan penelitian. Modern di dalam pikiran yang tercerahkan sama pentingnya dengan menjadi modern di dalam bidang persenjataan dan alutsista. Kajian ini memiliki argumentasi bahwa *defense heritage* adalah sarana program bela negara yang modern. Untuk menuju kesana, maka *defense heritage* harus menjadi bagian dari Doktrin Pertahanan Negara RI.

Dalam menyiapkan visi utama jangka panjang *defense heritage* sebagai bagian dari Doktrin Pertahanan Negara, maka Menteri Pertahanan mengacu pada Kebijakan Pertahanan Negara 2020 dalam Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: KEP/104/M/I/2020, bahwa Pertahanan negara Indonesia diselenggarakan oleh pemerintah yang dipersiapkan secara dini dalam Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) melalui usaha pengelolaan sumber daya nasional yang meliputi segenap sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional, di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai satu kesatuan pertahanan dalam menanggulangi ancaman. Maka, Tujuan Strategis Pertahanan Negara perlu memasukkan unsur *defense heritage* haruslah menciptakan sebuah Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) yang terintegrasi dan modern dengan Sasaran:

- a. Terintegrasinya Pertahanan Militer dan Nirmiliter. Dalam hal ini *defense heritage* sebagai program bela negara akan menjadi tumpuan utama.
- b. Terwujudnya postur TNI yang tangguh dalam mengatasi ancaman. Sesuai dengan analisis sebelumnya, bahwa di dalam hal identifikasi, pemeliharaan, pemugaran, pelestarian, ataupun Revitalisasi objek *defense heritage* akan memerlukan wewenang dan bantuan dari TNI, sehingga sosialisasi tentang *defense heritage* diperlukan kepada TNI, misalnya modul pembelajaran pengenalan objek *defense heritage* di Sesko TNI AL, AD, dan AU. Ketiga matra TNI perlu memahami objek *defense heritage* mana saja yang memerlukan bantuan dan wewenang TNI, seperti misalnya dalam hal penyiapan revitalisasi Benteng Kuto Besak Palembang yang menjadi Kantor Kesdam II Sriwijaya. Dalam hal ini TNI dan RS AK.Ghani perlu berbesar hati untuk pindah kantor.

- c. Terwujudnya tata kelola sistem pertahanan negara yang baik. Kajian ini memiliki data bahwa negara-negara maju yang telah memasukkan *defense heritage* sebagai bagian dari sistem pertahanan negaranya, memiliki sudut pandang yang terbaru tentang pemahaman akan sejarah bangsanya. Hal ini mengasumsikan bahwa dengan pengakuan negara Indonesia terhadap *defense heritage* maka tata Kelola sistem pertahanan negara akan lebih baik. Sebab sesuai dengan Teori tentang ilmu pertahanan negara, *defense heritage* memiliki narasi akan adanya pertahanan negara itu sendiri, dalam hal keselamatan bangsa, kedaulatan negara, dan keutuhan wilayah NKRI.
- d. Dalam penyusunan kebijakan pertahanan negara terkait *defense heritage* sebagai program bela negara perlu berpedoman pada Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) yang bercirikan pada kerakyatan, kesemestaan, dan kewilayahan.

Ciri kerakyatan bertumpu pada partisipasi publik, baik komponen utama maupun komponen cadangan, dalam hal identifikasi, pelestarian, pemugaran, pemanfaatan, dan Revitalisasi objek *defense heritage* berada di bawah peraturan yang berlaku, yakni dari Kementerian Pertahanan yang bekerjasama dengan pemangku kepentingan lainnya, misalnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud RI).

Ciri kesemestaan artinya adalah *defense heritage* dapat mengacu pada UU No.11 Tahun 2010 tentang cagar budaya, bahwa cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Terkait dengan hal tersebut, sesuai dengan PPRI No.8 Tahun 2021 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara 2020-2024, terutama Pasal 2 huruf f, bahwa:

“...peningkatan kemampuan pertahanan nirmiliter yang dilaksanakan oleh kementerian di luar bidang pertahanan, lembaga, dan pemerintah daerah dengan mengoptimalkan sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan negara”

Setelah melakukan observasi penelitian dan wawancara penelitian, peneliti berpikir bahwa secara ilmu pertahanan, bangunan bersejarah, situs, museum, dan

kawasan budaya atau *cultural heritage* pada umumnya secara keseluruhan sudah termasuk ke dalam sumber daya pertahanan, sebab sesuai dengan UU RI No.11 Tahun 2010 tentang cagar budaya, terutama pada Pasal 16 ayat 2:

“Negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1, didahulukan atas pengalihan kepemilikan cagar budaya”

Sesuai dengan UU No.23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara dan sesuai dengan Bab 2 teori tentang sistem pertahanan negara, *defense heritage* adalah sarana bagi insan pertahanan di 34 provinsi dan diaspora Indonesia dalam mewujudkan kesadaran bela negara (Wirakara, 2020).

Segera setelah *defense heritage* diakui sebagai bagian dari Doktrin Pertahanan Negara tersebut, maka di dalam kajian ini merekomendasikan bahwa sektor pemimpin dalam model pengelolaan cagar budaya bernilai pertahanan (*defense heritage*) adalah Kementerian Pertahanan, sebab *defense heritage* memiliki karakteristik yang berbeda dengan *cultural heritage*, seperti yang telah dijelaskan dalam definisi *defense heritage* dalam Bab 2 Teori tentang *cultural heritage*.

Setelah mendapatkan hasil penelitian bahwa kurangnya perhatian terhadap pelestarian cagar budaya, tidak adanya model pengelolaan cagar budaya bernilai pertahanan (*defense heritage*), dan model pengelolaan cagar budaya yang saat ini belum melibatkan Kementerian Pertahanan merupakan dasar pemikiran kajian ini yang memiliki data bahwa ternyata di berbagai negara maju, Kementerian Pertahanannya diberikan mandat dan wewenang khusus untuk mengelola objek *defense heritage*.

Model pengelolaan *defense heritage* di Indonesia yang ditawarkan dalam kajian ini adalah Kementerian Pertahanan menjadi sektor pimpinan. Dewasa ini di Indonesia pengelolaan *defense heritage* masih menjadi satu padu dengan pengelolaan *cultural heritage*, sehingga sektor pimpinannya adalah Kemdikbud RI berdasarkan UU No.11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Menurut Madjid (2018), untuk sementara karena belum ada peraturan tentang *defense heritage* di Indonesia, maka implementasi pengelolaan *defense heritage* dapat mengikuti kaidah-kaidah *cultural heritage*. Artinya adalah Kemhan perlu bekerjasama dengan semua pemangku kepentingan, terutama Kemdikbud RI, Pemerintah provinsi, Pemerintah kota, dan TNI yang sementara ini menjadi pemilik aset objek-objek *defense heritage* di 34 provinsi di Indonesia.

Sebagai contohnya, nanti Kemhan akan dibantu oleh Pusat Sejarah (Pusjarah) TNI yang memiliki fungsi utama dalam hal penyelenggaraan pembinaan museum, monumen, dan perpustakaan buku-buku militer (<https://sejarah-tni.mil.id/>, 2018 dan Madjid, 2018). Dalam hal kebutuhan Revitalisasi objek *defense heritage* yang membutuhkan anggaran negara yang tidak sedikit, Kemhan tidak bisa bekerja sendirian. Oleh sebab itu komunikasi dan sinergi dengan Lembaga negara dan pemangku kepentingan terkait harus dimulai oleh seorang Menteri Pertahanan. Kemhan juga akan dibantu oleh para pengemban ekspresi budaya tradisional misalnya tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat yang menurut Susanti (2018, p.147) berada dalam posisi melestarikan dan menjaga agar keturunan atau ahli waris mereka masih melestarikan warisan budaya ini, sebab warisan disini artinya sesuatu yang diwariskan atau sesuatu yang diturunkan dari generasi ke generasi, misalnya monumen, bangunan bersejarah, juga lanskap alam, seperti sistem imigrasi Subak Bali.

Berdasarkan kajian ini yang memunculkan kategorisasi level *defense heritage*, maka kajian ini mengusulkan model pengelolaan cagar budaya bernilai pertahanan (*defense heritage*) di Indonesia dapat dipisahkan dengan pengelolaan *cultural heritage*, yakni dengan menempatkan Kementerian Pertahanan sebagai sektor pemimpin. Di dalam bagan berikut terlihat bahwa Kementrian Pertahanan adalah sektor pimpinan (dengan pimpinan Menteri Pertahanan) yang dibantu oleh 3 (tiga) unit kerja utama, yakni Balitbang, Ditjen Pothan, dan Kuathan. Dalam jangka pendek, Kemhan mempersiapkan *defense heritage* sebagai sarana program bela negara dan dalam jangka menengah Kemhan dapat menerbitkan kebijakan pertahanan negara yang mampu menguraikan dengan jelas skema pengelolaan *defense heritage*. Kemudian dalam jangka panjang Kemhan dapat mengusulkan pendirian Museum Pertahanan berdasarkan atas ide *defense heritage* sebagai fondasi pemikiran ilmiah.



Gambar 4.20. Model Pengelolaan *Defense Heritage* untuk Program Bela Negara

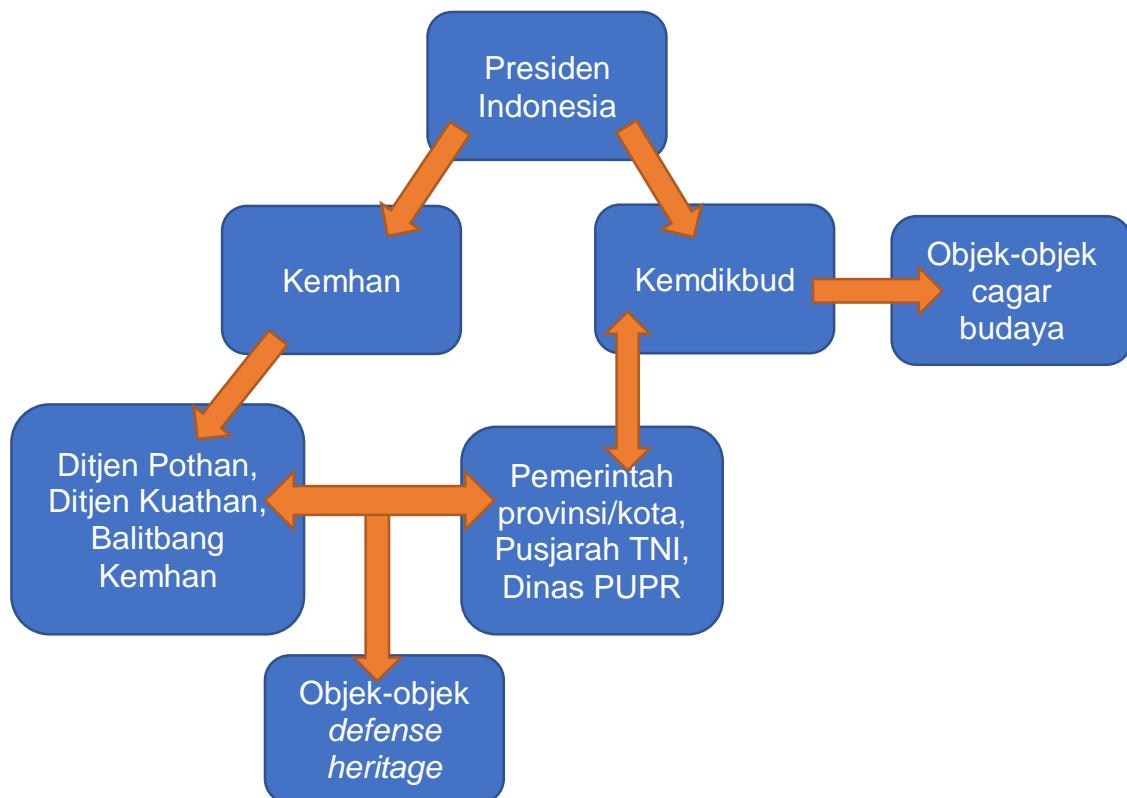
Sumber: Peneliti, 2021

Sesuai dengan Perpres No.58 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertahanan yang menyebutkan dalam Pasal 1 ayat 1 bahwa Kementerian Pertahanan dipimpin oleh seorang Menteri Pertahanan dan sesuai dengan UU No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, terutama Pasal 16, maka seorang Menteri Pertahanan memiliki 7 (tujuh) fungsi dalam menjalankan *defense heritage* sebagai program bela negara, yakni sebagai berikut:

- a. Memimpin Departemen Pertahanan. Dalam hal ini mengarahkan 16 satuan kerja Kementerian Pertahanan agar memasukkan *defense heritage* ke dalam penyelenggaraan pertahanan, terutama yang terkait langsung dengan implementasi *defense heritage* adalah Ditjen Pothan DirBelNeg (aspek bela negara), Balitbang Kemhan (penelitian *defense heritage*), dan Ditjen Kuathan (pembagian wilayah *defense heritage*);
- b. Membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan umum pertahanan negara. Dalam hal ini, Menteri Pertahanan perlu melakukan sosialisasi awal kepada Presiden, lalu kemudian merumuskan kebijakan pertahanan untuk *defense heritage*;
- c. Menetapkan kebijakan tentang penyelenggaraan pertahanan negara berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan Presiden. Dalam hal ini adalah untuk menetapkan kebijakan tentang *defense heritage*. Termasuk dalam hal adalah menyetujui

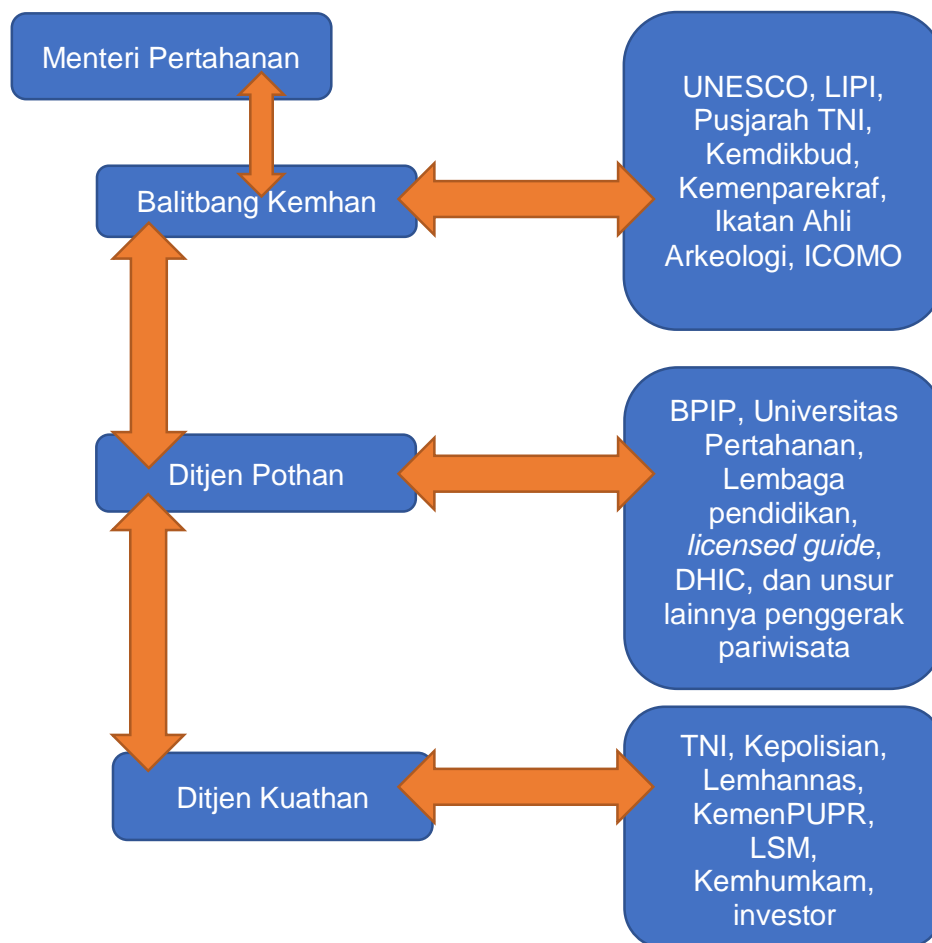
- usulan-usulan dari tim satker Kemhan, misalnya menyetujui narasi tentang *defense heritage* sebagai program bela negara, merumuskan model implementasi *defense heritage* di Indonesia, dari mulai penentuan *tangible* dan *intangible defense heritage* bagi bangsa Indonesia, pembentukan Tim Satuan Tugas, perumusan Aplikasi Digital *defense heritage*, peluncuran *Website* resmi *defense heritage* untuk Registrasi dan Pendataan, pembentukan tim sosial media dari mulai Instagram, Facebook, dan Twitter, peluncuran pemilihan Duta Nasional *Defense Heritage* yang akan diselenggarakan tiap tahunnya di Universitas-Universitas dan Duta Cilik *Defense Heritage* di sekolah-sekolah, penetapan Modul Pembelajaran bagi Fasilitator, termasuk penerbitan Sertifikasi Keahlian *Defense Heritage* yang direkognisi oleh DIKTI, penentuan Hari *Defense Heritage (Defense Heritage Day)* bagi bangsa Indonesia, pembuatan Lirik Lagu Himne Pertahanan yang memuat unsur *defense heritage*, dan penentuan lambang negara untuk representasi *defense heritage*, misalnya Pin *defense heritage* yang ditempelkan pada seragam aparat, pejabat tinggi negara, dan kementrian.
- d. Menyusun buku putih pertahanan serta menetapkan kebijakan kerja sama bilateral, regional, dan internasional di bidangnya. Apabila *defense heritage* sudah diakui oleh negara, maka di dalam Buku Putih perlu disebutkan tentang narasi *defense heritage*, terutama perspektif bela negara.
- e. Merumuskan kebijakan umum penggunaan kekuatan Tentara Nasional Indonesia dan komponen pertahanan lainnya. *Defense heritage* merupakan komponen pendukung dan para kader bela negara sebagai insan pertahanan perlu melestarikan *defense heritage* sebagai sumber daya nasional.
- f. Menteri menetapkan kebijakan penganggaran, pengadaan, perekrutan, pengelolaan sumber daya nasional, serta pembinaan teknologi dan industri pertahanan yang diperlukan oleh Tentara Nasional Indonesia dan komponen pertahanan lainnya. Apabila di dalam hal pemanfaatan, pelestarian, pemugaran, dan revitalisasi objek *defense heritage* diperlukan kekuatan dan wewenang TNI, maka Menteri Pertahanan dapat berkoordinasi dengan TNI dan komponen pertahanan lainnya.
- g. Menteri bekerjasama dengan pimpinan departemen dan instansi pemerintah lainnya serta menyusun dan melaksanakan perencanaan strategis pengelolaan sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan.

Berikut ini adalah Struktur Organisasi Model Pengelolaan *Defense Heritage* sebagai sarana program bela negara di Indonesia, yang akan dirinci dengan usulan bagan tugas dan fungsi 3 (tiga) unit kerja Kementerian Pertahanan terhadap *defense heritage*, yakni Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan (Ditjen Pothan), Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan (Ditjen Kuathan), dan Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemhan RI.



Gambar 4.21 Struktur Organisasi Model Pengelolaan *Defense Heritage* Sebagai Sarana Program Bela Negara di Indonesia

Sumber: Olahan peneliti, 2021



Gambar 4.22. Usulan Bagan Tugas dan Fungsi Kementerian Pertahanan terhadap *Defense Heritage*

Sumber: Peneliti, 2021

Berdasarkan Permenhan Nomor 58 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Pertahanan, maka tugas dan fungsi (Kemhan, 2021) Badan Penelitian dan Pengembangan Kemhan yang perlu dikaitkan untuk perwujudan *defense heritage* adalah sebagai berikut:

- a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program di bidang penelitian dan pengembangan di bidang pertahanan, terutama terkait *defense heritage*, misalnya dalam bentuk FGD dengan para ahli pertahanan, *heritage*, dan arkeologi. Hal ini sudah dilakukan oleh peneliti sebagai Tim Penelitian *Defense Heritage* Balitbang Kemhan RI 2020-2022 yang telah melakukan observasi penelitian dan wawancara mendalam untuk mendapatkan hasil penelitian *defense heritage* di Jakarta, Ambon, Palembang, dan Manado.
- b. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pertahanan meliputi strategi, sumber daya, ilmu pengetahuan dan teknologi dan alat pertahanan, terutama

dikaitkan dengan penelitian *defense heritage*, misalnya mengadakan *Call for Paper* bagi pelajar dan mahasiswa dalam Konferensi Internasional *Indonesian Defense Heritage*.

- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pertahanan, terutama dikaitkan dengan penelitian *defense heritage*.
- d. Pelaksanaan administrasi Balitbang, terutama dalam hal pendataan *defense heritage* di tiap kota/kabupaten.

Di dalam usulan dari peneliti sesuai Bagan, maka Balitbang Kemhan yang akan menjalin komunikasi dan bekerjasama dengan Pusjarah TNI, UNESCO, LIPI, Kemdikbud, Kembudpar, Ikatan Ahli Arkeologi, ICOMO (*International Council of Museums/ Dewan Museum Internasional*), Tim Ahli Cagar Budaya (TACB), dan dinas terkait lainnya dalam hal penyempurnaan tentang pengadopsian *defense heritage* di Indonesia.

Di dalam pengadopsian *defense heritage* maka Balitbang Kemhan perlu bersinergi dengan TNI perlu dilakukan sebab berdasarkan UU No.23 Tahun 2019 Pasal 61 ayat 2, komponen cadangan berada di bawah komando dan kendali Panglima TNI. Penyelenggaraan *defense heritage* sebagai program bela negara menempatkan insan pertahanan yang bukan berasal dari TNI Polri sebagai komponen cadangan atau disebut sebagai kader bela negara oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Selain itu, terdapat beberapa *defense heritage* yang masih menjadi kantor TNI, misalnya Benteng Kuto Besak di Kota Palembang yang masih menjadi kantor Kesdaam II Sriwijaya. Oleh sebab itu *defense heritage* akan menjadi sarana komunikasi penghubung abadi antara Menteri Pertahanan dan Panglima TNI.

Menurut kajian ini, penulisan sejarah total *a la* March Bloch sebaiknya digunakan dalam penciptaan narasi *defense heritage* sebagai program bela negara, sebab proses digitalisasi *defense heritage*, akan menjadi prototipe Museum Pertahanan Indonesia (Indonesia Defense Museum). Indonesia Defense Museum akan mendeskripsikan secara lengkap tentang Indonesia. Kajian ini memiliki data observasi lapangan Museum Pertahanan yang dapat dijadikan patokan antara lain Civil Defense Museum Singapura, Museum Militer Zizkov di Praha Republik Ceko, Museum of Military History Vienna Austria, Imperial War Museum London, dan 9/11 Memorial Monument&Museum New York. Keempat museum pertahanan ini memiliki narasi yang utuh dan detail dalam mendeskripsikan peristiwa pertahanan, situs

bersejarah dalam hal pertahanan bangsa, atau benda bersejarah yang terkait dengan sejarah perang dan pertahanan militer, serta nirmiliter.

Dalam hal mendapatkan pemahaman sejarah secara total, utuh, dan mendalam sesuai kajian historiografi Marc Bloch di dalam narasi setiap objek *defense heritage*, maka peneliti Balitbang Kemhan dapat bekerja sama dengan akademisi asing, misalnya ahli arkeologi, ahli museum, ahli benda purbakala, ataupun tentara yang bertugas di BAAC *Defense Heritage* Kerajaan Inggris, *Defense Heritage Council* Australia, *Advisory Council on Historic Preservation (ACHP)* Washington DC Amerika Serikat, ataupun kurator Museum *Defense Heritage* Singapura.

Dalam hal aspek anggaran dan pendanaan, Kementerian Pertahanan perlu melakukan koordinasi dengan pihak terkait, misalnya Kementerian Keuangan, DPR, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam hal pengaturan investasi asing.

Kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan, maka tugas dan fungsi (*website* Kemhan, 2021) Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan, Direktorat Bela Negara, yang perlu dikaitkan untuk perwujudan *defense heritage* adalah sebagai berikut:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penataan dan pembinaan bela negara, terutama dikaitkan dengan pengadopsian usulan model *defense heritage* sebagai program bela negara yang diusulkan dalam kajian ini;
- b. Penyusunan peraturan di bidang penataan dan pembinaan bela negara, terutama dikaitkan dengan pengadopsian usulan model *defense heritage* sebagai program bela negara yang diusulkan dalam kajian ini;
- c. Pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan di bidang penataan dan pembinaan bela negara, terutama dikaitkan dengan pengadopsian usulan model *defense heritage* sebagai program bela negara yang diusulkan dalam kajian ini;
- d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan laporan di bidang penataan dan pembinaan bela negara, terutama dikaitkan dengan pengadopsian usulan model *defense heritage* sebagai program bela negara yang diusulkan dalam kajian ini;
- e. Pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Direktorat Bela Negara, terutama dalam hal penyiapan kantor berupa meja, kursi, komputer utama, laptop, lahan parkir, logistik, dan sarana-prasarana lainnya di Kementerian Pertahanan Jakarta untuk tempat bekerja sehari-hari tim formatur awal *defense heritage* sebagai program bela negara.

Di dalam usulan kajian ini sesuai Bagan Gambar 4.18, maka Ditjen Potan DirBelNeg yang akan menjalin komunikasi dan bekerjasama dengan Lembaga pendidikan, misalnya seperti Universitas, terutama Universitas Pertahanan, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), para *licensed guide*, *Defense Heritage Intellectual Community* (DHIC), UMKM, dan unsur lainnya penggerak pariwisata. Hal ini sesuai dengan konsep keamanan nasional di dalam sistem penyelenggaraan pertahanan negara, bahwa setiap warga negara berhak dan wajib dalam melakukan bela negara. Di dalam konteks *defense heritage*, partisipasi publik adalah prasyarat kondisi ketika mendiskusikan isu apapun tentang pertahanan negara Indonesia.

Dari 75 Sub-Direktorat, Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan, maka tugas dan fungsi Ditjen Kuathan (*website* Kemhan, 2021) yang perlu dikaitkan untuk pengadopsian *defense heritage* adalah sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan di bidang kekuatan pertahanan militer. Dalam hal ini adalah pemahaman bahwa TNI juga pelaksanaan kebijakan di bidang kekuatan pertahanan militer meliputi pembinaan sumber daya manusia, materiil, fasilitas dan jasa serta kesehatan pertahanan militer. Dalam ranah penelitian *defense heritage*, maka TNI melalui Sesko TNI juga perlu diberikan pemahaman akan adanya *defense heritage*;
- b. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kekuatan pertahanan militer, yang perlu memasukkan *defense heritage* sebagai sumber daya pertahanan;
- c. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kekuatan pertahanan militer, yang perlu turut memikirkan *defense heritage* yang masih ditinggali oleh TNI, namun membutuhkan Revitalisasi. Kajian ini memiliki data analisis *defense heritage* di Benteng Kuto Besak Palembang;
- d. Pelaksanaan administrasi Ditjen Kuathan, yang perlu mulai mengusulkan mata anggaran kepada Menteri Pertahanan tentang kesiapan wilayah pertahanan untuk menyiapkan revitalisasi, restorasi, pemeliharaan, ataupun pemugaran *defense heritage* di tiap kota/kabupaten dan provinsi.

Berdasarkan Perpres No 8 Tahun 2021, di dalam pokok kebijakan umum pertahanan negara nirmiliter bagian d) kebijakan pembangunan wilayah pertahanan yang diselenggarakan melalui 9 (sembilan) poin penguatan. Dari poin itu yang paling signifikan dengan kajian *defense heritage* ini adalah penguatan komando gabungan wilayah pertahanan.

Apabila model *defense heritage* untuk program bela negara sudah diadopsi, maka Ditjen Kuathan nanti akan membagi *defense heritage* ke dalam wilayah pertahanan, sehingga didapatkan sebagai berikut:

- a. *Defense heritage* di wilayah pertahanan I, terutama objek *defense heritage* menurut kajian ini terlihat jelas di Aceh (Inong Bale), Palembang (Benteng Kuto Besak), Bengkulu (Benteng Marlborough), Banten (Surosowan), Yogyakarta (Vrederburg), Gombong (Van Der Wijck), Jakarta (sisa Benteng Jakarta), dan Surabaya (Hotel Yamato, Jembatan Merah, Gedung Siola, Tugu Pahlawan);
- b. *Defense heritage* di wilayah pertahanan II terutama objek *defense heritage* menurut kajian ini terlihat jelas di Manado (Monumen Perjuangan Rakyat Minahasa / Monpera) dan Makasar (Rotterdam);
- c. *Defense heritage* di wilayah pertahanan III terutama objek *defense heritage* menurut kajian ini terlihat jelas di Ambon (Benteng Victoria dan Benteng Amsterdam) dan Ternate (Benteng Oranje).

Demikian pula semua objek *defense heritage* di 3 (tiga) wilayah pertahanan adalah milik negara yang perlu diberi pemaknaan kembali agar memberikan dampak ekonomi secara sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, terutama masyarakat yang tinggal di dekat objek *defense heritage*, UMKM penjual souvenir, para penjaga atau *kuncen* bangunan bersejarah, kurator museum, *licensed guide*, akademisi, ahli sejarah, ahli arkeologi, dan ahli museum yang tergabung di dalam *Defense Heritage Intellectual Community* (DHIC), dan para penggerak pariwisata lainnya.

Setelah pembagian ketiga unit kerja Kemhan tersebut, berikut ini akan disajikan kategorisasi level *defense heritage* berdasarkan kondisi sosial-politik yang telah dijelaskan pada Bab 2 Teori *cultural heritage*. Kajian ini mengurutkan Level berdasarkan 3 (tiga) syarat, yakni:

- a. Terdapat bukti perjuangan bangsa dalam bentuk apapun dan sekecil apapun. Artinya adalah setiap bukti perjuangan bangsa dihargai memiliki kontribusi untuk melengkapi sejarah bangsa. Oleh sebab itu, pengumpulan data sejarah harus dikumpulkan secara utuh dan lengkap yang dapat dipertanggungjawab secara ilmiah bahwa ada bukti perjuangan bangsa dan masyarakat Indonesia dalam melawan penjajah dan meraih kemerdekaan, sesuai dengan pemutakhiran kategorisasi pembagian *defense heritage* yang secara rinci berdasarkan periode sejarah dan kondisi sosial-politik dapat dikutip dari Sejarah Nasional Indonesia jilid I sampai VI (Tim Nasional Penulisan Sejarah Indonesia, 2010) ataupun

berdasarkan Tim Dokumentasi Benteng di Indonesia (Kemdikbud, 2012) seperti yang telah dijelaskan dalam Bab 2 Teori. Hal ini dapat dilakukan melalui penelitian yang mendalam dan apabila perlu mendapatkan referensi ilmiah dari pengkaji indonesianis di arsip Universitas Leiden, Belanda;

- b. Ada tokoh setempat yang ikut berjuang. Tokoh disini bisa 1 (satu) orang saja atau bisa sekelompok masyarakat lokal yang kemudian menjadi motor penggerak perjuangan bangsa secara umum. Data tersebut dapat dikumpulkan dengan studi literatur, penuturan dari ahli waris, atau saksi sejarah atau pendapat mayoritas di sekitar situs tersebut;
- c. Terawat/tidaknya objek *defense heritage* tersebut, misalnya wujud bangunan atau strukturnya masih terlihat bentuk asli atau sudah tidak terawat atau justru beralih fungsi. Hal ini hanya dapat dilakukan dengan melakukan observasi penelitian di lapangan dan wawancara mendalam dengan masyarakat lokal dan para ahli sejarah.

Tabel 4.1. Kategorisasi *Defense Heritage* (Peneliti, 2021)

NO.	LEVEL	PRASYARAT KONDISI	CONTOH <i>DEFENSE HERITAGE</i>
1.	Level 1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat bukti sejarah adanya perjuangan bangsa Indonesia 2. Ada tokoh setempat atau masyarakat lokal yang ikut berjuang 3. Terawat dengan baik dan masih terlihat bentuk asli 	MONUMEN TUGU PAHLAWAN (MUSEUM 10 NOVEMBER) JEMBATAN MERAH HOTEL YAMATO MUSEUM FATAHILAH DAN KAWASAN KOTA TUA JAKARTA MUSEUM SUMPAH PEMUDA MUSEUM JOANG 45 MUSEUM KEBANGKITAN NASIONAL MUSEUM DAN BENTENG VREDEBURG JOGJAKARTA MUSEUM PUSAT TNI AU DIRGANTARA

			<p>MANDALA JOGJAKARTA</p> <p>MONUMEN PERJUANGAN TNI AU JOGJAKARTA</p> <p>MONUMEN PERJUANGAN TNI AL DI KOTA PARIAMAN</p> <p>MONUMEN PERJUANGAN RAKYAT JAWA BARAT DI BANDUNG</p> <p>BENTENG ROTTERDAM MAKASAR</p> <p>GOA JEPANG DI BANDUNG</p> <p>MUSEUM PETA DI BOGOR</p> <p>EREVELD PAHLAWAN KNIL DI MENTENG PULO, SURABAYA, MANADO, DAN AMBON</p>
2	Level 2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat bukti sejarah adanya perjuangan bangsa Indonesia 2. Belum ada pendataan apabila ada tokoh setempat atau masyarakat lokal yang ikut berjuang 3. Terawat dengan baik dan masih terlihat bentuk asli 	<p>BENTENG ORANJE TERNATE</p> <p>MUSEUM PERANG DUNIA II DI PULAU MOROTAI</p> <p>BENTENG FORT DE KOCK BUKITTINGGI</p> <p>GOA JEPANG DI KOTA PADANG</p> <p>BENTENG MARLBOROUGH BENGKULU</p>
3	Level 3	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat bukti sejarah adanya perjuangan bangsa Indonesia 2. Ada tokoh setempat atau masyarakat lokal yang ikut berjuang 3. Belum terawat dengan baik atau beralih fungsi 	<p>BENTENG SURABAYA DAN MADURA</p> <p>BENTENG COWEK SURABAYA</p> <p>GEDUNG SIOLA (MUSEUM SURABAYA)</p> <p>BENTENG VICTORIA AMBON</p> <p>BENTENG KUTOBESAK PALEMBANG</p>

			MONUMEN PERJUANGAN RAKYAT MINAHASA (MONPERA)
4.	Level 4	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat bukti sejarah adanya perjuangan bangsa Indonesia 2. Belum ada pendataan apabila ada tokoh setempat atau masyarakat lokal yang ikut berjuang 3. Belum terawat dengan baik atau beralih fungsi 	BENTENG JAYAKARTA (MUSEUM BAHARI) VELDBAK MANADO BENTENG AMSTERDAM AMBON

Berdasarkan contoh-contoh *defense heritage* yang hampir punah pada Level 3 dan 4 itu, secara tidak langsung akan menyebabkan pertahanan negara Indonesia lama kelamaan akan kehilangan jati dirinya, sebab ilmu pertahanan mempelajari objek penelitian berupa kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa.

Secara epistemologi, sumber dan asal usul bangsa Indonesia tidak terlepas dari sejarah kolonialisme yang meninggalkan narasi penting bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang berjuang, sehingga Indonesia sudah saatnya merekognisi *defense heritage* karena secara ontologis, Indonesia terbukti memiliki *defense heritage*. Secara aksiologis, *defense heritage* itu kemudian akan memiliki fungsi pertahanan perspektif nilai bela negara, terutama menumbuhkan rasa cinta tanah air.

Apabila model pengelolaan *defense heritage* sebagai program bela negara tidak segera diadopsi, maka Indonesia termasuk negara tertinggal atau bahkan negara gagal dalam memahami sejarahnya secara utuh. Berdasarkan buku dari Soedjatmoko, "Dimensi Manusia Dalam Pembangunan" (1995, p.xxi), perubahan dari tradisi ke modernitas melibatkan perubahan radikal dalam pola hidup. Perubahan makro dalam masyarakat harus dimulai dengan perubahan mikro. Menurut Habermas, menjadi modern artinya menjadi tercerahkan (Habermas dalam Afifi, 2019, p.43).

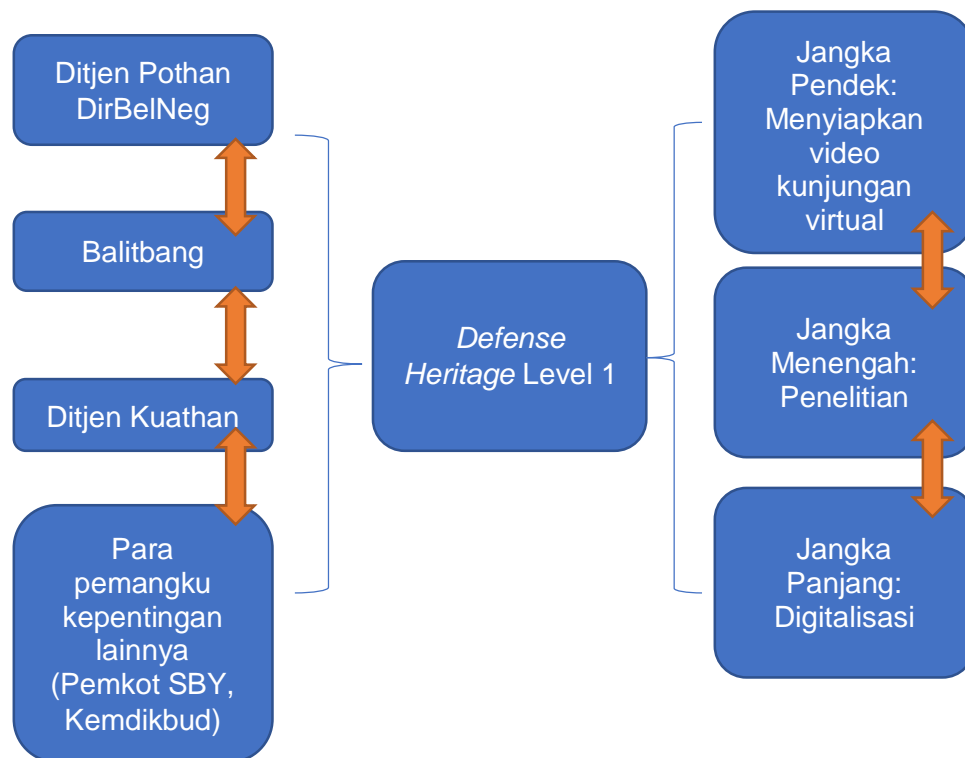
Hal ini sesuai dengan Bab 2 Teori tentang Modernisme dari Alain Touraine, bahwa *defense heritage* sebagai program bela negara adalah pencerah bagi bangsa Indonesia dalam memahami masa lalu dan apabila perlu mengubah persepsi akan masa lalu, untuk mensyukuri hidup, bergembira, dan berkarya di masa kini, dalam menyongsong masa depan sebagai bangsa yang unggul, sesuai dengan profesi masing-masing. Berdasarkan dari analisis kategorisasi level dan wilayah pertahanan, maka didapatkan Peta Defense Heritage (lihat Lampiran).

4.3.2.1 Model Pengelolaan Cagar Budaya Bernilai Pertahanan (*Defense Heritage*) Sebagai Sarana Program Bela Negara di Kota Surabaya

Berdasarkan temuan penelitian ini, maka terlihat bahwa *defense heritage* di kota Surabaya lebih banyak menempati Level 1, sebab secara historis, Surabaya adalah kota yang telah menyaksikan perang, dari mulai perang pasifik, pra-kemerdekaan, dan perang pasca-kemerdekaan, yang masih dapat diceritakan narasi sejarahnya dari simbol-simbol perjuangan seperti gedung, bangunan, situs, dan peninggalan bersejarah. Hal ini telah dijelaskan dalam analisis pada objek-objek *defense heritage* di kota Surabaya.

Setelah melakukan wawancara mendalam dengan Dinas Budaya dan Pariwisata (Disbudpar) Pemerintah Kota Surabaya, kota Surabaya sebetulnya telah melakukan program-program *defense heritage* tanpa mengetahui adanya ide *defense heritage* itu sendiri. Disbudpar pemerintah kota Surabaya baru mengenal adanya *defense heritage* ketika kajian ini melakukan wawancara mendalam.

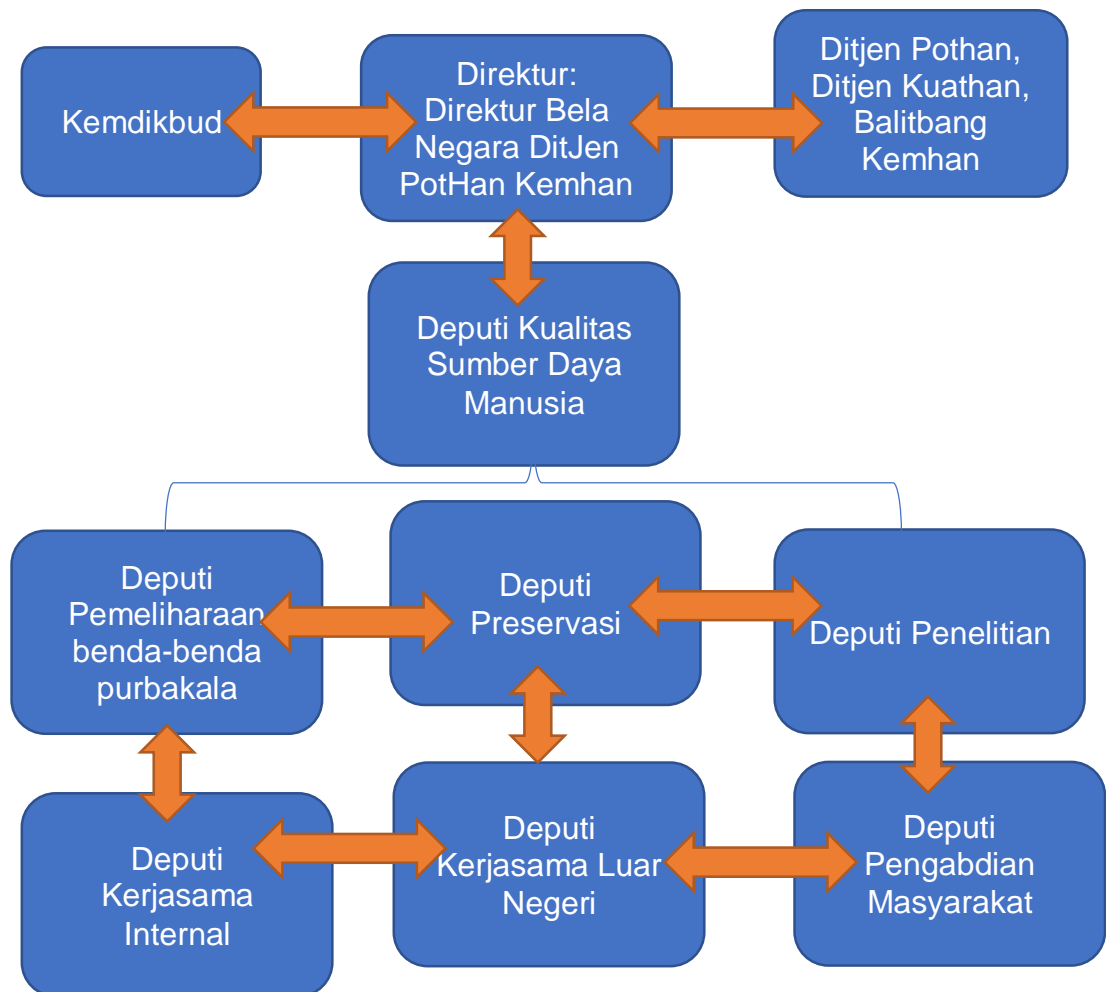
Apabila suatu hari nanti Indonesia sudah mengenal konsep *defense heritage*, maka kajian ini mengusulkan bagan model cagar budaya *defense heritage* sebagai sarana program bela negara di kota Surabaya sebagai berikut.



Gambar 4.23 Model Pengelolaan *Defense Heritage* Level 1

Sumber: Olahan peneliti, 2021

Di dalam Model 1, struktur organisasi terdiri dari Direktur yakni Direktur Bela Negara Ditjen Pothan Kemhan yang bekerjasama dengan Ditjen Pothan, Ditjen Kuathan Kemhan, dan Balitbang Kemhan, serta Kemdikbud. Direktur membawahi 7 (tujuh) Deputi, yakni Deputi Kualitas Sumber Daya Manusia, Deputi pemeliharaan benda-benda purbakala, Deputi Preservasi, Deputi Internal, Deputi Kerjasama Luar Negeri, Deputi Penelitian, dan Deputi Pengabdian Masyarakat. Deputi Kualitas Sumber Daya Manusia ditempatkan sebagai Deputi sektor utama, sebab bertugas untuk membina sumber daya manusia agar mengelola objek-objek defense heritage dengan lebih baik lagi. Berikut adalah Struktur Organisasinya.



Gambar 4.24 Struktur Organisasi Model Pengelolaan *Defense Heritage* Level 1 di kota Surabaya

Sumber: Olahan peneliti, 2021

Di dalam Model 1, objek-objek *defense heritage* sudah dianggap terawat dan terpelihara, sehingga program-program bela negara yang dijalankan lebih kepada sosialisasi dan informasi kepada masyarakat, seperti misalnya video kunjungan virtual dalam jangka pendek, penelitian yang mendalam tentang *defense heritage* di tiap kota/provinsi, dan penyiapan *website* yang mampu mendigitalisasikan *defense heritage* berdasarkan “Peta Defense Heritage” pada Lampiran. Berikut uraiannya:

a. Ditjen Pothan DirBelNeg Kemhan:

1). Sub Direktorat Pendidikan Lingkungan:

- Membangun komunikasi secara lisan dengan Kemdikbud, terutama Dirjen Pelestarian Cagar Budaya, Pemerintah provinsi/kota setempat, dan pemilik/penjaga gedung bersejarah atau kepala museum dalam hal adanya kebutuhan untuk penyusunan cetak biru *defense heritage* Indonesia, yang perlu melibatkan semua pihak dan Kemhan sebagai inisiator;

- Melakukan koordinasi yang diperlukan dengan Kemdikbud, terutama Dirjen Pelestarian Cagar Budaya, Pemerintah provinsi/kota setempat, dan pemilik/penjaga gedung bersejarah atau kepala museum dalam hal sosialisasi video kunjungan virtual di objek-objek *defense heritage* pada Level 1;
- Sembari membangun komunikasi dan koordinasi itu, menyiapkan bahan ajar bela negara yang telah berisi pemahaman tentang *defense heritage* pada Level 1;
- Menyiapkan implementasi kota percontohan (dalam hal ini Jakarta dan Surabaya) dengan sosialisasi laman website yang berisi video kunjungan virtual dan bahan ajar *defense heritage*.
- Membangun komunikasi lisan dengan sekolah-sekolah dan Universitas, terutama Universitas Pertahanan sebagai kampus bela negara dalam hal mensosialisasikan video kunjungan virtual dan bahan ajar *defense heritage* sebagai sarana program bela negara.

2). Sub Direktorat Lingkungan Pekerjaan:

- Menyiapkan rencana anggaran tentang program bela negara yang telah memuat aspek-aspek *defense heritage* kepada Menhan;
- Mencatat semua nomor telepon dan email pejabat di Kemdikbud dan pemerintah kota/provinsi untuk dapat membentuk grup “Telegram Inisiator Defense Heritage” sebagai koordinasi awal;
- Sembari menyusun anggaran dan koordinasi itu, menyiapkan video kunjungan virtual ke objek-objek *defense heritage* di Level 1;
- Menyiapkan surat-surat pendukung untuk kementerian dan Lembaga negara terkait, serta pemilik/penjaga gedung bersejarah atau kepala museum tentang adanya kebutuhan FGD dalam hal penyusunan cetak biru *defense heritage*;

3). Sub Direktorat Lingkungan Pemukiman:

- Membangun komunikasi secara lisan dengan KemenPUPR, Pemerintah provinsi/kota setempat dalam hal adanya kebutuhan untuk penyusunan cetak biru *defense heritage* Indonesia, yang perlu melibatkan semua pihak dan Kemhan sebagai inisiator;
- Melakukan koordinasi yang diperlukan dengan KemenPUPR, Pemerintah provinsi/kota setempat, dan pemilik/penjaga gedung bersejarah atau kepala

- museum dalam hal sosialisasi video kunjungan virtual di objek-objek *defense heritage* di Level 1;
- Sembari membangun komunikasi dan koordinasi itu, menyiapkan usulan kerja Revitalisasi objek-objek *defense heritage* di Level 2;
 - Menyiapkan implementasi kota percontohan (dalam hal ini Jakarta dan Surabaya) dengan sosialisasi laman *website* yang berisi video kunjungan virtual dan bahan ajar *defense heritage*.

b. Balitbang Kemhan:

- 1) Melakukan penelitian (studi literatur, wawancara mendalam, dan studi banding ke Inggris, Australia, Singapura, dan Amerika) tentang *defense heritage* secara umum di Indonesia;
- 2) Melakukan penelitian (studi literatur, wawancara mendalam, dan studi banding ke Inggris, Australia, Singapura, dan Amerika) tentang *defense heritage* di Surabaya;
- 3) Melakukan penelitian (studi literatur, wawancara mendalam, dan studi banding ke Inggris, Australia, Singapura, dan Amerika) tentang *defense heritage* di Jakarta;
- 4) Membuat Denah Kepemilikan objek-objek *defense heritage* berdasarkan kepemilikan aset secara umum di Indonesia;
- 5) Membuat Denah Kepemilikan objek-objek *defense heritage* berdasarkan kepemilikan aset di Surabaya;
- 6) Membuat Denah Kepemilikan objek-objek *defense heritage* berdasarkan kepemilikan aset di Jakarta;
- 7) Membuat Peta Defense Heritage di Indonesia;
- 8) Membuat Peta Defense Heritage di Surabaya;
- 9) Memetakan kategorisasi level *defense heritage*;
- 10) Menyiapkan bahan ajar *defense heritage* untuk para guru dan murid;
- 11) Menyusun cetak biru Museum Pertahanan Indonesia (*Indonesian Defense Museum*) berdasarkan konsep *defense heritage*.

c. Ditjen Kuathan Kemhan:

- 1) Membangun komunikasi lisan dengan Dinas PUPR, pemerintah provinsi/kota setempat, dan pemilik/penjaga gedung bersejarah atau kepala museum dalam hal sosialisasi *defense heritage* menurut wilayah pertahanan;
- 2) Memberikan rekomendasi aturan-aturan hukum untuk revisi UU Cagar Budaya agar dapat memuat aspek-aspek *defense heritage*;
- 3) Memberikan rekomendasi aturan-aturan hukum untuk revisi UU Revitalisasi yang berkenaan dengan Revitalisasi cagar budaya;
- 4) Menyusun narasi ilmiah tentang kota Jakarta sebagai kota yang akan dibangun Museum Pertahanan Indonesia (*Indonesia Defense Museum*);
- 5) Melakukan koordinasi yang diperlukan dengan TNI, Pusjarah TNI, pemerintah provinsi/kota, dan pemilik/penjaga gedung bersejarah atau kepala museum dalam hal penyiapan pembangunan Museum Pertahanan Indonesia (*Indonesia Defense Museum*).

d. Kemdikbud:

- 1) Mendukung usulan pengelolaan *defense heritage* sebagai sarana program bela negara oleh Kemhan di kota Surabaya;
- 2) Melaksanakan pelatihan awal tentang Perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan objek-objek cagar budaya kepada Balitbang Kemhan;
- 3) Mengusulkan narasi *defense heritage* ke dalam Muatan Lokal Pendidikan Sejarah dan Seni-Budaya di dalam Kurikulum Pendidikan Nasional Tahun 2013;
- 4) Bekerjasama dengan Kemenristek DIKTI untuk merumuskan narasi *defense heritage* dalam mata kuliah sejarah pertahanan nasional pada level S1, S2, dan S3.

e. Pemerintah kota Surabaya:

- 1) Melakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan cagar budaya bernilai pertahanan (*defense heritage*) sebagai sarana program bela negara di kota Surabaya;
- 2) Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan

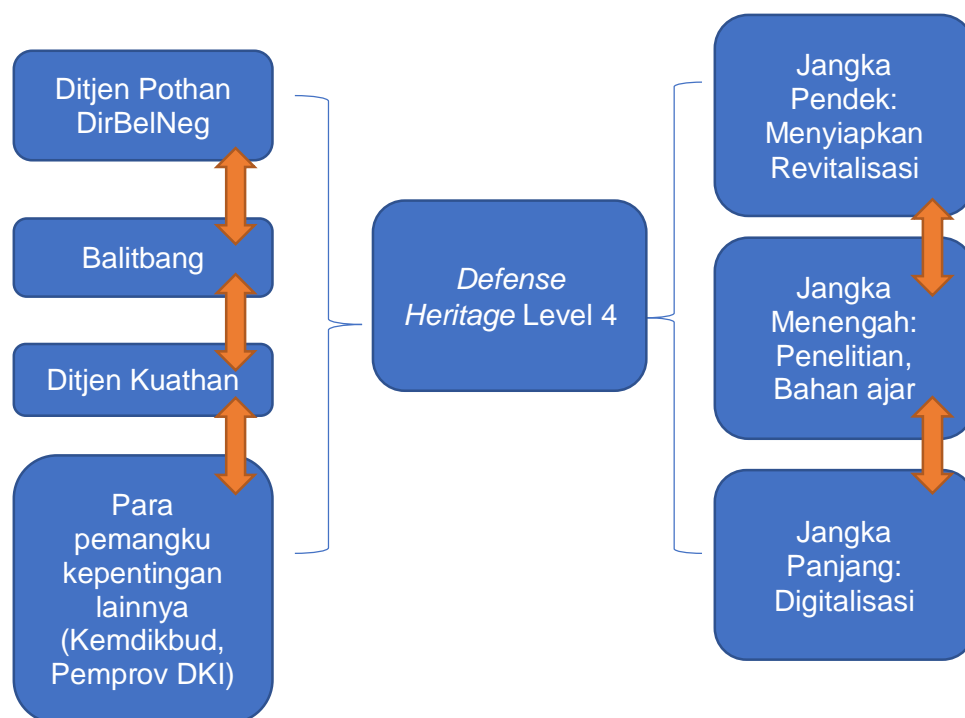
cagar budaya bernilai pertahanan (*defense heritage*) sebagai sarana program bela negara di kota Surabaya;

- 3) Mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya cagar budaya bernilai pertahanan (*defense heritage*) sebagai sarana program bela negara di kota Surabaya;
- 4) Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan cagar budaya bernilai pertahanan (*defense heritage*) sebagai sarana program bela negara di kota Surabaya;
- 5) Menyediakan informasi cagar budaya bernilai pertahanan (*defense heritage*) sebagai sarana program bela negara di kota Surabaya untuk masyarakat;
- 6) Menyelenggarakan promosi cagar budaya bernilai pertahanan (*defense heritage*) sebagai sarana program bela negara di kota Surabaya;
- 7) Bekerjasama dengan anak-anak muda pemerhati sejarah, duta budaya, komunitas-komunitas sejarah, Universitas Pertahanan, dan Defense Heritage Intellectual Community (DHIC) dalam membuat konten sosial media, kunjungan virtual, webinar, dan acara-acara yang menarik tentang *defense heritage* sebagai sarana program bela negara di kota Surabaya;
- 8) Memfasilitasi setiap orang dalam melaksanakan pemanfaatan dan promosi cagar budaya bernilai pertahanan (*defense heritage*) sebagai sarana program bela negara di kota Surabaya;
- 9) Menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat untuk benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang telah dinyatakan sebagai cagar budaya bernilai pertahanan (*defense heritage*) serta memberikan dukungan terhadap daerah yang mengalami bencana;
- 10) Melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelestarian cagar budaya bernilai pertahanan (*defense heritage*) sebagai sarana program bela negara;
- 11) Mengalokasikan dana bagi kepentingan pelestarian cagar budaya dan bersinergi dengan Kemhan dan Kemdikbud dalam mengalokasikan dana bagi kepentingan pelestarian cagar budaya bernilai pertahanan (*defense heritage*).
- 12) Bekerjasama dengan Kemenparekraf dalam menyusun aspek-aspek ekonomi dan investasi bagi *defense heritage* di kota Surabaya.

4.3.2.2 Model Pengelolaan Cagar Budaya Bernilai Pertahanan (*Defense Heritage*) Sebagai Sarana Program Bela Negara di Kota Jakarta

Berdasarkan level kategorisasi *defense heritage*, Jakarta terdapat objek di Level 1 (Museum Fatahillah dan kompleks Kota Tua) dan di Level 4 (Benteng Jayakarta atau Benteng Jakarta di Museum Bahari). Kajian ini menemukan bahwa Benteng Jakarta adalah *defense heritage* pertama di Indonesia yang berpotensi akan hilang apabila tidak segera dilakukan tindakan. Selanjutnya disusul objek yang berpotensi akan hancur adalah Veldbak Manado dan Benteng Amsterdam di Kota Ambon. Oleh sebab itu, Indonesia perlu segera memikirkan model pengelolaan objek *defense heritage* yang secara penelitian dan pengembangan kurang dilakukan oleh Kemdikbud.

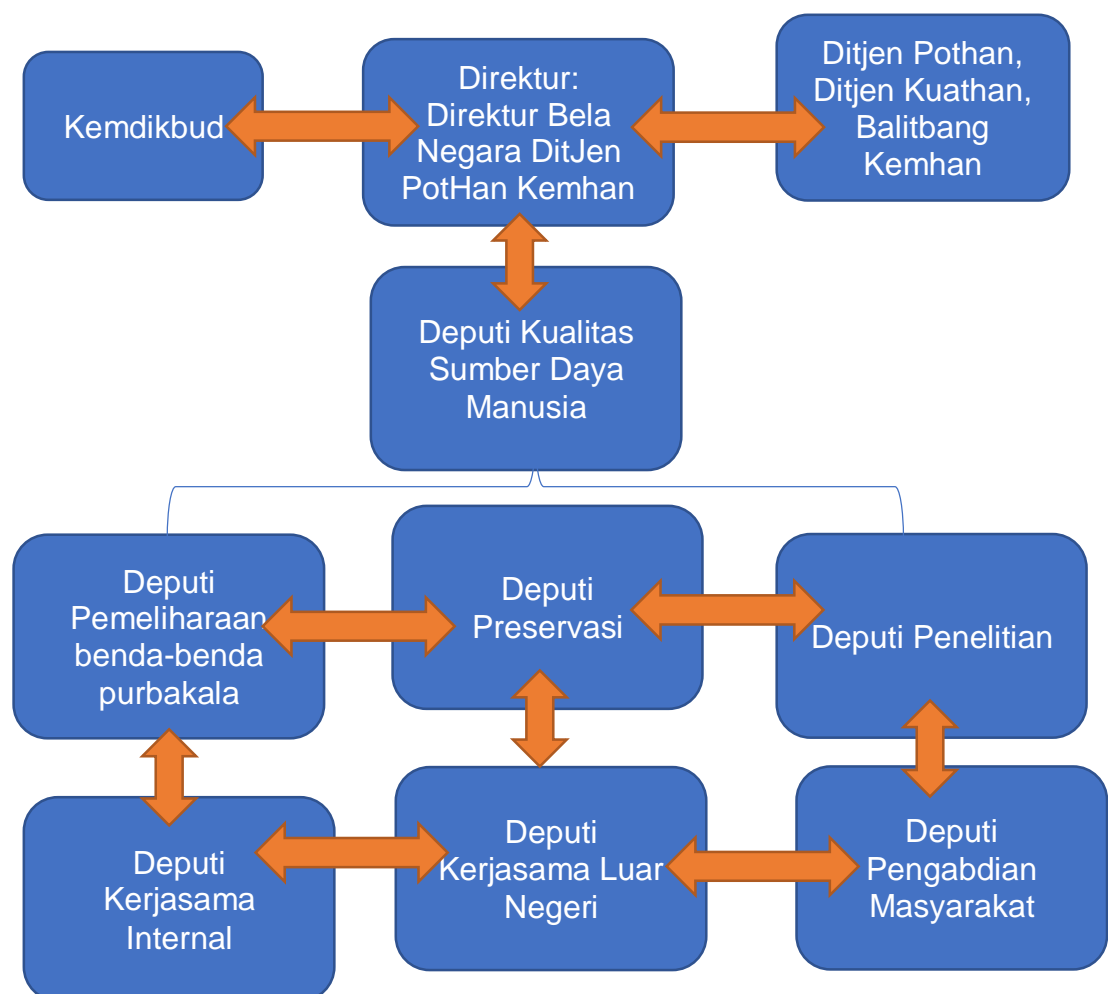
Apabila suatu hari nanti Indonesia sudah mengenal konsep *defense heritage*, maka kajian ini mengusulkan bagan model cagar budaya *defense heritage* sebagai sarana program bela negara di kota Jakarta sebagai berikut.



Gambar 4.25 Model Pengelolaan *Defense Heritage* Level 4

Sumber: Olahan peneliti, 2021

Di dalam Model 4, struktur organisasi terdiri dari Direktur yakni Direktur Bela Negara Ditjen PotHan Kemhan yang bekerjasama dengan Ditjen PotHan, Ditjen Kuathan Kemhan, dan Balitbang Kemhan, serta Kemdikbud. Direktur membawahi 7 (tujuh) Deputi, yakni Deputi Kualitas Sumber Daya Manusia, Deputi pemeliharaan benda-benda purbakala, Deputi Preservasi, Deputi Internal, Deputi Kerjasama Luar Negeri, Deputi Penelitian, dan Deputi Pengabdian Masyarakat. Deputi Kualitas Sumber Daya Manusia ditempatkan sebagai Deputi sektor utama, sebab bertugas untuk membina sumber daya manusia agar mengelola objek-objek *defense heritage* dengan lebih baik lagi.



Gambar 4.26 Struktur Organisasi Model Pengelolaan *Defense Heritage* Level 4 di kota Jakarta

Sumber: Olahan peneliti, 2021

Di dalam Model 4 untuk Jakarta, program-program bela negara yang dijalankan lebih kepada sosialisasi dan informasi kepada masyarakat bahwa objek-objek *defense heritage* seperti Benteng Jakarta memerlukan Revitalisasi total. Berikut uraiannya:

a. Ditjen Pothan DirBelNeg Kemhan:

1) Sub Direktorat Pendidikan Lingkungan:

- Membangun komunikasi secara lisan dengan Kemdikbud, terutama Dirjen Pelestarian Cagar Budaya, Pemerintah provinsi/kota setempat, dan pemilik/penjaga gedung bersejarah atau kepala museum dalam hal adanya kebutuhan untuk penyusunan cetak biru *defense heritage* Indonesia, yang perlu melibatkan semua pihak dan Kemhan sebagai inisiator;
- Melakukan koordinasi yang diperlukan dengan Kemdikbud, terutama Dirjen Pelestarian Cagar Budaya, Pemerintah provinsi/kota setempat, dan pemilik/penjaga gedung bersejarah atau kepala museum dalam hal sosialisasi bahwa objek-objek *defense heritage* memerlukan Revitalisasi total pada Level 4 (terutama Benteng Jakarta);
- Sembari membangun komunikasi dan koordinasi itu, menyiapkan bahan ajar bela negara yang berisi narasi sejarah nasional dibalik objek-objek *defense heritage* yang telah tidak terawat, rusak, beralih fungsi, bahkan hampir punah pada Level 4 (terutama Benteng Jakarta);
- Membangun komunikasi lisan dengan sekolah-sekolah dan Universitas, terutama Universitas Pertahanan sebagai kampus bela negara dalam hal mensosialisasikan bahan ajar bela negara yang berisi narasi sejarah nasional dibalik objek-objek *defense heritage* yang telah tidak terawat, rusak, beralih fungsi, bahkan hampir punah pada Level 4 (terutama Benteng Jakarta);

2) Sub Direktorat Lingkungan Pekerjaan:

- Menyiapkan rencana anggaran tentang program bela negara yang telah memuat aspek-aspek *defense heritage* kepada Menhan;
- Mencatat semua nomor telepon dan email pejabat di Kemdikbud dan pemerintah kota/provinsi untuk dapat membentuk grup “Telegram Inisiator Defense Heritage” sebagai koordinasi awal;
- Sembari menyusun anggaran dan koordinasi itu, mendukung segala ahil yang diperlukan dalam penyelesaian bahan ajar bela negara yang berisi narasi sejarah nasional dibalik objek-objek *defense heritage* yang telah tidak

- terawat, rusak, beralih fungsi, bahkan hampir punah pada Level 4 (terutama Benteng Jakarta);
- Menyiapkan surat-surat pendukung untuk kementerian dan Lembaga negara terkait, serta pemilik/penjaga gedung bersejarah atau kepala museum tentang adanya kebutuhan FGD dalam hal penyusunan cetak biru *defense heritage*;
- 3) Sub Direktorat Lingkungan Pemukiman:
- Membangun komunikasi secara lisan dengan KemenPUPR, Pemerintah provinsi/kota setempat dalam hal adanya kebutuhan untuk penyusunan cetak biru *defense heritage* Indonesia, yang perlu melibatkan semua pihak dan Kemhan sebagai inisiator;
 - Melakukan koordinasi yang diperlukan dengan KemenPUPR, Pemerintah provinsi/kota setempat, dan pemilik/penjaga gedung bersejarah atau kepala museum dalam hal sosialisasi bahan ajar bela negara yang berisi narasi sejarah nasional dibalik objek-objek *defense heritage* yang telah tidak terawat, rusak, beralih fungsi, bahkan hampir punah pada Level 4 (terutama Benteng Jakarta);
 - Sembari membangun komunikasi dan koordinasi itu, menyiapkan usulan kerja Revitalisasi objek-objek *defense heritage* di Level 4 (terutama Benteng Jakarta);
 - Menyiapkan implementasi kota percontohan (dalam hal ini Jakarta dan Surabaya) dengan sosialisasi bahan ajar bela negara yang berisi narasi sejarah nasional dibalik objek-objek *defense heritage* yang telah tidak terawat, rusak, beralih fungsi, bahkan hampir punah pada Level 4 (Benteng Jakarta);
- b. Balitbang Kemhan:
- 1) Melakukan penelitian (studi literatur, wawancara mendalam, dan studi banding ke Inggris, Australia, Singapura, dan Amerika) tentang *defense heritage* secara umum di Indonesia;
 - 2) Melakukan penelitian (studi literatur, wawancara mendalam, dan studi banding ke Inggris, Australia, Singapura, dan Amerika) tentang *defense heritage* di Surabaya;

- 3) Melakukan penelitian (studi literatur, wawancara mendalam, dan studi banding ke Inggris, Australia, Singapura, dan Amerika) tentang *defense heritage* di Jakarta;
 - 4) Membuat Denah Kepemilikan objek-objek *defense heritage* berdasarkan kepemilikan aset secara umum di Indonesia;
 - 5) Membuat Denah Kepemilikan objek-objek *defense heritage* berdasarkan kepemilikan aset di Surabaya;
 - 6) Membuat Denah Kepemilikan objek-objek *defense heritage* berdasarkan kepemilikan aset di Jakarta;
 - 7) Membuat Peta Defense Heritage di Indonesia;
 - 8) Membuat Peta Defense Heritage di Jakarta;
 - 9) Memetakan kategorisasi level *defense heritage*;
 - 10) Menyiapkan bahan ajar *defense heritage* untuk para guru dan murid;
 - 11) Menyusun cetak biru Museum Pertahanan Indonesia (*Indonesian Defense Museum*) berdasarkan konsep *defense heritage*;
 - 12) Khusus untuk Defense Heritage Level 3 dan 4, melakukan kajian tentang tokoh atau masyarakat lokal yang ikut berjuang di tiap-tiap objek *defense heritage*;
 - 13) Khusus untuk Defense Heritage Level 3 dan 4, Balitbang Kemhan membawa hasil kajian untuk meminta saran Dinas Sosial Sub Direktorat Kepahlawanan.
- c. DitJen Kuathan Kemhan:
- 1) Membangun komunikasi lisan dengan Dinas PUPR, pemerintah provinsi/kota setempat, dan pemilik/penjaga gedung bersejarah atau kepala museum dalam hal sosialisasi *defense heritage* menurut wilayah pertahanan;
 - 2) Memberikan rekomendasi aturan-aturan hukum untuk revisi UU Cagar Budaya agar dapat memuat aspek-aspek *defense heritage*;
 - 3) Memberikan rekomendasi aturan-aturan hukum untuk revisi UU Revitalisasi yang berkenaan dengan Revitalisasi cagar budaya;
 - 4) Menyusun narasi ilmiah tentang kota Jakarta sebagai kota yang akan dibangun Museum Pertahanan Indonesia (*Indonesia Defense Museum*);
 - 5) Melakukan koordinasi yang diperlukan dengan TNI, Pusjarah TNI, pemerintah provinsi/kota, dan pemilik/penjaga gedung bersejarah atau kepala museum dalam hal penyiapan pembangunan Museum Pertahanan Indonesia (*Indonesia Defense Museum*).

d. Kemdikbud:

- 1) Mendukung usulan pengelolaan *defense heritage* sebagai sarana program bela negara oleh Kemhan di Jakarta;
- 2) Melaksanakan pelatihan awal tentang Perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan objek-objek cagar budaya kepada Balitbang Kemhan;
- 3) Mengusulkan narasi *defense heritage* ke dalam Muatan Lokal Pendidikan Sejarah dan Seni-Budaya di dalam Kurikulum Pendidikan Nasional Tahun 2013;
- 4) Bekerjasama dengan Kemenristek DIKTI untuk merumuskan narasi *defense heritage* dalam mata kuliah sejarah pertahanan nasional pada level S1, S2, dan S3.

e. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta:

- 1) Melakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan cagar budaya bernilai pertahanan (*defense heritage*) sebagai sarana program bela negara di Jakarta;
- 2) Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan cagar budaya bernilai pertahanan (*defense heritage*) sebagai sarana program bela negara di Jakarta;
- 3) Mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya cagar budaya bernilai pertahanan (*defense heritage*) sebagai sarana program bela negara di Jakarta;
- 4) Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan cagar budaya bernilai pertahanan (*defense heritage*) sebagai sarana program bela negara di Jakarta;
- 5) Menyediakan informasi cagar budaya bernilai pertahanan (*defense heritage*) sebagai sarana program bela negara di Jakarta untuk masyarakat;
- 6) Menyelenggarakan promosi cagar budaya bernilai pertahanan (*defense heritage*) sebagai sarana program bela negara di Jakarta;
- 7) Bekerjasama dengan anak-anak muda pemerhati sejarah, duta budaya, komunitas-komunitas sejarah, Universitas Pertahanan, dan Defense Heritage Intellectual Community (DHIC) dalam membuat konten sosial media, kunjungan virtual, webinar, dan acara-acara yang menarik tentang *defense heritage* sebagai sarana program bela negara di Jakarta;

- 8) Memfasilitasi setiap orang dalam melaksanakan pemanfaatan dan promosi cagar budaya bernilai pertahanan (*defense heritage*) sebagai sarana program bela negara di Jakarta;
- 9) Menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat untuk benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang telah dinyatakan sebagai cagar budaya bernilai pertahanan (*defense heritage*) serta memberikan dukungan terhadap daerah yang mengalami bencana;
- 10) Melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelestarian cagar budaya bernilai pertahanan (*defense heritage*) sebagai sarana program bela negara;
- 11) Mengalokasikan dana bagi kepentingan pelestarian cagar budaya dan bersinergi dengan Kemhan dan Kemdikbud dalam mengalokasikan dana bagi kepentingan pelestarian cagar budaya bernilai pertahanan (*defense heritage*).
- 12) Bekerjasama dengan Kemenparekraf dalam menyusun aspek-aspek ekonomi dan investasi bagi *defense heritage* di Jakarta.

Pada tugas wewenang Balitbang Kemhan poin b.10 untuk kota Surabaya dan Jakarta (Menyiapkan bahan ajar *defense heritage* untuk para guru dan murid), bahan ajar tersebut juga harus diusulkan Kemhan untuk masuk kepada Kurikulum Pendidikan Nasional Tahun 2013. Kajian ini menilai bahwa Kurikulum masa depan kita akan dimodernisasi oleh kebutuhan untuk mengetahui tentang cagar budaya bernilai pertahanan (*defense heritage*), yang sedang dipelajari oleh UNESCO akhir tahun 2000-an. Keberadaan konsep *Defense Heritage* ini sejalan dengan pembelajaran sejarah modern. Sebab dunia modern ingin tahu lebih banyak tentang sejarah global, untuk menemukan harta terpendam suatu bangsa, atau untuk menemukan cara untuk melindungi cagar budaya, terlebih Indonesia juga termasuk sebagai negara yang rawan bencana. Jika negara lain sudah mengubah kurikulum sejarahnya, maka Indonesia harus memulai tren ini, tetapi perubahan itu tidak berarti menjadi kebarat-baratan. Perubahan kurikulum harus mengarah pada masyarakat Indonesia yang lebih beradab.

Kajian ini setuju pada penelitian Inkeles-Smith (dikutip pada Rahayu, p.78) bahwa aspek inti dari modernisasi adalah kualitas manusia. Itulah mengapa kajian ini akan berbicara tentang pentingnya menambahkan kurikulum cagar budaya di sekolah-sekolah Indonesia, karena mengetahui sejarah adalah untuk memprediksi

masa depan. Kurikulum sejarah Indonesia masih dalam proses untuk lebih dimodernisasi dan lebih berpusat pada siswa. Di Indonesia, guru hanya memberikan mata pelajaran untuk dihafal oleh siswa; tanggal, orang, dan acara. Jika siswa kreatif, mereka dapat pergi ke Google dan menemukan seluruh sejarah, tetapi masalahnya adalah apa yang akan diuji adalah yang diberikan oleh guru dan siswa tidak mengajukan pertanyaan kritis, seperti "mengapa A adalah pahlawan, tetapi B bukan?" (Ghani, 2018).

Masuknya *Defense Heritage* sebagai program bela negara ke dalam Kurikulum 2013 sebaiknya mempertimbangkan beberapa aspek:

a. Kurikulum modernisasi bukan kurikulum Westernisasi

Implementasi kurikulum 2013 yang akan memasukkan muatan lokal *defense heritage* sebagai program bela negara misalnya dengan cara evaluasi pendidikan bagi siswa untuk mengunjungi bangunan bersejarah, monumen, atau museum di kota mereka dan setelah itu mereka harus menulis laporan dalam format esai. Kemudian di kelas siswa dapat mendiskusikan mengapa beberapa bangunan penting bagi suatu bangsa, tetapi dipandang sebagai memori buruk bagi bangsa lain. Hal ini sesuai dengan Teori Pierre Nora pada Bab 2 Teori;

b. Guru memberi siswa beberapa ruang untuk memiliki pemikiran kritis di kelas sejarah.

Pada Tahun Baru 2020, Jakarta dan sekitarnya mengalami banjir besar. Pengalaman ini dapat digunakan sebagai evaluasi pendidikan sesuai Teori pada Bab 2, misalnya di kelas sejarah, guru dapat bertanya "apa yang Anda lakukan jika ada bangunan peninggalan pertahanan, museum, atau artefak, yang dirusak oleh bencana alam?". Pertama-tama siswa harus tahu apakah terdapat objek *defense heritage* berupa bangunan bersejarah, monumen, atau museum di kota mereka.

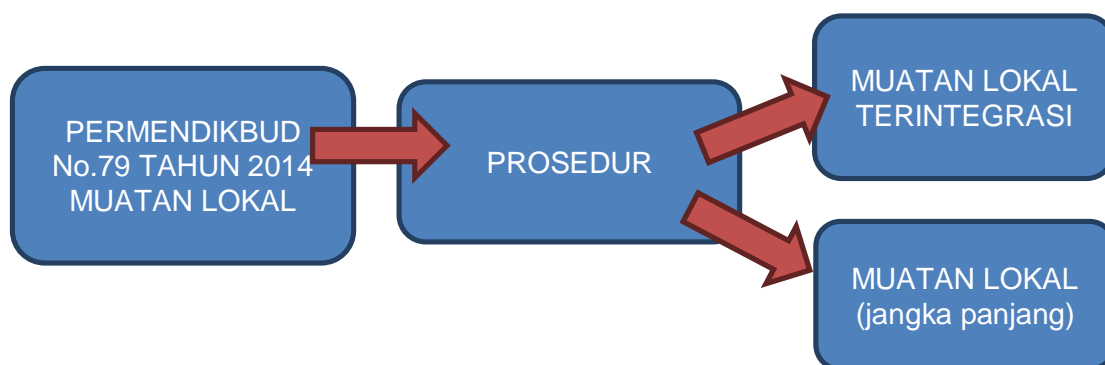
c. Studi banding tentang kurikulum warisan budaya.

Indonesia adalah negara terbesar di ASEAN. Dalam langkah pertama menciptakan muatan lokal *defense heritage* sebagai program bela negara, Kementerian Pertahanan, terutama Balitbang Kemhan, dapat bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan untuk mengundang Kementerian Pendidikan negara-negara ASEAN lainnya untuk mendengarkan pengalaman mereka tentang perubahan kurikulum sejarah di zaman modern ini, sehingga Kementerian Pertahanan akan mendapatkan muatan lokal *defense heritage* sebagai program bela negara yang terbaik dan sesuai.

Balitbang Kemhan dapat memulai melakukan sosialisasi, komunikasi, dan koordinasi dengan Kementerian Pendidikan untuk memasukkan muatan lokal *defense heritage* sebagai program bela negara, sehingga para siswa sadar akan objek *defense heritage* dapat berwujud bangunan bersejarah, monumen, atau museum terdekat di kota mereka, menghormati para pendiri bangsa dan pahlawan, bangga terhadap perjuangan bangsa, dan meningkatkan kepercayaan diri di dalam pergaulan internasional.

Implementasi kurikulum 2013 yang akan memasukkan muatan lokal *defense heritage* sebagai program bela negara adalah bagian dari modernisasi kurikulum pendidikan, untuk melestarikan sejarah nasional, dan untuk mempersiapkan siswa sebagai manusia yang berkualitas dan berkesadaran sejarah, serta manusia modern yang tercerahkan dari perjuangan bangsa di masa lampau untuk menyiapkan pembangunan yang berkelanjutan pada Tahun Emas Indonesia 2045.

Sesuai dengan notulensi hasil penelitian RTD dengan para guru dan murid, didapatkan bahwa guru dan murid memiliki persepsi yang positif tentang adanya *defense heritage* ini. Para guru dan murid juga mendukung apabila *defense heritage* sebagai sarana program bela negara dapat dijadikan sebagai sebuah Muatan Lokal Kurikulum. Namun sesuai dengan Permendikbud Tahun 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013, Pasal 7 ayat 2 bahwa pemerintah kota/kabupaten harus melakukan analisis dan identifikasi terhadap usulan satuan pendidikan, perumusan kompetensi dasar, dan penentuan tingkat satuan pendidikan.



Gambar 4.27. Ringkasan Notulensi 3x RTD dengan Para Guru dan Murid

Sumber: Olahan Peneliti, 2021

Oleh sebab itu, sesuai dengan usulan kajian ini tentang model pengelolaan *defense heritage* sebagai sarana program bela negara yang menempatkan Kementerian Pertahanan sebagai inisiator dan pimpinan pemangku kepentingan

seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, maka *defense heritage* sebagai Muatan Lokal Kurikulum baru akan dapat terjadi ketika Balitbang Kemhan, bekerjasama dengan pemerintah kota/kabupaten melakukan tahapan sebagai berikut:

- a. Melakukan analisis dan identifikasi terhadap usulan dari satuan pendidikan, dalam hal ini adalah Asosiasi Guru Sejarah Indonesia (AGSI).
- b. Melakukan perumusan kompetensi dasar murid SD, SMP, dan SMA terkait karakteristik pemahaman tentang *defense heritage* sebagai program bela negara.
- c. Menentukan bahan ajar SD, SMP, dan SMA *defense heritage* sebagai program bela negara yang disesuaikan sesuai dengan tingkat satuan pendidikan.

Selama proses tersebut belum terjadi maka untuk jangka pendek kajian ini mengusulkan tentang Muatan Lokal Terintegrasi, sesuai dengan 5 (lima) poin Muatan Lokal di dalam Permendikbud Tahun 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013 Pasal 4 ayat 1, yakni *defense heritage* sebagai sarana program bela negara menjadi muatan lokal terintegrasi dengan muatan lokal Seni dan Budaya. Oleh sebab itu, Balitbang Kemhan dan Ditjen Pothan DirBelNeg dapat bekerjasama dengan satuan pendidikan, dalam hal ini AGSI dalam menyusun bahan ajar *defense heritage* sebagai program bela negara untuk guru dan siswa SD, SMP, dan SMA.

Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru/ instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Bahan yang dimaksud bisa berupa bahan tertulis maupun bahan tidak tertulis. (National Center for Vocational Education Research Ltd/National Center for Competency Based Training).

Bahan ajar yang dimaksud dalam penelitian kajian merupakan informasi, alat, dan teks yang diperlukan guru/instruktur untuk perencanaan dan penelaahan implementasi pembelajaran tentang *defense heritage* sebagai program bela negara.

- a. Bahan cetak seperti: *hand out, buku, modul, lembar kerja siswa, brosur, leaflet, wallchart*, Misalnya Feed IG Stories dan Komik *Defense Heritage* yang menjelaskan secara sederhana pengenalan awal atau sosialisasi tentang *defense heritage*;
- b. Audio Visual seperti: Podcast Instagram, *video/film, VCD* yang menggambarkan *defense heritage*. Podcast Spotify telah dibuat oleh kajian ini pada laman: [spoti.fi/3ij6w0N](https://open.spotify.com/playlist/3ij6w0N);
- c. Audio seperti: *radio, kaset, CD audio*

- d. Visual: *foto, gambar, model/maket*, misalnya yang telah dibuat oleh kajian ini dalam Feed Instagram @defenseheritage
- e. Multi Media: *CD interaktif, computer Based, Internet*, dan website khusus tentang *Indonesian Defense Heritage* yang berada di bawah pengelolaan Kementerian Pertahanan, terutama Balitbang Kemhan.

Dalam penyusunan materi bahan ajar bela negara, kajian ini mengacu pada bagan Alur Analisis Penyusunan Bahan Ajar dari Tim Penyusun "Modul Bela Negara" Universitas Pertahanan pada tahun 2019 sebagai berikut ini.



Gambar 4.28. Alur Analisis Penyusunan Bahan Ajar Modul Bela Negara

Sumber: Universitas Pertahanan, 2019

Sesuai dengan alur analisis tersebut, langkah pertama yang penting adalah membangun komunikasi antara Balitbang Kemhan dan Ditjen Pothan DirBelNeg dengan Kemdikbud dalam hal menyusun Modul *defense heritage* sebagai program bela negara yang dapat menghasilkan alternatif bahan ajar, sehingga para siswa SD, SMP, dan SMA dapat mengenal lebih dalam tentang *defense heritage* secara lebih menyenangkan.

Kemudian setelah itu para pemangku kepentingan terkait mengidentifikasi kompetensi dasar, indikator, materi pembelajarn, dan kegiatan pembelajaran yang memperkuat narasi bahwa *defense heritage* amat diperlukan sebagai program bela negara untuk mendukung Indonesia menjadi negara maju dan modern pada Tahun

Emas 2045. Setelah itu kemudian dihasilkan bahan ajar *defense heritage* sebagai program bela negara.

Sesuai dengan Bab 2 Teori Evaluasi Pendidikan bahwa keberhasilan pembelajaran dapat ditentukan dengan keterampilan guru dalam memilih dan menerapkan metode pembelajaran dan strategi pembelajaran yang tepat. Terkait dengan kajian ini, maka diusulkan bahan ajar *defense heritage* sebagai program bela negara adalah berupa Komik *Defense Heritage* (Lampiran).

Sesuai dengan RTD bersama para guru dan siswa yang telah dilakukan, persepsi para guru dan siswa terhadap *defense heritage* sebagai program bela negara amat positif dan menyambut baik. Oleh sebab itu, bahan ajar *defense heritage* sebagai program bela negara berupa Komik *Defense Heritage* adalah sarana agar para guru dan siswa SD, SMP, dan SMA dapat lebih interaktif dan lebih menyenangkan dalam mempelajari *defense heritage*.

Komik *Defense Heritage* dapat membantu para siswa melakukan pembelajaran secara mandiri dan lebih menyenangkan untuk memahami *defense heritage* sebagai sarana program bela negara. Di masa pandemi Covid 19 ini Kementerian Pendidikan memiliki metode pembelajaran yang memberikan keleluasaan kepada guru dan murid SD, SMP, dan SMA, atau dikenal dengan kebijakan “Merdeka Belajar”. “Merdeka Belajar” tersebut sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 alinea IV dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, terutama Pasal 31 ayat 3, yang menyatakan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan UU Sisdiknas Tahun 2003 yang menimbang bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan (Kemdikbud, 2020).

Adapun instrumen pengukuran yang digunakan dalam pembelajaran *defense heritage* sebagai program bela negara dapat berupa:

a. Tes tentang objek *defense heritage* apa saja yang sudah dikunjungi para siswa SD, SMP, dan SMA secara virtual. Di Jakarta misalnya sudah ada beberapa virtual tur, yakni:

- 1) Monumen Nasional: <http://bit.ly/MonasVirtualTour>
- 2) Teater Jakarta: <http://bit.ly/TeaterJakarta>
- 3) Planetarium dan Observatorium Jakarta: <http://bit.ly/PlanetariumJakarta>
- 4) Taman Fatahillah: <http://bit.ly/TamanFatahillah>
- 5) Taman Istiqlal: <http://bit.ly/MasjidIstiqlalVirtualTour>

- 6) Museum Sumpah Pemuda: <http://bit.ly/MuseumSumpahPemudaVirtualTour>
 7) Museum Kebangkitan Nasional : <http://virtualtour.muskitnas.net/>

Virtual Tur yang terkait *defense heritage* adalah Monumen Nasional, taman Fatahullah, Museum Sumpah Pemuda, dan Museum Kebangkitan Nasional.

- b. Kuis-kuis tentang *defense heritage* apakah dibangun pada era Nusantara atau kolonial atau zaman Jepang. Hal ini berpedoman pada pembagian kronologis sejarah untuk *defense heritage* yang telah dijabarkan pada Bab 2 Teori.
- c. Lomba Esai untuk menceritakan tentang *defense heritage* di kota/kabupaten terdekat tempat tinggal para siswa SD, SMP, SMA, yang dikaitkan dengan nilai-nilai bela negara, terutama rasa cinta tanah air.
- d. Tes pilihan ganda seputar pengetahuan tentang *defense heritage* sebagai program bela negara. Non-tes dapat berupa skala, observasi, dan wawancara. Namun wawancara perlu dikurangi karena Pandemi Covid-19.

Dengan terlibatnya semua pemangku kepentingan dalam memikirkan dan menyusun bahan ajar *defense heritage* untuk sarana program bela negara dan penyiapan kurikulum tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan oleh ahli arkeologi dan budaya Indonesia Edi Sedyawati dalam bukunya “Budaya Indonesia: Kajian Arkeologi, Seni, dan Sejarah” (2006, p.330) bahwa adalah tugas kita bersama, para guru dan para pengisi media massa, untuk meningkatkan kesadaran budaya dan kesadaran sejarah pada masyarakat luas dalam hal meningkatkan derajat, rasa kepercayaan diri, dan harkat bangsa Indonesia.

Bahan ajar berupa komik tersebut adalah termasuk ke dalam budaya populer sebagai komoditi yang membawa kepentingan nasional (Fiske, 1995, p.25), dalam hal ini *defense heritage* sebagai program bela negara. Komik *Defense Heritage* (bisa lihat Komik pada Lampiran) tersebut adalah sarana media agar guru dan murid menerima informasi tentang pemahaman *defense heritage* sebagai proses belajar yang populer, diakui, hidup, aktif, dan nyata untuk diketahui, dikritisi, dan terus dikaji tanpa henti.

Bahan ajar berupa komik tersebut juga dapat lebih menyenangkan bagi guru, siswa, dan fasilitator di sekolah, universitas, ataupun Lembaga negara dan kementerian, sehingga semua pihak dapat mengenal *defense heritage* sebagai program bela negara dan menerapkannya dalam bentuk kesadaran mempelajari sejarah secara utuh dan total melalui perspektif sejarah mental perjuangan bangsa Indonesia atau sesuai Kajian *histoire de la mentalite* Bloch, seperti yang telah dijelaskan di dalam Bab 2 Teori.

Fakta di dalam sejarah tidak cukup hanya untuk dihapal, melainkan perlu diinterpretasi dan dimaknai. Seperti yang dipaparkan sekilas tentang situs-situs sejarah di atas, pada prinsipnya bermakna keindonesiaan. Itu karena keberadaannya merupakan simpul-simpul yang berperan merajut Nusantara juga. Para pejuang itu ternyata tidak merasa diasingkan, tetapi justru dapat menumbuhkan inspirasi bagi tumbuhkembangnya nasionalisme dan tujuan Indonesia merdeka. Melalui pemahaman dan kesadaran yang diharapkan dapat dipetik dari lawatan sejarah itu, maka sesungguhnya merupakan modal yang dapat dimanfaatkan untuk tujuan pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan serta sejarah perjuangan bangsa. Pada tahap ini sesungguhnya suatu penanaman nilai-nilai untuk menumbuhkembangkan sikap Bela Negara sudah dapat dilakukan. Konsep “perang semesta”, meskipun tidak dapat disamakan dengan Perang Kemerdekaan Indonesia (1945-1949), tetapi bermakna dalam dengan kaitan semangat dan nilai yang telah diperlihatkan sebagai sinergitas kekuatan militer dan nirmiliter, yang melibatkan rakyat. Namun demikian pengertian rakyat tidak harus dalam arti yang dipersenjatai. Perbedaan mencolok pada perkembangan kini karena terdapat perang semesta ‘bentuk baru’ yakni dengan pendekatan ‘smart power’ dengan tujuan untuk mencegah terjadinya perang dengan menggunakan cara-cara militer. Konsep itu maknanya bukan berarti seolah-olah rakyat yang berperang secara langsung sebagai *human shield*, melainkan kesemestaan seluruh potensi nasional yang dikerahkan untuk kepentingan pertahanan. Jadi lebih bermakna pertahanan semesta (Zuhdi, 2014, p.50).

Dengan kondisi geografi yang sedemikian terbuka, maka Indonesia dengan sadar memilih untuk lebih bersifat bertahan dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI serta melindungi keselamatan bangsanya. Dengan memperhatikan hakikat, sumber, bentuk, spektrum, dan skala ancaman yang semakin kompleks dan dengan begitu luasnya wilayah, maka NKRI sangat sulit dapat dipertahankan hanya secara militer, maka suatu sistem pertahanan yang dianggap sesuai adalah dengan melibatkan seluruh komponen bangsa. Dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, kita dapat tunjukkan bahwa ketika Yogyakarta, sebagai pusat pemerintahan diduduki dan pemimpin negara ditangkap dan dibuang ke Bangka pada aksi militer kedua 1948, rakyat bersama TNI di bawah komando gerilya Jenderal Sudirman, Belanda tidak berhasil mem-*fait-accomplis* negara Indonesia sudah hancur. Rupanya Belanda tidak menyadari ternyata masih ada satu center of gravity lagi yang belum ditundukkan

yakni Jenderal Sudirman, pemimpin gerilya, yang nota bene, personifikasi terakhir bentuk perlawanan rakyat bersama TNI terhadap Belanda (Zuhdi, 2014).

Akhir kata, kajian ini melihat bahwa narasi dibalik bangunan bersejarah itu amat penting, sehingga perlu ada kemauan pemerintah untuk membangun narasi itu yang dimulai dengan pendataan objek *defense heritage* di tiap-tiap kota. Dalam kaitannya dengan *defense heritage*, kajian ini telah mengusulkan bahwa model *defense heritage* untuk program bela negara yang menempatkan Balitbang Kemhan dalam hal pembangunan narasi *defense heritage*. Balitbang Kemhan dapat berkoordinasi dengan Ditjen Pothen DirBelNeg, insan pertahanan atau kader bela negara, dan pihak terkait untuk melakukan pendataan rinci *defense heritage* di tiap kota/kabupaten. Sebab pengetahuan dari kesepakatan masyarakat di lokasi tersebut amat penting sebagai dasar awal riset dalam membangun narasi bangunan bersejarah. Hal ini telah dijelaskan sebelumnya dan juga sudah termasuk ke dalam *Francoise Framework for Defense Heritage Protection* (Francoise, 2018), bahwa partisipasi publik adalah bagian penting dalam setiap proses *defense heritage*.

Proses pemugaran cagar budaya perlu memperhatikan aspek keindahan dan estetika juga. Dalam hal ini, Kuathan perlu memiliki program-program yang dapat melibatkan Dinas PUPR dalam hal Revitalisasi cagar budaya bernilai pertahanan atau *defense heritage*. Tantangan ke depan adalah bagaimana menciptakan *quality tourism* di Indonesia. Aspek ekonomi itu penting bagi pengembangan turisme, namun yang lebih penting adalah aspek narasi dalam hal menumbuhkan kepercayaan diri bangsa. Hal ini juga termasuk ke dalam fungsi Menteri Pertahanan selaku pimpinan tertinggi Kementerian Pertahanan yang dapat mengkondisikan skenario pendanaan dan anggaran dalam hal pemugaran, pemeliharaan, restorasi, digitalisasi, dan revitalisasi *defense heritage* sebagai program bela negara, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Filsuf Prancis, Ernest Renan pernah mengatakan, "*Qu'est-ce que c'est raison d'être d'être une nation?*", atau apa saja syarat-syarat terjadinya bangsa? Pemaknaan kebangsaan yang dikaitkan dengan benda-benda mati tidaklah mudah, sebab benda-benda mati itu tidak bisa berbicara, tidak bisa mengemukakan dirinya, dan tidak bisa menolak akan interpretasi yang diberikan kepadanya.

Keyakinan ilmiah bahwa benda-benda yang mati dapat mengantarkan pada pemahaman sejarah juga merupakan perjuangan panjang kajian ini. Dalam hal upaya pemberian makna itu, negara perlu meleburkan dirinya ke dalam pemahaman sejarah

secara total dan mengakomodir partisipasi publik, terutama bagi mereka yang punya peran melestarikan dan menjaga tempat atau bangunan bersejarah. Sebab kadangkala apa yang dilihat dari luar lebih penting ketimbang apa yang ada di dalam, seperti anak muda masa kini yang hanya mau berswafoto di objek bersejarah yang *Instagrammable*.

Kajian ini melihat bahwa *defense heritage* adalah bagian penting untuk memahami Negara Kesatuan Republik Indonesia secara lebih utuh, komprehensif, terpadu, dan menyeluruh. Objek-objek *defense heritage* adalah penanda bahwa bangsa Indonesia memiliki sejarah panjang untuk mencari jati dirinya. Objek-objek *defense heritage* adalah wujud wawasan kebangsaan yang perlu dilestarikan, dijaga, dipelihara, dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Pemahaman akan objek-objek *defense heritage* bukan hanya sekedar pemahaman sejarah di balik objek itu, tetapi juga pemahaman akan karakter kebangsaan orang Indonesia di luar objek itu yang selalu berusaha keras, berjuang, melawan, dan bersusah payah meraih kemerdekaan. Keyakinan dan rasa percaya diri sebagai orang Indonesia itulah yang harus ditumbuhkan di dalam dada setiap insan pertahanan.

Pemahaman sejarah nasional Indonesia, terutama sejarah pertahanan sebaiknya dimulai dengan pemahaman akan objek-objek *defense heritage*. Pemahaman akan *defense heritage* akan mempersiapkan bangsa Indonesia menjadi negara modern yang jaya dan makmur. Negara Indonesia hanya akan berdiri dengan jaya apabila memiliki pemimpin yang adil dan rakyatnya mampu memaknai segala benda dan perihal benda itu yang berada di sekitarnya. Kajian ini mengemukakan postulat ilmiah penutup bahwa masyarakat Indonesia yang modern adalah masyarakat Indonesia yang sadar *Defense Heritage*.